

D' Risole

(Data Riau Sosial Ekonomi)

dalam **Sebungkus Koran 2021**

Kumpulan Tulisan Karyawan BPS Se-Provinsi Riau



D'Risole (Data Riau Sosial Ekonomi)

dalam Sebungkus Koran 2021

Kumpulan Tulisan Karyawan BPS Se-Provinsi Riau



D’Risole “Data Riau Sosial Ekonomi” Dalam Sebungkus Koran 2021

ISBN: -

No. Publikasi: 14000.2343

Katalog: 1205033.14

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 142 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Diterbitkan oleh:

© BPS Provinsi Riau

Dicetak oleh: BPS Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas dirilisnya publikasi **D'Risole dalam Sebungkus Koran 2021**. Publikasi ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan para statistisi dan pegawai struktural BPS se-Provinsi Riau yang dimuat diberbagai media lokal maupun media nasional. Tulisan-tulisan ini memuat berbagai hasil analisis lebih lanjut data BPS Provinsi Riau dan dituangkan dalam bentuk berita opini. Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat merangkum tulisan dari pegawai BPS se-Provinsi Riau dan dapat menjadi motivasi bagi penulis-penulis lainnya untuk dapat menuangkan ide dan fikirannya kedalam sebuah tulisan.

Publikasi **D'Risole dalam Sebungkus Koran 2021** merupakan publikasi yang diterbitkan secara periodik setiap tahun, sehingga tulisan dari para penulis di BPS se Provinsi Riau dapat terkompilasi dan terdokumentasi dengan baik dalam sebuah publikasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah bersedia menyumbangkan tulisannya kedalam publikasi ini dan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Pekanbaru, September 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Asep Riyadi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
MEMAHAMI HARGA, OLEH : IRFARIAL, SE DIMUAT DI RIAUPOS, 4 JANUARI 2021	1
PERSEPSI PUBLIK TERHADAP TINDAKAN KORUPSI, OLEH : NELAYESIANA BACHTIAR, SST,MM DIMUAT DI RIAUPOS, 6 JANUARI 2021	4
WATERFRONT CITY UNTUK PEMUKIMAN KUMUH , OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THECOLUMNIST.ID, 20 JANUARI 2021	8
MASIH LEMAHKAH DAYA BELI MASYARAKAT RIAU, OLEH : AGUS NUWIBOWO DIMUAT DI GORIAU.COM, 21 JANUARI 2021	11
PERDAGANGAN RIAU-AMERIKA SERIKAT, OLEH:IRFARIAL, SE DIMUAT DI RIAU POS, 25 JANUARI 2021	13
MENANTI KOTA PEKANBARU YANG BERSIH DAN RAPI, OLEH : AGUS NUWIBOWO DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 26 JANUARI 2021	16
ANTARA SI PUTIH, WANITA DAN LINGKUNGAN, OLEH :FITRI HARIYANTI, SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST, 31 JANUARI 2021	18
SAMPAH DI INDONESIA : BOM WAKTU YANG SIAP MELEDAK, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST DIMUAT DI THE COLUMNIST, 31 JANUARI 2021	21
MILENIAL DI ERA BONUS DEMOGRAFI, OLEH : RIKA WAHYUNI,SST,MM DIMUAT DI RIAU POS, 1 FEBRUARI 2021	25
LAGAR NASIB PETANI SEMANIS TEBU, OLEH : ARNI JUWITA NOVISDA, SST DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 3 FEBRUARI 2021	28
MILENIAL RIAU, ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN, OLEH : DESSY SYUKRIYA ARYATI, SST DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 14 FEBRUARI 2021	31

EKSPOR 2020, PENGGERAK EKONOMI DI MASA RESESI, OLEH : IRFARIAL, SE DIMUAT DI RIAU POS, 15 FEBRUARI 2021 _____	34
ANDIL ROKOK DALAM KEMISKINAN DAN PENGELUARAN KITA, OLEH : YANDIKA WELRA,SST DIMUAT DI RIAU POS, 17 FEBRUARI 2021 _____	37
PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID , 21 FEBRUARI 2021 _____	40
LAMPU KUNING KEMISKINAN RIAU, OLEH : LINA AGUSTINA PUJIWATI, SST,M.EC.DEV DIMUAT DI RIAU POS, 24 FEBRUARI 2021. _____	43
SETAHUN BERSAMA VIRUS CORONA, OLEH : NOLIZA, SST DIMUAT DI RIAU POS, 3 MARET 2021 _____	46
MEMBENTUK LANSIA BERKUALITAS, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 6 MARET 2021 _____	49
PERTANIAN SEKTOR TANGGUH OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST DIMUAT DI RIAU POS, 8 MARET 2021 _____	52
OVER POPULASI DAN ANCAMAN LATENNYA, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 9 MARET 2021 _____	54
MENAHAN LITERASI MASYARKAT RIAU? OLEH : DESI DAMAIYANTI,SST DIMUAT DIRIAU POS, 10 MARET 2021 _____	57
SKB 3 MENTERI, BENARKAH SEBUAH SOLUSI ?, OLEH : DESI DAMIYANTI, SST DIMUAT DI DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 11 MARET 2021 _____	59
MENAJGA MARWAH PETANI RIAU, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE DIMUAT DI RIAU POS, 12 MARET 2021 _____	61
SKB TIGA MENTERI SAAT MASIH BANYAK ANAK TAK MAMPU SEKOLAH, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 18 MARET 2021 _____	65
MELIHAT PRODUKSI PADI KUANTAN SINGINGI, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE DIMUAT DI HALUAN RIAU, 20 MARET 2021 _____	68
IRONIS : ANTARA KETAHANAN PANGAN DAN SAMPAH MAKANAN, OLEH : FITRI HARIYANTI, SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 21 MARET 2021 _____	70
MAMPUKAH UMKM RIAU MENEMBUS PASAR EKSPOR ?, OLEH : AGUS NUWIBOWO DIMUAT DI RIAU POS, 22 MARET 2021 _____	73
MENYOAL NASIB PETANI KARET, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 23 MARET 2021 _____	75

NASIB BERAS RIAU, OLEH : IRFARIAL, SE	
DIMUAT DI RIAU POS, 24 MARET 2021	78
PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI KELOMPOK TANI, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE	
DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID ,26 MARET 2021	80
WACANA IMPOR BERAS DI PANEN RAYA, APA KATA DATA ?, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE	
DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID ,28 MARET 2021	83
REGULASI DI BALIK ASAP ROKOK, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST	
DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 3 APRIL 2021	86
INFLASI JELANG RAMADHAN, OLEH : RIKA WAHYUNI, SST,MM	
DIMUAT DI RIAU POS , 7 APRIL 2021	88
NARKOBA, ANCAMAN DI TENGAH PANDEMI, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST	
DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 14 APRIL 2021	91
BELENGGU PENGHALANG EMANSIPASI PEREMPUAN INDONESIA, OLEH : HENI NAINGGOLAN, SST,MM	
DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 21 APRIL 2021	93
RAMADAN MOMENTUM PEMULIHAN MENTALITAS, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST	
DIMUAT DI RIAU POS ,31 APRIL 2021	95
TAKJIL DAN TAPIOKA, OLEH : IRFARIAL, SE	
DIMUAT DI KORAN RIAU POS ,3 MEI 2021	97
MOBILITAS DAN COVID-19, OLEH : SARAH SOLIKHATUN RISMA	
DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 10 MEI 2021	99
REGULASI BERBASIS AGAMA DAN INDEKS DEMOKRASI, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST	
DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID ,19 MEI 2021	101
UJI HIPOTESIS, BUKTI EKSISTENSI STATISTIK DI DALAM ALQURAN, OLEH : MUJI BASUKI SST,M.SI	
DIMUAT DI GORIAU.COM, 21 MEI 2021	104
TETAP TUMBUH MESKI PANDEMI, OLEH : IRFARIAL, SE	
DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 24 MEI 2021	106
INDUSTRI HILIR UNTUK PETANI KARET, OLEH : ROBY JUNIUS, SE	
DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 26 MEI 2021	108
PLUS MINUS MENJADI PNS, OLEH : ROBY JUNIUS, SEI	
DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 15 JUNI 2021	110
GELIAT PEREKONOMIAN RIAU DI MASA PANDEMI, OLEH : NELAYESIANA BACHTIAR,SST,MM	
DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 21 JUNI 2021	112

KOTA PEKANBARU SEMAKIN TUA, OLEH : IRFARIAL, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 29 JUNI 2021	115
SAYONARA PANDEMI, OLEH : NELAYESIANA BACHTIAR,SST,MM DIMUAT DI GORIAU.COM, 2 JULI 2021	117
DATA BERKUALITAS DI MULAI DARI DESA, OLEH : IRFARIAL, SE DIMUAT DI KORAN RIAU POS ,12 JULI 2021	120
MENGURANGI KEBIASAAN BERHUTANG, OLEH : ROBBY JUNIUS, SE DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 16 JULI 2021	122
DONGKRAK EKSPOR DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI RIAU, OLEH : AGUS NUWIBOWO DIMUAT DI RIAU POS , 20 AGUSTUS 2021	125
KAPAN PANDEMI COVID-19 BERAKHIR?, OLEH : FITRI HARIYANTI, SST,MM DIMUAT DI GORIAU.COM, 3 SEPTEMBER 2021	127
MENYOAL GENDER DI MASA PANDEMI COVID-19, OLEH : PUJI WAHYU WIDAYATI, SST DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 24 SEPTEMBER 2021	130
HARI STATISTIK NASIONAL, MOMENTUM KECIL MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERPERADABAN, OLEH : MUJI BASUKI, SST,MSI DIMUAT DI GORIAU.COM ,26 SEPTEMBER 2021	132
DIMENSI KEMISKINAN PEREMPUAN, OLEH : DESI DAMAIYANTI,SST DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID ,12 OKTOBER 2021	134
TUMPUKAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF SURVEI LINGKUNGAN, OLEH : MUJI BASUKI, SST,MSI DIMUAT DI GORIAU.COM, 24 NOVEMBER 2021	137
HARGA BATU BARA DUNIA MELEJIT, AKANKAH INDONESIA DIUNTUNGAN ?, OLEH : JESICA NAULI, S.TR.STAT DIMUAT DI GORIAU.COM ,24 DESEMBER 2021	140

Memahami Harga

Oleh : Irfarial, SE

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 4 JANUARI 2021



Harga sangat berperan terhadap lancarnya proses pertukaran atau proses jual beli barang-barang dan jasa. Berbagai kesepakatan penting tercipta karena harga. Begitu juga sebaliknya, gagalnya berbagai transaksi juga ada pengaruh harga. Harga adakalanya bergerak naik, baik naik secara halus maupun ekstrem. Juga adakalanya harga mengalami penurunan, baik turun secara halus maupun turun secara tajam. Bagi para produsen ataupun penjual barang dan jasa, tiada kata yang lebih indah selain kata senang dan bahagia begitu melihat hasil produksinya laris di pasaran dengan harga penjualan yang memberikan cukup kelebihan atau keuntungan. Jerih payah mereka memproduksi ataupun memerdagangkan barang dan jasanya serasa terbayar lunas ketika barang dan jasanya sampai di tangan pembeli.

Sementara bagi konsumen barang-barang dan jasa, harga adalah ukuran besar kecilnya nilai kepuasan yang diperoleh terhadap produk yang dibelinya. Mereka akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila mereka menilai kepuasan yang diharapkannya dari produk yang dibelinya itu tinggi. Sebaliknya jika kepuasannya terhadap produk yang dibelinya itu rendah maka mereka tidak akan bersedia membayar atau membeli produk tersebut dengan harga yang mahal. Mekanisme pasar merupakan tempat penciptaan harga yang harmonis. Harmonis

menurut pemilik barang-barang dan jasa, dan juga harmonis yang dirasakan oleh pihak yang menginginkan barang-barang dan jasa tersebut. Namun kadangkala mekanisme pasar bisa saja terjadi bukan karena harga yang tercipta itu harmonis, melainkan karena adanya keterpaksaan bagi pemilik barang-barang dan jasa, yaitu dengan istilah “dari pada tidak terjual”, “yang penting balik modal”, bahkan menjual rugi.

Pergerakan harga-harga di dalam ilmu ekonomi disebut dengan istilah inflasi atau deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sebaliknya jika terjadi penurunan harga disebut dengan deflasi. Kejadian inflasi dan deflasi akan selalu terjadi secara silih berganti.

Namun beberapa tahun belakangan kondisi harga-harga di Provinsi Riau seakan-akan tidak berpihak kepada pemilik barang-barang dan jasa atau pihak produsen maupun pedagang. Berbagai Pasar di Riau yang pedagangnya sebagian besar suku minang, sering terdengar kalimat, “onde ndak ado bana jua bali do”, yang artinya sedikit sekali terjadi jual beli. Keprihatinan ini menjadi bertambah dengan mewabahnya pandemi covid-19 yang menerpa hampir seluruh negara di dunia. Ibarat kata pepatah sudah terjatuh tertimpa tangga pula. Tingkat harga-harga

di Riau yang rendah tergambar dari angka-angka inflasi yang rendah. Bahkan tingkat inflasi tahunan di Riau berada di bawah sasaran inflasi nasional.

Tahun 2018

Rata-rata inflasi Provinsi Riau selama tahun 2018 adalah sebesar 2,45 persen, artinya lebih rendah dari angka sasaran inflasi nasional tahun 2018 yang ditetapkan pemerintah sebesar $3,5 \pm 1$ persen (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 pada tanggal 21 Mei 2014). Bahkan lebih rendah dibanding rata-rata inflasi nasional tahun yang sama, yaitu sebesar 3,13 persen. Selama sepuluh bulan tahun 2018, tingkat inflasi Provinsi Riau berada di bawah 0,50 persen, bahkan dua bulan diantaranya mengalami deflasi, yaitu bulan Februari (-0,27 %), dan bulan September (-0,26 %).

Tahun 2019

Dibanding tahun 2018, rata-rata inflasi Provinsi Riau tahun 2019 lebih rendah lagi. Rata-rata inflasi Provinsi Riau selama tahun 2019 adalah sebesar 2,36 persen, artinya lebih rendah dari angka sasaran inflasi nasional tahun 2019 yang ditetapkan pemerintah sebesar $3,5 \pm 1$ persen (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 pada tanggal 18 September 2017). Bahkan lebih rendah dibanding rata-rata inflasi nasional tahun yang sama, yaitu sebesar 2,72 persen. Selama delapan bulan tingkat inflasi Riau tahun 2019 berada di bawah 0,50 persen, bahkan enam bulan diantaranya terjadi deflasi, yaitu bulan Januari (-0,06 %), Februari (-0,34 %), September (-0,32 %), Oktober (-0,07 %), November (-0,23 %), dan bulan Desember (-0,16 %).

Tahun 2020

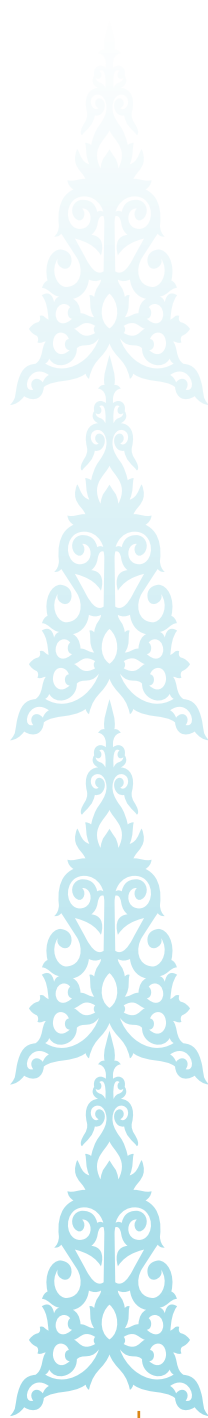
BPS Provinsi Riau baru saja merilis angka Inflasi Riau bulan November 2020 yaitu sebesar 0,33 persen. Angka inflasi Riau kembali turun setelah sempat mencapai 0,56 persen pada bulan Oktober 2020. Meskipun inflasi Riau bulan oktober menjadi tingkat inflasi Riau yang tertinggi selama sebelas bulan ini, namun demikian rata-rata tingkat inflasi Riau selama tahun 2020 hingga November masih rendah, yaitu baru mencapai 1,85 persen. Angka ini masih jauh dari angka sasaran inflasi nasional tahun 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar $3,0 \pm 1$ persen. Hingga November 2020, Riau mengalami empat kali deflasi yaitu di bulan Maret (-0,01 %), April (-0,26 %), Juli (-0,24 %), dan September (-0,01 %).

Banyak yang menganggap bahwa inflasi tinggi sebagai momok dan biang kerok mahalnya barang kebutuhan, sehingga mereka berharap inflasi selalu rendah. Padahal dampak inflasi yang sangat rendah juga ada sisi negatifnya. Memang dampak inflasi rendah itu terlihat lebih menguntungkan kalau kita adalah konsumen. Tapi dari sisi pengusaha inflasi yang terlalu rendah membuat bisnis mereka lesu atau bahkan merugi. Inflasi yang keninggian membuat barang-barang dan jasa menjadi kurang laku. Sebaliknya inflasi yang kerendahan membuat perdagangan lesu.

Sememangnya inflasi tidak akan menjadi masalah yang terlalu berarti jika keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya produk barang-barang dan jasa yang cukup dan ditimpali dengan kenaikan tingkat pendapatan yang lebih besar. Inflasi bagaikan pedang bermata dua dimana satu sisi bisa memberikan keuntungan dilain sisi merugikan. Biaya produksi untuk

menghasilkan barang-barang dan jasa yang semakin tinggi menyebabkan harga jualnya menjadi relatif tinggi, disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap. Inflasi bagaikan pegas yang harus dijaga kelenturannya jika terlalu tinggi bisa membahayakan pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya jika terlalu rendah akan menyebabkan kelesuan ekonomi dan tidak akan memberikan stimultan kepada sektor riil untuk melakukan kegiatan produksi.

Pengaruh akumulasi dari pandemi covid-19 berdampak luas pada merosotnya perekonomian dunia, pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana, membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Dengan pemberlakuan kebijakan new normal, diharapkan roda-roda perekonomian masyarakat kembali bergerak, dengan terus mematuhi protap dan protokol kesehatan karena virus corona masih berada di sekitar kita. Demikian juga dengan di Riau yang sudah begitu lama dirasakan oleh para pemilik barang-barang dan jasa, semoga kondisi harga-harga di Provinsi Riau akan terus membaik dan menemukan harga-harga terbaiknya, sehingga perekonomian kembali bertumbuh ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.



Persepsi Publik Terhadap Tindakan Korupsi

Oleh : Nelayesiana Bachtiar, SST,MM

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 6 JANUARI 2021



Lagi-Lagi Korupsi

Kasus korupsi ramai menjadi perbincangan, berbagai lini media memberitakan kasus korupsi terbaru yang menjadi trending topik. Dalam waktu yang berdekatan, tokoh pejabat Indonesia terjerat kasus korupsi yang sungguh mengejutkan masyarakat. Terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bagaikan mendung kelabu di tengah derasnya hujan pandemi saat ini. Ironinya, kasus ini terungkap justru saat dunia akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia disetiap tanggal 9 Desember. Tindakan korupsi ini bukanlah kasus korupsi pertama di Indonesia dan bukan lagi menjadi hal yang baru. Kasus korupsi Indonesia seakan tak ada habisnya, ada saja tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan kasus korupsi menjadi alasan dasar untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, namun bila melihat kondisi saat ini ibarat masih jauh panggang dari api.

Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi di Indonesia ternyata sudah dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, yakni pada zaman-zaman kerajaan terdahulu, bisa saja zaman tersebut menjadi awal dari korupsi. Seperti diketahui, pada kerajaan-kerajaan terjadi

perebutan kekuasaan yang dilatarbelakangi kekuasaan dan ekonomi. Korupsi di Indonesia seperti sudah “membudaya” sejak dulu, bahkan hingga setelah kemerdekaan. Budaya korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi beberapa oknum, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan. Seolah-olah menjadi hal yang lumrah, walaupun secara hukum telah ada peraturan untuk tidak melakukan hal demikian, namun tetap saja kejadian demi kejadian kembali berulang dan terungkap. Rasanya korupsi tidak akan pernah mati dan terus berkembang, tak pelak membuat masyarakat menjadi pesimis dan kecewa, menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Tindak korupsi kian meluas, bahkan hampir di setiap lapisan masyarakat. Akar penyebab berkembangnya tindak korupsi bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti haus akan kekayaan dan kekuasaan, membuat pelaku terbuai untuk melakukan tindakan yang jelas-jelas dilarang. Rendahnya integritas dapat juga menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi, sehingga mudah terbuai rayuan untuk menerima suap atau jenis tindakan korupsi lainnya. Masih kentalnya budaya korupsi pun menjadi salah satu penyebab maraknya tindakan korupsi, karena merasa hal tersebut merupakan hal yang

wajar dan terbiasa dilakukan, sehingga seperti melanjutkan hal yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Masalah budaya inilah yang menyebabkan pemberantasan terhadap korupsi tidak pernah tuntas. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan telah terjadi sebanyak 169 kasus korupsi selama periode semester satu 2020, jumlah ini tentunya akan mengalami pertambahan hingga akhir 2020, mengingat kasus baru yang terjadi dalam dua pekan ini.

Bila dilihat dari sisi persepsi publik terhadap tindakan korupsi, adanya Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index-CPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2019 posisi Indonesia berada di urutan 85 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 40, yang mengalami kenaikan dua poin dibanding tahun sebelumnya. Artinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat menilai praktik korupsi di Indonesia telah berkurang, namun dibalik itu tetap saja kasus korupsi baru terus terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). SPAK yang menghasilkan IPAK dengan skala 0 sampai 5, bila indeks mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya zero tolerance terhadap korupsi semakin melekat dan mewujudkan dalam perilaku

masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Berdasar hasil pengukuran IPAK 2020 sebesar 3,84, menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 3,70. Berdasar hasil IPAK 2020 yang semakin mendekati 5, tergambar bahwa sikap masyarakat yang semakin anti akan terjadinya tindak korupsi seiring dengan perubahan waktu di setiap tahunnya, serta masyarakat menganggap bahwa korupsi di sektor publik semakin berkurang. Namun, persepsi masyarakat yang semakin yakin akan berkurangnya korupsi, seolah harus menerima kekecewaan kembali akan kenyataan pahit yang kini tengah dihadapi Indonesia. Capaian peningkatan nilai IPAK 2020 ini, ternyata masih cukup jauh dari target, karena IPAK Indonesia 2020 ditargetkan berada pada skor 4,00. Hal ini menggambarkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, terkhusus dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Bila dilihat tren IPAK dari tahun 2012 hingga tahun 2020 cenderung mengalami fluktuasi, dengan nilai IPAK 2012 sebesar 3,55 yang merupakan nilai IPAK terendah hingga tahun 2020. Nilai IPAK juga dapat dikaji dari komposisi pendidikan, menunjukkan semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi, dengan IPAK tertinggi untuk pendidikan di atas SLTA sebesar 3,97. Ironisnya, kasus korupsi yang baru saja terungkap, justru dilakukan oleh kalangan kaum elit dengan latar belakang tingkat pendidikan tinggi. Kenyataan seperti inilah yang membuat masyarakat kecewa akan

tindak korupsi yang justru dilakukan oleh tokoh pejabat negara yang haus kekayaan dan kekuasaan.

Berantas Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Dengan demikian, tindakan korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang harus diberantas secara luar biasa. Pada dasarnya, sejak bermulanya tindakan korupsi di Indonesia, sejak itu pulalah perjuangan memberantas korupsi telah dilakukan. Perjuangan melawan korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, sebagai salah satu bukti adanya pesan anti korupsi dari Ki Hajar Dewantara yang saat ini dipajang di Museum Sumpah Pemuda, yang berbunyi “Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaatpun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, lahir maupun batin aku tak pernah mengkorup kekayaan negara”.

Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh segelintir orang saja, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk membebaskan Indonesia dari korupsi, yang dapat dimulai dari diri sendiri. Penegakan hukum yang efektif menjadi poin utama dan sangat penting dalam memberantas korupsi. Hukum yang adil dan merata merupakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah, agar tidak terjadi hukum yang pilih kasih pada pelaku korupsi. Penegak hukum diharapkan dapat bersikap adil tanpa melihat status dan jabatan

dari para pelaku tindak korupsi. Dengan penegakan hukum yang tepat dapat menjadikan efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam rangka upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dengan adanya penetapan payung hukum yang sudah sangat jelas dan rinci, tentunya diharapkan penerapan yang tepat sasaran agar tercapai tujuan Indonesia terbebas dari tindakan korupsi.

Memberantas korupsi tidak hanya bertumpu pada upaya membasmi akar korupsinya, namun tindakan mencegah terjadinya korupsi tidak kalah penting untuk diterapkan. Tindakan pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan manajemen keuangan serta memperkuat peran lembaga audit, agar tidak ada cela yang bisa membuat para oknum melakukan tindakan korupsi, sehingga upaya meminimalisir terjadi korupsi dapat semakin efektif dan efisien. Penerapan sistem keuangan yang sesuai standar anti korupsi yang dilengkapi dengan bukti pendukung dalam penggunaan anggaran pemerintah, tentunya juga dapat mencegah tindak korupsi.

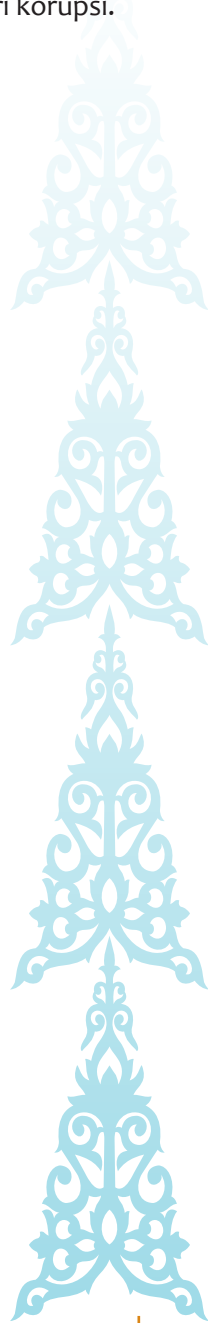
Menanamkan sifat dan perilaku anti korupsi serta nilai-nilai kejujuran dapat dimulai dari diri sendiri di kehidupan sehari-hari sejak dini, yang merupakan salah satu peran penting masyarakat dalam memberantas korupsi. Kontribusi masyarakat bisa sangat bermanfaat, masyarakat dapat ikut mengawasi situasi dan kondisi yang rentan akan dijadikan tindak korupsi, masyarakat dapat memberikan laporan yang benar jika mengetahui terjadinya kasus korupsi di lingkungan sekitar.

Dalam memberantas korupsi, pemerintah hingga ke seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sarana sebagai penunjang untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak korupsi. Pemanfaatan teknologi merupakan pilihan terkini yang dapat membantu melacak dan merekam jejak digital, sehingga sebagai penunjang untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak korupsi. Pemanfaatan teknologi merupakan pilihan terkini yang dapat membantu melacak dan merekam jejak digital, sehingga pengumpulan bukti-bukti tindak korupsi menjadi lebih mudah dan tepat. Dengan semakin ketatnya rekam jejak yang jadi lebih mudah untuk dilacak, diharapkan kasus korupsi benar-benar dapat dihilangkan.

Korupsi yang telah membudaya dan mendarah daging tentunya menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi negara. Perlahan tapi pasti, budaya korupsi ini terus diupayakan digerus dan diberantas dengan cara menetapkan upaya yang sistematis. Memberantas korupsi tentunya bukan semudah membalikkan telapak tangan. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar, agar seluruh tindakan korupsi hilang dari akar-akarnya.

Membebaskan Indonesia dari korupsi menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ke-16 yakni perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, korupsi menjadi salah satu tujuan global, di mana sasaran globalnya adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala

bentuknya. Berdasar RPJMN 2020-2024, sasaran nasional yang ingin diwujudkan adalah tercapainya target IPAK pada tahun 2024 sebesar 4,14. Dengan sinergi dan komitmen bersama dari semua pihak, setidaknya kasus tindakan korupsi di Indonesia diharapkan dapat berkurang bahkan benar-benar dapat dihilangkan, sehingga terwujudnya Indonesia sebagai negara yang bersih dan bebas dari korupsi.



Waterfront City untuk Permukiman Kumuh

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,MM

OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST.ID, 20 JANUARI 2021



Beberapa waktu lalu, The Columnist menyajikan tulisan dari Bung Supriyadi yang membahas tentang polemik tunawisma di ibu kota. Berita ini menjadi ramai dan trending karena mantan wali kota Surabaya yang baru saja menjabat sebagai Menteri Sosial menemukan tunawisma di kawasan elite Kota Jakarta yaitu sekitar jalan Sudirman-Thamrin. Keberadaan tunawisma di kawasan elite ini menjadi hal aneh karena mereka biasanya berada di permukiman kumuh.

Tunawisma identik dengan tidak mempunyai tempat tinggal, biasanya tunawisma akan mudah ditemui di daerah yang tidak layak huni seperti kolong jembatan, emperan toko, terminal bus, stasiun, dan pasar-pasar, bahkan juga di pinggiran sungai. Biasanya mereka menggunakan kardus-kardus bekas sebagai pembatas wilayah atau milik pribadi.

Daerah yang banyak terdapat hunian seperti ini biasanya disebut dengan daerah kumuh atau permukiman kumuh. Keberadaan permukiman ini sangat mengganggu keindahan dan tata kota. Keberadaan permukiman yang tidak layak huni menjadi salah satu ciri dari kota-kota besar terutama kota di negara berkembang termasuk Indonesia.

Di Indonesia, jumlah desa/kelurahan yang terdapat permukiman kumuh

meningkat sebesar 1,39 persen dalam kurun waktu 2014-2018 (Podes, 2018). Peningkatan disebabkan karena banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) dengan alasan untuk mencari nafkah dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Sementara itu, ketersediaan hunian di perkotaan sangat terbatas.

Dilansir dari Kompas.com (09/07/2020), Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Achdiat memprediksi sebanyak 66 persen penduduk Indonesia akan melakukan urbanisasi di wilayah perkotaan pada tahun 2035 mendatang. Hal ini dapat menyebabkan permukiman kumuh akan meningkat di kota-kota.

Permukiman kumuh biasanya ditandai dengan ciri-ciri: penduduk yang sangat padat sekitar 250-400 jiwa/ha, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, jalan-jalan yang sempit, fasilitas drainase yang tidak memadai bahkan tidak terdapat drainase sama sekali, fasilitas pembuangan air kotor/tinja yang sangat minim atau tidak ada sehingga pembuangan dilakukan di aliran sungai, serta minimnya penyediaan fasilitas air bersih (Sinulingga, 2005).

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat diketahui masalah atau dampak apa yang mungkin akan ditimbulkan. Diantaranya

masalah kesehatan dimana penduduk di permukiman kumuh rentan sakit, tidak adanya pekerjaan, dan minimnya pendapatan yang menyebabkan timbulnya masalah ekonomi. Lokasi bangunan yang sangat sempit dan saling berhimpit dengan jumlah penduduk yang banyak akan menyebabkan mudahnya terjadi gesekan atau bentrokan yang menimbulkan masalah sosial budaya.

Masalah selanjutnya yang mungkin ditimbulkan yaitu akumulasi masalah akibat dari masalah ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya yaitu timbulnya berbagai macam tindak kejahatan. Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembuangan air kotor/tinja dan sampah ke aliran sungai atau sembarang tempat.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah permukiman kumuh diantaranya dengan melakukan penataan permukiman melalui konsep Co-Housing (Collective Housing) yaitu konsep dimana satu atau lebih bangunan yang terdiri dari beberapa rumah, serta setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga dimana satu dengan lainnya akan memunculkan sense of belonging (perkim.id).

Salah satu jenis konsep Co-Housing yang sering digunakan tetapi biasanya menimbulkan keributan/bentrok adalah relocation atau pemindahan menuju lokasi baru. Seringkali penduduk yang direlokasi menolak dengan alasan mempertahankan pekerjaan lama, bersekolah di sekolah yang sama, harus menanggung beban tambahan waktu dan biaya perjalanan, dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Jenis program lainnya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya mengatasi masalah permukiman kumuh adalah Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku). Melalui “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, pemerintah pusat dituntut dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda) (kotaku.pu.go.id).

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan permukiman kumuh dengan konsep Waterfront City (WFC). Apa itu Waterfront City?

WFC adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai, ataupun danau. Konsep ini dapat dioperasionalkan jika memenuhi prasyarat dan pertimbangan tertentu. Terdapat 5 kriteria umum perancangan waterfront city di kawasan perkotaan, antara lain : (1) Berlokasi di tepi suatu wilayah perairan yang besar (sungai, danau, laut, dan sebagainya), (2) Biasanya merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, dan pariwisata, (3) Mempunyai fungsi utama sebagai tempat rekreasi permukiman, industri, dan pelabuhan, (4) Pemandangan berorientasi ke arah perairan, dan (5) Pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horizontal (Prabudiantoro, 1997).

Saat ini, WFC dengan jenis Residential Waterfront atau kawasan permukiman atau hunian di daerah tepian air telah banyak dikembangkan. Bentuk yang sudah ada biasanya adalah perumahan elite, apartemen alias hunian vertikal, hotel, resort, dan lain sebagainya. Contohnya

adalah perumahan mewah Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara yang berdekatan/berhadapan dengan laut.

Selain untuk perumahan elite, konsep waterfront city bisa juga diimplementasikan untuk permukiman kumuh. Bukan suatu hal yang mustahil tetapi justru akan lebih menguntungkan. Pertama, tidak perlu dilakukan relokasi penduduk sehingga permasalahan yang akan muncul akibat relokasi komunitas, pekerjaan, dan sekolah tidak akan terjadi karena tetap pada tempat yang sama. Kedua, pengembangan kawasan permukiman dapat dipadukan dengan pariwisata dan konservasi daerah tepian air dengan cara mempertahankan komponen-komponen lingkungan.

Keuntungan ketiga, konsep permukiman yang berorientasi menghadap ke perairan mengakibatkan penataan daerah permukiman akan terlihat rapi dan asri. Bentuk seperti ini sama seperti permukiman tepian sungai yang terdapat di Jepang. Keuntungan keempat atau yang terakhir dari penggunaan konsep waterfront city adalah berbagai permasalahan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang ditimbulkan dari permukiman kumuh dapat diminimalkan bahkan dapat diatasi. Kita berharap semoga pemerintah dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Masih Lemahkah Daya Beli Masyarakat Riau

Oleh : Agus Nuwibowo

OPINI TERBIT DI GORIAU.COM, 21 JANUARI 2021



Sudah hampir genap 1 tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga telah dilakukan diberbagai daerah, hal ini tentunya berimbas kepada menurunnya pendapatan masyarakat dan pada akhirnya menurunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari tingkat inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik. Pada awal Januari 2021, BPS merilis inflasi Desember 2020 sebesar 0,45 persen dan inflasi tahunan sebesar 1,68 persen. Secara series juga telah terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut yaitu bulan Juli, Agustus dan September. Bahkan selama periode Ramadhan dan Hari Raya yang biasanya terjadi inflasi yang tinggi, pada tahun 2020 inflasinya relatif rendah.

Bagaimanakah tingkat daya beli masyarakat Riau?

Awal tahun 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau merilis beberapa indikator-indikator sosial ekonomi Riau. Setidaknya ada 3 indikator yang dirilis BPS Provinsi Riau setiap bulannya dan dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi daya beli masyarakat Riau, yaitu Inflasi, Nilai tukar petani (NTP) dan ekspor impor.

Inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau pada bulan Desember 2020 sebesar 0,55 persen dengan inflasi tahunannya

sebesar 2,42 persen. Nilai tersebut cukup tinggi untuk dapat dikatakan bahwa daya beli masyarakat Riau masih rendah. Tetapi jika dilihat perbulannya selama tahun 2020, Riau sempat mengalami deflasi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu bulan Maret (- 0,01 persen), April (- 0,28 persen), Juli (- 0,24 persen) dan September (- 0,01).

Tidak semua deflasi menggambarkan penurunan daya beli masyarakat, namun jika kita amati kondisi bulan April dimana kita sedang dalam pelaksanaan ibadah Ramadhan, justru terjadi deflasi yang cukup dalam sehingga dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat pada bulan tersebut, walaupun pada akhirnya peningkatan daya beli masyarakat sudah mulai terlihat pada triwulan IV, hal ini dapat dilihat dari angka inflasi Riau bulan Oktober, November dan Desember.

Sejalan dengan hal tersebut, indikator lain yang dapat menggambarkan daya beli masyarakat adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani. NTP juga merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di daerah pedesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat daya beli petani.

NTP Provinsi Riau pada Desember 2020 adalah sebesar 130,34 mengalami kenaikan 2,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dilihat seriesnya, kenaikan NTP ini sudah berlangsung terus menerus sejak bulan Juli 2021. Ini menggambarkan bahwa peningkatan daya beli masyarakat Riau terutama di wilayah pedesaan telah berlangsung sejak bulan Juli 2020, artinya bahwa struktur ekonomi masyarakat dipedesaan lebih mampu dalam menghadapi terpaan Pandemi Covid ini. Pemberlakuan PSBB di beberapa daerah tidak terlalu mempengaruhi kegiatan ekonomi dipedesaan, terutama untuk lapangan usaha pertanian.

Pada awal Januari 2021, BPS Provinsi Riau juga merilis angka ekspor dan import untuk bulan November 2020. Terjadi peningkatan ekspor yang cukup tinggi pada bulan November 2020 ini. Nilai ekspor kita sebesar US\$ 1,43 miliar, atau terjadi peningkatan sebesar 8,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Memang tidak terkait secara langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat, tetapi peningkatan ekspor ini diharapkan turut mendorong pendapatan masyarakat yang akhirnya juga mendorong daya beli masyarakat juga. Peningkatan daya beli justru terlihat dari nilai impor Riau terutama impor untuk barang konsumsi yang mencapai US\$ 7, 87 juta atau meningkat sebesar 380,62 persen.

Pada akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat baik melalui peningkatan ekonomi masyarakat maupun bantuan langsung oleh pemerintah akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

Perdagangan Riau - Amerika Serikat

Oleh : Irfarial, SE

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 25 JANUARI 2021



Pada hari Rabu yang lalu, tanggal 20 Januari 2021 waktu setempat, Joe Biden resmi menjadi presiden Amerika Serikat (AS) ke-46. Biden dilantik di halaman Gedung Capitol setelah Kamala Harris terlebih dahulu dilantik sebagai wakil presiden. Biden yang kini berusia 78 tahun menggantikan Donald Trump, menjadi presiden AS yang tertua sepanjang sejarah. Terpilihnya Biden, menurut banyak pengamat akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berpendapat bahwa terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS akan menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia kedepannya. Biden akan membawa AS kembali mengikuti climate change dan Paris Agreement, yang disepakati tahun 2015, yang kemudian oleh presiden Trump keluar secara resmi tahun 2019. Disamping itu juga, Biden kembali akan mengutamakan perjanjian dagang multilateral. Sebelumnya, pada pemerintahan Donald Trump, perjanjian dagang lebih banyak secara bilateral. Karena multilateralisme itu menjanjikan sesuatu yang adil dan baik bagi pertumbuhan, terutama perjanjian dagang,” ujar Menteri Lutfi.

Kebijakan Biden tersebut, tentu akan direspon dengan seksama oleh berbagai kalangan pelaku usaha di Riau, terutama yang bergerak di bidang perdagangan luar negeri. Sebab perdagangan luar

negeri antara Provinsi Riau dengan AS sudah berlangsung sejak lama. Karena bagaimanapun kegiatan ekspor impor Riau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekspor impor Indonesia pada umumnya. Puluhan komoditas hasil bumi Riau baik migas maupun nonmigas setiap bulan masuk ke negara Paman Sam. Komoditas tersebut digolongkan berdasarkan kode harmonized system (HS), yaitu nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. Contohnya golongan lemak & minyak hewan/nabati berkode 15. Komoditas yang termasuk golongan lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) adalah CPO (Crude Palm Oil), PKO (Palm Kernel Oil), dan produksi lainnya dari buah sawit serta minyak dari kelapa (crude oil of coconut).

Dalam tujuh tahun terakhir, ekspor Riau ke AS rata-rata mencapai US\$ 1,10 miliar per tahun. Tentu ini nilai yang cukup besar bagi suatu perdagangan luar negeri. Namun meskipun beragam komoditas yang di ekspor ke AS, tetap saja total ekspor Riau ke AS masih kalah jauh jika dibanding dengan total ekspor Riau ke Tiongkok, India, Pakistan, Malaysia, bahkan ekspor Riau ke Belanda. Apalagi sejak Riau tidak lagi mengekspor migas ke AS, nilai ekspor Riau ke AS turun merosot tajam menjadi hanya US\$ 469,72 juta tahun 2019 dan US\$ 508,08 juta tahun 2020. Terakhir migas yang diekspor ke AS tahun 2018 lebih kurang sebesar US\$ 704,08 juta dengan

rincian lebih dari sembilan puluh persen berupa minyak mentah, sisanya berupa industri pengolahan hasil minyak.

Otomatis sekarang ekspor Riau ke AS hanya berupa sektor nonmigas. Sedangkan ekspor migas belum ada informasi hingga saat ini.

Komoditas nonmigas yang menjadi andalan ekspor Riau ke berbagai negara di dunia saat ini adalah komoditas golongan lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) termasuk ke AS. Komoditas ini berasal dari hasil pengolahan kelapa dan kelapa sawit. Tahun 2020 total ekspor lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) Provinsi Riau ke berbagai negara mencapai US\$ 8,30 miliar, meningkat sebesar 21,50 persen dibanding tahun 2019 meskipun wabah pandemi covid-19 menerjang perekonomian dunia.

Kalau dilihat tren ekspor lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) ke AS 2010-2020 cukup berfluktuatif. Nilai ekspor lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) Riau ke AS tahun 2010 baru sebesar US\$ 12,62 juta. Meningkat sedikit tahun 2011 menjadi US\$ 18,25 juta. Kemudian tahun 2012 tidak ada ekspor, namun tahun 2013 melejit menjadi sebesar US\$ 208,84 juta. Seterusnya hingga tahun 2020 berturut-turut US\$ 256,99 juta; US\$ 179,94 juta; US\$ 293,73 juta; US\$ 370,65 juta; US\$ 330,59 juta; US\$ 277,57 juta; dan terakhir tahun 2020 sebesar US\$ 378,92 juta. Ternyata tahun 2020 adalah ekspor lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) yang tertinggi ke AS selama 2010-2020 meskipun terjadi pandemi covid-19.

Akan tetapi jika dilihat dari proporsinya, ekspor lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) ke AS tahun 2020 hanya 4,57 persen dari total ekspor lemak

& minyak hewan/nabati (kode 15) Provinsi Riau tahun 2020. Bandingkan dengan ekspor lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) ke Tiongkok yang mencapai US\$ 834,34 juta (10,05 persen), atau ke India sebesar US\$ 1,54 miliar (18,60 persen), atau bahkan ke Spanyol yaitu sebesar US\$ 416,57 juta (5,02 persen), masih lebih tinggi dibanding ekspor ke AS. Dengan perbandingan tersebut terlihat bahwa ekspor lemak & minyak hewan/nabati (kode 15) ke AS belum optimal, dan masih terbuka lebar peluang untuk ditingkatkan.

Berikut komoditas andalan ekspor Riau terbesar kedua tahun 2020, yaitu golongan kertas dan karton (kode 48). Komoditas ini diproduksi oleh dua perusahaan besar industri pulp atau bubur kertas yang ada di Riau. Tahun 2020 total ekspor kertas dan karton (kode 48) Provinsi Riau ke berbagai negara mencapai US\$ 1,63 miliar. Namun menurun sebesar 69,27 persen dibanding tahun 2019 yang nilainya US\$ 5,31 miliar, mungkinkah ini pengaruh dari pandemi covid-19?

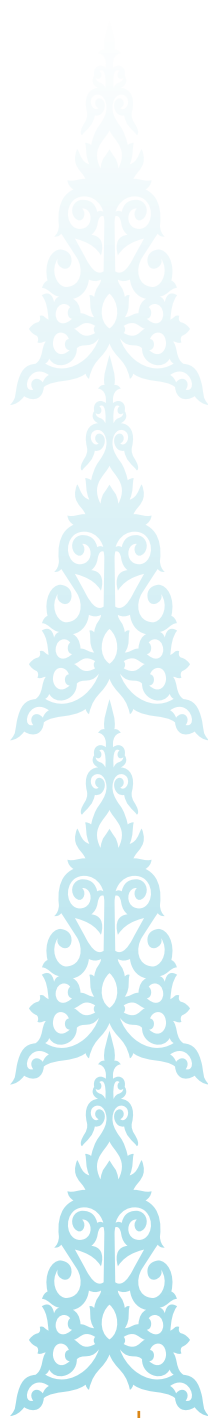
Tren ekspor kertas dan karton (kode 48) Riau ke AS 2010-2020 juga berfluktuatif. Nilai ekspor kertas dan karton (kode 48) Riau ke AS tahun 2010 mencapai US\$ 132,80 juta. Tahun 2011 menurun menjadi US\$ 84,52 juta. Kembali meningkat tahun 2012 menjadi US\$ 165,99 juta. Seterusnya hingga tahun 2020 berturut-turut US\$ 176,82 juta; US\$ 260,64 juta; US\$ 172,95 juta; US\$ 130,28 juta; US\$ 100,51 juta; US\$ 136,19 juta; US\$ 150,44 juta; dan terakhir tahun 2020 sebesar US\$ 103,24 juta. Ternyata nilai ekspor kertas dan karton (kode 48) Riau ke AS yang tertinggi baru sebesar US\$ 260,64 juta yang di ekspor pada tahun 2014.

Sementara secara proporsional, ekspor kertas dan karton (kode 48) Riau ke

AS tahun 2020 baru sekitar 6,33 persen dari total ekspor kertas dan karton (kode 48) Provinsi Riau tahun 2020. Artinya bahwa ekspor kertas dan karton (kode 48) ke AS belum optimal, dan masih terbuka lebar peluang untuk ditingkatkan.

Sebenarnya masih banyak komoditas ekspor nonmigas Riau yang bisa bersaing di pasar AS, seperti karet dan barang dari karet (kode 40), berbagai produk kimia (kode 38), mesin-mesin/pesawat mekanik (kode 84), ampas dan sisa industri makanan (kode 23), dan lain sebagainya yang terlalu panjang untuk diurai satu persatu.

Menurut para pengamat ekonomi, berhubung AS saat ini sedang dalam tahap pemulihan, Indonesia dapat bersegera melakukan semacam survei atau telaah pasar produk apa saja yang sedang dibutuhkan oleh konsumen AS, trennya ke arah mana. Kemudian terus berupaya meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki daya saing yang kuat. Memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan AS. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah berbagai insentif harus dipersiapkan oleh pemerintah agar kelak para investor dari AS tidak menemui hambatan yang berarti ketika akan menanamkan modalnya di tanah air. Kemenangan Biden ini, merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menggaet para investor dari AS dengan melakukan diversifikasi investasi, karena selama ini investasi AS di Indonesia sangat terbatas dan hanya pada sektor tertentu.



Menanti Kota Pekanbaru yang Bersih dan Asri

Oleh : Agus Nuwibowo

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 26 JANUARI 2021



Beberapa hari terakhir ini, media massa ramai membicarakan Permasalahan Sampah di Kota Pekanbaru. Tidak tepatnya sistem pengelolaan dianggap sebagai penyebab permasalahan itu, bahkan ada anggapan bahwa ada kepentingan dalam pengelolaan sampah tersebut. Permasalahan Sampah memang sering menjadi masalah di beberapa Kota Besar, terutama ibukota Provinsi. Padatnya penduduk dan belum adanya budaya pemisahan sampah yang seharusnya dilakukan mulai dari tingkat masyarakat terkecil, dianggap juga menjadi salah satu penyebabnya. Kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya juga pernah mengalami permasalahan tersebut.

Potensi Permasalahan ini sebenarnya sudah dapat diprediksi sebelumnya, dengan adanya rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, karena disinyalir hanya mampu menampung sampah 1 tahun lagi (GoRiau, 18 September 2020).

Tata kelola sampah sebenarnya bukan hanya bertumpu dengan pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi bagaimana mengelola sampah mulai dari rumah tangga/pasar/Kantor/tempat usaha, Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan dan sampai dipembuangan Akhir. Tidak selesai sampai disitu, bagaimana mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir

juga menjadi kunci keberhasilan tata kelola sampah sehingga sampah tidak hanya ditumpuk begitu saja, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yg lebih bermanfaat.

Hasil dari survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk modul Ketahanan Sosial tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya 18,7 persen masyarakat yang selalu atau sering membawa kantong belanja sendiri, 26,5 persen kadang-kadang membawa, sedangkan 54,8 persen tidak pernah membawa kantong belanja sendiri. Ini tentunya turut menambah sampah plastik yang digunakan sebagai kantong belanja. Selain itu survei juga menunjukkan hanya 1,2 persen masyarakat yang melakukan daur ulang sampah, sisanya 98,8 persen membuang/membakar sampahnya.

Data dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Pekanbaru mencapai 764,19 meter kubik atau sekitar 200 ton setiap harinya. Dengan demikian jika penduduk Pekanbaru sebanyak 983.356 jiwa (BPS, Sensus Penduduk 2020) maka setiap orang menghasilkan 0,2 kg sampah perharinya. Nilai ini sebenarnya jauh lebih rendah dari rata-rata produksi sampah di kota-kota besar, yang berkisar antara 0,5 - 0,8 Kg per Orang/hari. Jika dapat dikelola dengan baik, tentunya permasalahan sampah ini tidak akan terjadi.

Wajah Kota Pekanbaru akan dapat terlihat bersih jika pengelolaan sampah sampai ditingkat TPS berjalan dengan baik. Setidaknya ada 61 TPS di kota Pekanbaru yang menampung sementara sampah dari masyarakat sebelum diangkut ke TPA. Harus ada Petugas kebersihan yang bertanggungjawab mengumpulkan sampah sampai ke TPS, penjadwalan yang jelas, kapan membuang sampah dan kapan sampah akan diangkut, sehingga tidak menumpuk lama di TPS. Peran masyarakat dan Lembaga Pemerintah terkecil yang menguasai wilayah tersebut sangat diperlukan andilnya dalam mengelola sampah sampai di tingkat TPS dan memastikan sampah tidak menumpuk untuk waktu yang lama.

Kita tidak perlu malu meniru kota-kota besar yang sudah mampu mengelola timbulan sampah yang jumlahnya jauh lebih besar dari kita. Sebagai contoh, pengurangan sampah dapat dimulai dari sumbernya sampah merupakan tanggungjawab bersama, dan dapat di koordinasi melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW). Pemisahan sampah sudah dapat dilakukan disini. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi akses untuk mendapatkan angkutan pengangkut sampah yang dapat mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Disisi yang lain, Lembaga Pemerintahan terkecil atau Kelurahan, sebagai penguasa wilayah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di wilayahnya, mulai dari pengumpulan sampah, menyediakan TPS, sampai memastikan sampah terangkut.

Penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga tidak hanya ditumpuk secara terbuka (open dumping), tetapi setelahnya dilakukan pemadatan dan penimbunan (controlled landfill).

Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Lain untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti Kompos, Gas sampah sebagai bahan bakar, bahkan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang saat ini sudah ada yang beroperasi. Pengolahan sampah dengan teknologi ini juga dapat memperpanjang usia pemanfaatan TPA.

Pada akhirnya, kita berharap, pada momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati pada tanggal 21 Februari 2021 nanti, segala permasalahan sampah di Kota Pekanbaru dapat terselesaikan secara menyeluruh dan kita dapat memboyong piala adipura kembali.

Antara si “Putih”, Wanita, dan Lingkungan

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,MM

OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST, 31 JANUARI 2021



Tahukah kamu, jenis barang apakah yang erat kaitannya dengan wanita dan selalu dibutuhkan setiap bulan? Ya, barang tersebut adalah pembalut wanita sekali pakai. Barang yang identik dengan warna putih ini menjadi barang wajib yang selalu digunakan wanita saat mengalami menstruasi. Sebenarnya tidak hanya saat menstruasi tetapi juga digunakan saat setelah melahirkan atau kondisi-kondisi tertentu lainnya. Apa yang aneh dari pembalut wanita sekali pakai dan mengapa urgen untuk dibahas?

Di berbagai media banyak yang mengangkat permasalahan terkait pembalut wanita sekali pakai, mulai dari kandungan atau lapisan apa saja yang terdapat dalam pembalut, berita tentang pemuda mabuk atau nge-fly akibat air rebusan pembalut, hingga masalah aspek negatif dari sisi kesehatan. Tetapi ada juga masalah serius lainnya yang ditimbulkan akibat dari pembalut wanita, yaitu masalah lingkungan.

Dilansir dari liputan6.com (2019), Project Executive Waste4Change Pandu Priambodo mengatakan “kesulitan mendaur ulang sampah pembalut terletak pada beragamnya material yang digunakan dalam satu produk. Selain ada kertas, ada pula plastik dan sampah organik yang dihasilkan manusia di dalamnya”.

Karena alasan itulah sampah pembalut dikategorikan ke dalam limbah B3 atau residu.

Bentuk pembalut wanita sekali pakai terdiri dari beberapa jenis material. Mulai dari plastik yang digunakan sebagai pembungkus, kertas untuk menutupi perekat, lapisan kapas, dan juga gel yang digunakan untuk menyerap darah menstruasi. Selain material tersebut, juga mengandung zat-zat kimia seperti Klorin yang digunakan pada proses bleaching dan Dioxin yang digunakan untuk menyerap darah.

Tidak hanya kedua zat kimia itu saja, tetapi juga mengandung zat kimia lainnya seperti Styrene yang dapat menyebabkan kanker, Chloromethane yang dapat menyebabkan gangguan syaraf dan reproduksi, Acetone yang menyebabkan iritasi, serta Chloroethane yang bisa menyebabkan kanker dan gangguan otot (lifestyle.bisnis.com). Kesemuai zat-zat kimia tersebut dapat membahayakan si pengguna.

Selain dari zat yang dikandungnya, sampah pembalut juga mengkhawatirkan dari sisi jumlah. Setiap hari begitu banyak sampah pembalut yang dihasilkan. Jika kita simulasikan bahwa masa menstruasi wanita 4-7 hari dengan jumlah pembalut yang digunakan rata-rata perhari adalah

2-4 pembalut, maka sampah pembalut yang dihasilkan setiap bulan oleh satu wanita adalah 8-28 buah dan dalam satu tahun setiap wanita menghasilkan sampah pembalut sebanyak 96-336 buah.

Diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah perempuan usia produktif Indonesia (15-49 tahun) di tahun 2019 sebanyak 72,10 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut maka jumlah sampah pembalut yang dihasilkan selama tahun 2019 adalah sebanyak 6,9-24,2 milyar pembalut. Jika kita bagi dengan 365 hari maka sampah pembalut yang dihasilkan perhari di Indonesia sebanyak 18,9-66,3 juta pembalut. Sangat banyak bukan? Padahal sampah pembalut adalah termasuk sampah yang sulit terurai dan juga sulit diolah.

Masa urai yang dibutuhkan oleh pembalut jauh lebih lama dibandingkan popok. Popok sekali pakai diperkirakan akan terurai dalam waktu 250-500 tahun sedangkan masa urai pembalut adalah 500-800 tahun (tirto.id). Akibat waktu urai yang lama dan belum dapat diolah maka sampah pembalut yang berada di tempat pembuangan akhir (TPA) akan menumpuk dan berpotensi menimbulkan penyakit serta bau tidak sedap.

Selain sulit terurai, karena sifatnya yang menyerap air membuat sampah ini menjadi mengembang dan dapat menyumbat saluran air serta dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan mencemari lautan. Pun jika dibakar maka akan menghasilkan karbondioksida yang jika terhirup dapat membahayakan tubuh manusia.

Karena sampah pembalut termasuk jenis limbah B3 berbahaya, untuk itu perlu penanganan khusus dalam mengolah

sampah B3 tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode fisik yaitu mengubah dengan cara memadatkan dan digunakan sebagai bahan pembuatan batako.

Walaupun dapat diolah, tetapi mengingat jumlah yang dihasilkan sampah pembalut setiap harinya sangat besar maka cara yang efektif adalah dengan mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai dan mulai beralih menggunakan pembalut konvensional yang terbuat dari bahan kain. Pembalut jenis ini digunakan oleh para orang tua terdahulu karena dianggap lebih aman dan mengandung banyak keuntungan.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pembalut kain yaitu mudah karena sudah tersedia di rumah dan tidak perlu mencari ke toko setiap menstruasi. Keuntungan lainnya dari sisi ekonomi sangat murah, karena cukup dengan membuat atau sekali beli maka dapat digunakan untuk jangka waktu lama. Jika saja dalam satu bulan menghabiskan biaya kurang lebih sebesar 20 ribu rupiah maka dalam satu tahun dapat menghemat sebesar 240 ribu rupiah dan dalam 35 tahun atau sepanjang masa tahun menstruasi dapat menghemat uang sebanyak 8,4 juta rupiah.

Jika keuntungan dilihat dari sisi kesehatan, penggunaan pembalut kain cukup aman karena tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya dan karena dapat dibersihkan maka dapat digunakan kembali berkali-kali. Keuntungan lainnya yang tidak kalah penting adalah dapat melindungi lingkungan dari sampah berbahaya.

Pemerintah pun dapat turut andil dalam mengurangi sampah pembalut. Salah

satu cara adalah dengan memberlakukan nilai atau harga yang tinggi untuk pembalut wanita. Dengan harapan harga yang tinggi dapat membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membeli dan mulai mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai. Selain itu, harga tinggi juga digunakan sebagai bentuk kompensasi untuk menjaga kelestarian lingkungan bukan untuk keuntungan perusahaan.

Upaya terpenting lainnya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi para wanita akan bahaya yang ditimbulkan dari pembalut sekali pakai serta keuntungan dari penggunaan pembalut kain. Selain itu juga dibutuhkan edukasi kepada para remaja baik dilakukan oleh para ibu sebagai orang tua di rumah serta keluarga maupun dari pihak sekolah. Keterlibatan kaum lelaki untuk mengingatkan bahaya pembalut juga bukan hal aneh karena menjaga kelestarian lingkungan merupakan tugas semua orang tanpa terkecuali.

Bukan hal yang mustahil untuk mengurangi bahkan menghilangkan sampah pembalut dan lingkungan kita bisa terbebas dari sampah pembalut. Semoga.

Sampah di Indonesia: Bom Waktu yang Siap Meledak

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST, 31 JANUARI 2021



Masalah sampah selalu menjadi isu yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini. Bagaimana tidak, jumlah sampah di Indonesia semakin lama semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Studi yang dirilis oleh Mckinsey and Co. dan Ocean Conservancy, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbanyak kedua di dunia setelah China. Keadaan ini semakin diperburuk dengan ketidakmampuan negara kita dalam melakukan pengelolaan sampah dan limbah.

Lima belas tahun yang lalu, masalah sampah di negeri ini menjadi sebuah tragedi yang tak lekang dalam ingatan. Bermula dari masalah sampah yang menggunung di salah satu daerah yang kemudian longsor dan menimbun puluhan rumah penduduk hingga memakan ratusan korban jiwa. Tragedi naas ini berhasil membuka mata pemerintah dan masyarakat Indonesia tentang pentingnya manajemen pengelolaan sampah yang baik di negeri kita. Namun seiring waktu berlalu, masalah ini sepertinya terlupakan dan kembali terabaikan, hingga kita kembali dikejutkan dengan berita penemuan sampah seberat 5,9 kilogram di perut paus sperma yang mati

di perairan Wakatobi -Sulawesi Tenggara-beberapa waktu lalu. Berita yang kembali membuat kita tersadar bahwa Indonesia benar-benar dalam kondisi darurat sampah.

Diperlukan Ketegasan Hukum

Masalah sampah sebenarnya sudah menjadi masalah yang krusial untuk segera diselesaikan sejak dulu, namun sepertinya baru mulai mendapat perhatian beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah membuat Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, dimana pada tahun 2025 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan sampah akan berkurang sebesar 30 persen dan masalah sampah tertangani sebesar 70 persen. Sebuah target yang dirasa sangat sulit untuk dicapai namun tidak menjadi mustahil untuk diwujudkan.

Adapun langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan target tersebut adalah dengan melakukan tiga pendekatan, yakni pendekatan minim sampah dengan melakukan pembatasan dan pengurangan sampah plastik, pendekatan sirkular ekonomi dengan melakukan daur ulang kemasan, dan pendekatan teknologi dari pengolahan sampah itu sendiri. Program tersebut sudah selayaknya diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu.

Pada kenyataannya, banyak masyarakat kita yang belum bisa menghilangkan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Masih sering kita temui di beberapa tempat, sampah menggunung di bahu jalan dan parit. Meskipun sudah dipasang plang larangan membuang sampah di lokasi tersebut, namun tumpukan sampah masih terus menggunung bahkan nyaris menutupi badan jalan. Kondisi seperti ini sering kita temui terutama di kota-kota besar.

Upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap slogan yang berlalu begitu saja. Perlu ada ketegasan hukum dalam hal ini yakni dengan menerapkan sanksi kepada pelaku praktek pembuangan sampah sembarangan. Sebenarnya ancaman sanksi administrasi dan pidana telah tertuang dalam Undang-Undang tentang pengelolaan sampah, namun sayangnya belum benar-benar ditegakkan di negara ini.

Belajar Mengelola Sampah dari Singapura

Jika kita melakukan perjalanan ke negeri tetangga Singapura, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan kota nya yang bersih dan nyaris bebas sampah. Tidak akan kita temukan tumpukan sampah yang menggunung di sana seperti halnya di negara kita. Maka sudah selayaknya kita belajar dari kota singa tersebut. Jika kita mempelajari cara negara tersebut mengelola sampah, setidaknya ada tiga hal yang menjadi poin pentingnya.

Pertama, proses pengelolaan sampah melibatkan pihak pemerintah dan swasta. Ada badan khusus (bukan lembaga

resmi pemerintah) di negara tersebut bernama NEA (National Environment Agency) yang menangani masalah sampah. Selanjutnya NEA bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta sebagai pelaksana atau operator di lapangan. Perusahaan yang ingin menjadi operator dipilih melalui sistem bidding atau lelang. Ini tentunya menjadi peluang usaha tersendiri dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Kedua, adanya regulasi yang jelas dan tertulis terutama dengan perusahaan-perusahaan besar, karena tidak dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan besar merupakan salah satu produsen limbah. Aturan tersebut lantas dituangkan dalam sebuah perjanjian yang diberi nama Singapore Packaging Agreement. Sebuah perjanjian dengan perusahaan agar turut mendukung program daur ulang. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menekan penggunaan material yang tidak dapat didaur ulang, serta mengutamakan penggunaan material hasil daur ulang sebagai bahan baku mereka.

Ketiga, manajemen pengelolaan sampah yang baik. Sampah yang tidak dapat didaur ulang justru diolah menjadi sumber energilistrik. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan uap hasil pembakaran sampah yang tidak dapat didaur ulang tersebut. Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Abu dari sisa pembakaran tersebut lantas diangkut menuju suatu tempat yang telah dipersiapkan sebagai tempat pembuangan akhir. Jika kita ingin meniru sistem pengelolaan sampah dari negara Singapura, maka tiga hal tersebut merupakan langkah yang dapat ditempuh.

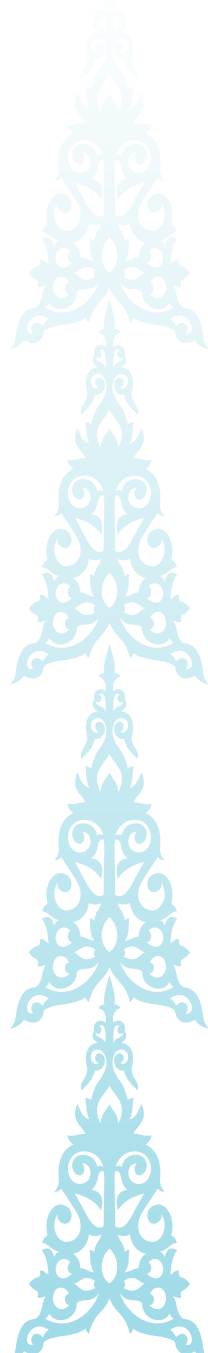
Surabaya Sebagai Kota Percontohan

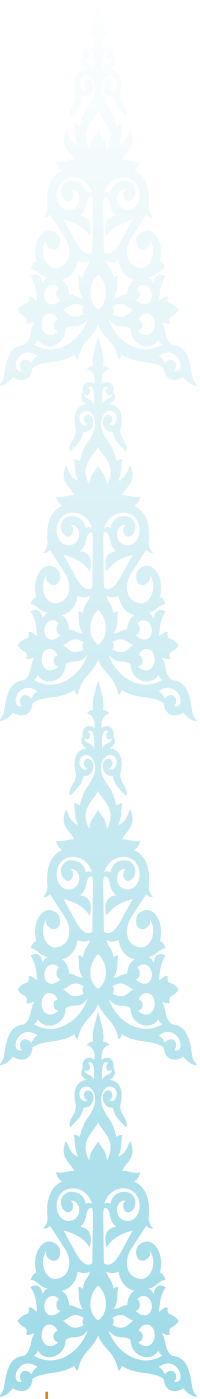
Di Indonesia, Kota Surabaya menjadi kota percontohan pengolahan sampah terbaik. Kota ini dinilai mampu mengelola sampah dengan baik melalui program 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Indikator kesuksesan dalam melakukan pengelolaan sampah tersebut adalah kemampuan mengubah sampah dari sesuatu yang tidak bernilai guna menjadi sesuatu yang bernilai rupiah, yakni dengan adanya bank sampah dan rumah kompos. Pemerintah Kota Surabaya juga telah berhasil menggugah kesadaran masyarakatnya untuk lebih peduli dengan lingkungan. Upaya ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2005 lalu. Pengelolaan sampah secara besar-besaran dilakukan dengan melibatkan seluruh warga Kota Surabaya.

Sebagaimana Singapura yang memanfaatkan sampah untuk membangkitkan energi listrik, kota pahlawan ini pun mengadopsi sistem yang serupa. Sampah dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). PLTS dengan bahan bakar sampah ini telah mampu memproduksi listrik sebesar 2 mega watt. Beberapa tahun ke depan, Pemerintah Kota Surabaya berencana menambah kapasitas produksi PLTS.

Berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini sudah selayaknya ditiru dan dijadikan role model bagi kota-kota lain di Indonesia. Persoalan sampah hendaknya tidak dipandang sebelah mata, namun benar-benar harus menjadi bagian dari program prioritas pembangunan. Jika tidak, maka bersiaplah kita akan menghadapi masalah besar yang bermula dari sampah.

Tentu kita juga tidak ingin tragedi kemanusiaan kembali terjadi di negeri kita karena pengelolaan sampah yang tidak baik. Namun demikian, keberhasilan Kota Surabaya dalam mengelola sampah memberikan harapan besar dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara bebas sampah.





<https://riau.bps.go.id>

Milenial di Era Bonus Demografi

Oleh : Rika Wahyuni, SST,MM
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 1 FEBRUARI 2021



Milenial di Era Bonus Demografi

Pembangunan Riau tentu tidak terlepas dari peran generasi muda. Generasi muda yang saat ini lebih dikenal dengan istilah generasi milenial adalah generasi yang kesehariannya sangat erat dengan dunia digital atau penggunaan teknologi informasi. Meningkatkan pemanfaatan internet terutama media sosial di beberapa tahun terakhir berdampak pada munculnya tokoh-tokoh baru ataupun miliarder muda dunia seperti Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook dan Lary Page yang merupakan salah satu pendiri google. Hal ini semakin menguatkan pendapat sebagian masyarakat bahwa saat ini adalah “masanya” generasi milenial. Pertanyaannya apakah generasi Milenial di Riau mampu menjadi salah satu bagian dari mereka?

Saat ini Indonesia berada pada momentum emas yang disebut dengan Bonus Demografi. Jika potensi ini mampu dikelola dengan baik maka ini akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu Negara Maju. Pada Tahun 2020 Indonesia sudah masuk pada fase awal Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif yaitu umur 15 sampai dengan 64 tahun lebih banyak dari pada penduduk usia non-produktif yaitu umur yang bisa dikatakan masih sangat muda dan sudah tua. Menurut BPS, bonus

demografi diperkirakan akan berlangsung selama tahun 2020-2035. Angka ini akan berlangsung cepat pada tahun-tahun setelah tahun 2030, hal ini disebabkan bertambahnya penduduk lansia akibat makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia semakin tinggi tingkat kesejahteraan mereka. Jumlah angkatan kerja yang berlimpah seharusnya dapat digunakan sebagai sumber daya untuk memacu perekonomian dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saingnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah, dengan demikian diharapkan dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi. Ketersediaan sumber daya manusia produktif yang melimpah ini tentu juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan.

Berdasarkan hasil pendataan Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Riau adalah sebanyak 6,39 juta jiwa. Hasil SP2020 juga mencatat mayoritas penduduk Provinsi Riau didominasi oleh Generasi Z atau yang lahir tahun antara Tahun 1997 sampai Tahun 2012. dan Generasi Milenial atau yang lahir antara Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1996. Proporsi jumlah penduduk Generasi Z adalah sebesar 30,79 persen atau sebanyak 1,94 juta jiwa, sementara itu Generasi Milenial adalah sebesar 27,24 persen atau sebanyak 1,72 juta jiwa. Kedua generasi ini masuk ke dalam usia produktif yang tentu saja dapat menjadi salah satu modal untuk

memacu percepatan ekonomi Provinsi Riau.

Kita bisa belajar dari Negara yang telah mengalami fase bonus demografi seperti China dan Korea Selatan yang dinilai berhasil dalam memanfaatkan era bonus demografi ini. China mampu menciptakan industri rumah tangga yang memproduksi berbagai komponen-komponen peralatan elektronika sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas di negeri tirai bambu. Sedangkan Korea Selatan berhasil mengarahkan industri-industri rumah tangganya untuk membuat komponen telepon genggam (handphone). Hasilnya, saat ini China dan Korea Selatan menjelma menjadi raksasa industri dunia.

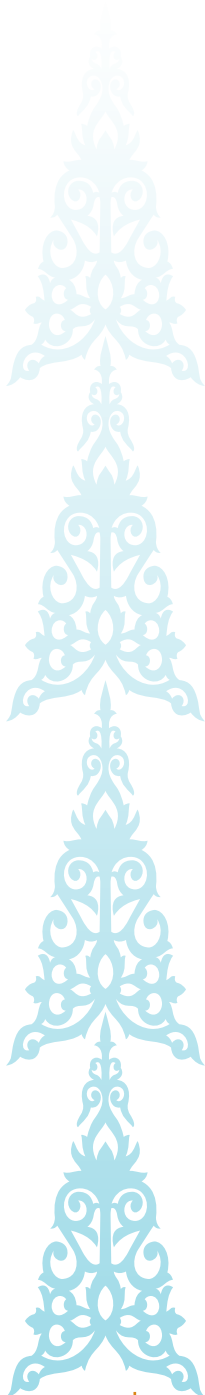
Dilihat dari struktur PDRB, perekonomian Provinsi Riau masih ditopang oleh Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Pertambangan, sementara sektor perdagangan dan jasa lainnya masih terkonsentrasi di Ibu Kota Provinsi, Pekanbaru. Sementara itu, dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja adalah sebanyak 3,15 juta, dimana sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian yaitu sebesar 37,88 persen, disusul perdagangan sebesar 17,99 persen dan industri sebesar 7,73 persen, sedangkan untuk sektor lainnya hanya berkisar pada angka kurang dari 7 persen. Jika dicermati lebih dalam, penyerapan tenaga kerja di Riau berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama ke bawah yaitu sebesar 50,49 persen yang artinya tenaga kerja di Riau masih minim keterampilan dan kompetensi yang bersaing.

Belum meratanya pembangunan daerah, diduga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kualitas angkatan kerja di Provinsi Riau. Sarana dan prasarana yang belum mendukung terutama perangkat teknologi informasi, ditambah dengan kualitas tenaga pendidik yang belum mumpuni memperparah kondisi tersebut. Pembangunan infrastruktur yang memadai di bidang Teknologi Informasi adalah hal penting pada masa transformasi digital saat ini. Pemenuhan kebutuhan sistem pendidikan yang sangat bergantung dengan teknologi perlu menjadi fokus Pemerintah Daerah. Dengan demikian penduduk usia produktif yang dihasilkan mampu bersaing secara individu, sehingga dapat memajukan perekonomian Riau. Selain itu, Pemerintah juga perlu memperluas lapangan usaha, tidak hanya fokus pada sektor-sektor andalan seperti pertanian, perkebunan dan industri pengolahan, tetapi perlu memberi ruang pada sektor industri kreatif yang sedang berkembang saat ini seperti sektor kuliner, kriya, dan fashion agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya.

Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau akan membangun gedung Sentra Kreatif sebagai wadah promosi ekonomi kreatif di Riau dengan nama "Riau Creative Hub". Hal ini tentu menjadi angin segar bagi milenial pelaku industri kreatif. Dukungan pemerintah dalam publisitas dan pemasaran memiliki peranan penting, dengan ini produk yang dihasilkan usaha kreatif di Riau dapat dikenal secara luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pengembangan ekonomi kreatif juga sangat diperlukan. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan peran generasi

milennial dalam pembangunan daerah di Provinsi Riau pada era Bonus Demografi.

<https://riau.bps.go.id>



Agar Nasib Petani Semanis Tebu

Oleh : Arni Juwita Novisda, SST
OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST, 3 FEBRUARI 2023



Meminum segelas air tebu dapat memberikan kesegaran dan kesehatan bagi tubuh. Minuman manis dan segar hasil olahan alami dari tanaman tebu ini mempunyai kandungan antioksidan yang disebut polifenol, senyawa yang bermanfaat untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas maupun racun yang berasal dari lingkungan. Di masa pandemi covid-19 pun, kita masih bisa menemukan penjual air tebu di pinggir jalan, menandakan usaha ini memberikan keuntungan dan masih memiliki banyak peminatnya.

Sebagaimana kita ketahui, tebu merupakan tanaman perkebunan esensial Indonesia yang ditanam untuk dijadikan bahan baku pembuatan gula dan vetsin. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di daerah dengan iklim tropis seperti Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan kawasan Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan tebu. Lalu bagaimanakah prospek budidaya tebu di Indonesia?

Gula dan tanaman tebu tentu sangat erat kaitannya. Pembuatan gula pun melalui serangkaian proses di pabrik, hal ini menuntut petani perlu kerja keras dalam mengolah tebu agar menghasilkan gula yang berkualitas. Dari data BPS, perkembangan ekspor gula Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan sekitar 53,90 persen per tahun. Total volume ekspor gula sebesar

814 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,27 juta tahun 2015 lalu meningkat tahun 2019 menjadi 3,51 ribu ton dengan nilai sebesar US\$ 2,9 juta. Namun demikian, hanya sebagian kecil gula yang diekspor Indonesia ke manca negara. Karena produksi gula Indonesia sebagian besar untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Meski demikian, ekspor gula mampu menyumbangkan penerimaan negara dari sektor non migas.

Bibit tebu berasal dari batang tebu dengan 2-3 mata tunas yang belum tumbuh yang disebut bagal. Selain bibit bagal, dikenal juga bibit tebu yang berasal dari satu mata tunas yaitu mata ruas tunggal dan mata tunas tunggal. Pemakaian mata tunas sebagai bahan tanam dapat meningkatkan produktivitas tebu karena dapat menghasilkan jumlah anakan per tanaman yang lebih banyak dibandingkan dengan bibit bagal. Anakan tebu merupakan variabel yang penting dalam usaha peningkatan produktivitas tebu. Produktivitas tebu per satuan lahan ditentukan oleh kemampuan tanaman membentuk anakan. Semakin banyak anakan tebu yang terbentuk, maka hasil tebu akan semakin melimpah. Anakan tebu terbentuk di sekeliling batang utama tebu. Batang utama tebu dan anakan inilah yang nanti dijadikan sebagai tebu giling.

Masalah Berkebun dan Budidaya Tebu

Terdapat beragam masalah

perkebunan dan budidaya tebu yang dihadapi petani Indonesia. Diantaranya, ada petani mengeluhkan harga tebu saat musim panen yang sangat rendah (sekitar Rp180 per kilogram). Kondisi seperti ini akan mengurangi minat para petani untuk menanam tebu dan beralih ke tanaman lain. Petani mengalami kesulitan memperoleh bibit tebu karena bibit tanaman dari pemasok sering terlambat, sedangkan menurut beberapa pengakuan petani tebu masih belum bisa membudidayakan bibit sendiri. Lebih jauh lagi, mekanisme pembayaran hasil panen tebu oleh pabrik gula dinilai memberatkan para petani tebu. Miris rasanya dengan realita yang terjadi dimana pabrik gula melakukan pembayaran ke petani tebu dengan cara diangsur beberapa kali. Padahal pabrik gula seharusnya mampu membayarnya secara lunas.

Di sisi lain kebutuhan gula semakin meningkat, hal ini berdampak pada tanaman tebu yang mesti harus ditingkatkan produksinya. Maka kebutuhan akan gula di dalam negeri masih harus di tambah dengan impor pada waktu tertentu. Dilansir dari pernyataan Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, gula impor yang didatangkan demi menutupi pasokan yang kurang di dalam negeri kian lama membuat industri dalam negeri kewalahan dan banyak yang bangkrut. Petani tebu terkena imbasnya juga, petani malas menanam tebu karena harganya menjadi murah.

Dalam teknik budidaya belum banyak yang berubah, hal ini mengindikasikan rendahnya kinerja produksi tebu Indonesia. Petani enggan menerapkan inovasi teknologi sesuai anjuran karena penetapan rendemen yang sama. Selain itu, terjadinya kekurangan

stok bahan baku tebu pada pabrik gula disebabkan karena budidaya tebu kurang menguntungkan dibandingkan dengan budidaya tanaman penting lainnya. Karena rata-rata produktivitas yang rendah, disamping budidaya tebu harus menunggu satu tahun untuk bisa panen.

Menghadapi beraneka masalah bagi petani tebu, menurut saya sebenarnya prospek budidaya tebu Indonesia sangat strategis dan berpotensi untuk dikembangkan. Apalagi animo petani masih tinggi untuk menanam tebu meski para petani masih ragu karena ketidakjelasan prospek ke depannya. Indonesia pernah sukses menjadi produsen gula terbesar di dunia. Industri gula Indonesia telah menjadi industri tertua dan unggul sejak zaman kolonialisme. Pulau Jawa menjadi salah satu penghasil gula terbesar di dunia dan sebagai pengeksport gula terbesar kedua setelah Kuba. Pabrik gula Indonesia pernah bisa menghasilkan hingga 3 juta ton per tahun dengan luas areal lahan tebu sebesar 200.000 hektare di tahun 1930. Kondisi ini berbanding terbalik dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Berdasarkan data BPS, luas lahan tebu pada tahun 2018 sekitar 415.66 hektare. Namun produksi gulanya malah turun. Produksi gula nasional pada tahun 2018 mencapai 2,17 juta ton. Sedangkan di tahun 2019, luas lahan tebu mencapai 413.05 hektare dengan produksi gula sebesar 2,23 juta ton.

Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Swasembada Budidaya Tebu

Tebu termasuk salah satu komoditas yang menyumbang pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia dan sumber mata pencaharian bagi jutaan petani Indonesia. Pemilihan tanaman tebu sebagai salah satu komoditas yang

mempunyai nilai ekonomis diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan petani.

Perlu perhatian dan dukungan pemerintah dalam upaya mewujudkan keberhasilan prospek budidaya tebu, pemberian subsidi pupuk dan peralatan petani diharapkan membantu dalam proses pembudidayaan tebu. Menciptakan jalinan kerjasama antara petani tebu dengan pihak perusahaan terkait dalam hal program kemitraan dengan pemberian bantuan dana untuk meningkatkan produktivitas tebu dan menggarap lahan yang ada. Hal penting lagi, pendapatan dari harga jual tebu harus tinggi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar dapat memberikan keuntungan pada petani tebu .

Selain itu, pemerintah dibawah kabinet kerja yang dipimpin oleh bapak presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kembali swasembada gula, maka Indonesia harus mampu memproduksi sekitar 2,8 juta ton gula konsumsi. Adapun strategi yang dilakukan, melakukan ekstensifikasi perkebunan tebu di daerah-daerah potensial untuk perkebunan tebu setidaknya harus menambah lahan untuk budidaya tebu, membangun 10 pabrik gula baru untuk mendongkrak produksi gula nasional dan menyediakan bibit tebu unggul untuk memenuhi kebutuhan bibit kepada para petani tebu Indonesia.

Melalui berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan prospek swasembada tebu Indonesia. Diharapkan dari segi produktivitas tebu akan meningkat dengan menghasilkan produksi gula yang banyak serta berkualitas dan bisa untuk diekspor ke berbagai negara. Berharap dan yakin, bersama kita mampu mewujudkan prospek swasembada tebu Indonesia. Mengingat

banyaknya manfaat tebu bagi kehidupan sehari-hari dan tentunya akan memberikan peluang bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan, sehingga petani dan masyarakat Indonesia dapat merasakan manisnya berkebun dan membudidayakan tanaman tebu.

Milenial Riau, Antara Kenyataan dan Harapan

Oleh : Dessy Syukriya Aryati, SST

OPINI TERBIT DI [HTTPS://THECOLUMNIST.ID](https://thecolumnist.id) , 14 FEBRUARI 2021



Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebanyak 6,39 juta jiwa. Menurut kelompok umur, penduduk Riau didominasi oleh generasi milenial dengan jumlah mencapai 1,74 juta jiwa atau 27,24 persen.

Hasil Survei Angkatan Kerja (Sakernas) pada Februari 2020 juga menunjukkan bahwa penduduk bekerja di Riau didominasi oleh generasi milenial yang mencapai 1,29 juta orang. Dominasi generasi milenial ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi di Riau. Namun, pada kenyataannya generasi milenial ini juga menyumbang pengangguran terbanyak di Riau. Diperlukan strategi agar generasi milenial yang enerjik dan paham teknologi ini mampu terserap di pasar tenaga kerja dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang maksimal, khususnya bagi Riau.

Generasi Milenial adalah penduduk yang lahir pada tahun 1981-1996. Usia mereka saat ini berada pada rentang 25 hingga 39 tahun. Generasi milenial mempunyai banyak kelebihan. Pertama, sebuah laporan penelitian oleh Ericson menyebutkan bahwa teknologi saat ini mengikuti gaya hidup generasi milenial. Tidak heran generasi ini lebih tech-savvy dibandingkan generasi sebelumnya. Smartphone, tablet atau laptop menjadi

bagian dari keseharian milenial. Gadget banyak membantu milenial untuk lebih banyak melakukan hal produktif, seperti mencari informasi, menemukan ide, mengikuti online course ataupun berkomunikasi dengan kolega.

Kedua, generasi milenial sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Di era digital saat ini, segala sesuatu berubah dengan cepat. Generasi milenial dianggap lebih fleksibel menghadapi perubahan tersebut.

Ketiga, dan yang paling menonjol dari generasi milenial adalah bekerja bukan hanya untuk uang. Tapi juga untuk pengalaman. Generasi ini lebih menghargai kerja tim yang solid. Kepuasan tidak lagi dari memperoleh uang, tapi juga dengan mengeksplor tempat baru untuk pengalaman baru. Lebih senang menikmati liburan daripada membeli barang tersier.

Namun, generasi milenial juga bukan tanpa tantangan. Berbeda dengan generasi Z yang umumnya masih menjadi tanggungan orang tua, generasi milenial punya tanggung jawab lebih. Pada umumnya, generasi milenial saat ini sudah menikah. Tantangan generasi milenial saat ini adalah untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan, misalnya tempat tinggal.

Selain menanggung biaya hidup sendiri dan generasi setelahnya (anak), umumnya generasi milenial juga menanggung beban keuangan generasi sebelumnya (orang tua). Kondisi milenial ini hits dengan sebutan sandwich generation. Generasi ini terhimpit tanggungan finansial antara tiga generasi, yaitu diri sendiri dan pasangan, anak, serta orang tua. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menggambarkan hal ini. Faktanya rasio ketergantungan di Riau semakin menurun.

Pada tahun 2010, rasio ketergantungan sebesar 55,50. Rasio ini tercatat menurun menjadi 43,03 persen pada tahun 2020. Artinya, dari 100 orang penduduk yang berusia kerja (dianggap produktif), mereka menanggung ekonomi 43 orang usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Namun, rasio ini merupakan gambaran kasar. Karena walaupun rasio ketergantungan mengecil dibandingkan 10 tahun yang lalu, namun biaya hidup yang dikeluarkan menjadi lebih besar dibanding tahun 2010. Pada generasi ini, bekerja adalah cara untuk mampu memenuhi tuntutan finansial.

Dengan adanya tuntutan seperti itu, ternyata jumlah pengangguran terbanyak juga berasal dari kelompok usia milenial. Masih dari hasil Sakernas, jumlah pengangguran penduduk milenial di Riau pada Februari 2020 tercatat sebesar 44,76 ribu jiwa. Jika dipecah menurut golongan umur angkatan kerja, generasi milenial dapat dipecah menjadi 3 golongan, yaitu 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan 35-39 tahun. Pengangguran tertinggi generasi milenial di Riau terdapat pada golongan umur 25-29 tahun, yaitu sebanyak 25,87 ribu pencari kerja. Selama 2018-2020, pengangguran di kelompok umur milenial usia 25-29 tahun ini merupakan yang paling banyak

dibandingkan dua kelompok umur milenial lainnya.

Untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan terakhir turut mempengaruhi keberhasilan. Faktanya, terdapat perbedaan yang cukup besar antara tingkat pendidikan milenial di perkotaan dengan di pedesaan. Generasi milenial Riau di pedesaan didominasi oleh yang tidak tamat sekolah dasar (18,87 persen). Sementara untuk generasi milenial di perkotaan, didominasi oleh milenial dengan pendidikan terakhir SLTA (13,77 persen). Menurut status pekerjaannya, sebesar 51,33 persen penduduk milenial yang bekerja di Riau, memiliki status pekerjaan sebagai buruh atau karyawan.

Secara rata-rata, umumnya jumlah angkatan kerja milenial sebesar 40 persen dari jumlah angkatan kerja usia 15-60+ tahun pada periode 2018 hingga 2020. Dengan jumlah pengangguran usia milenial rata-rata sebesar 3-5 persen terhadap angkatan kerja usia milenial, maka setidaknya pemerintah perlu menyiapkan penambahan lapangan kerja minimal sebesar 5 persen setiap tahunnya.

Jumlah pengangguran milenial di Riau perlu mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini karena generasi milenial merupakan generasi yang sudah cakap teknologi. Penggunaan internet pada generasi milenial bukanlah masalah. Hal ini karena penggunaan internet di Riau, terutama di wilayah perkotaan, meningkat pesat beberapa tahun terakhir.

Baru-baru ini lokadata.id menobatkan ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru sebagai satu dari delapan kota yang paling potensial dalam pengembangan bisnis teknologi komunikasi dan informasi

alias information and communication technology (ICT) di Indonesia. Ini bukan tanpa alasan. Alasan pertama adalah bahwa dalam kurun sembilan tahun terakhir, ekonomi Kota Pekanbaru tumbuh di atas rata-rata nasional. Kedua, kategori Informasi dan Komunikasi di Kota Pekanbaru tumbuh di atas rata-rata nasional. Dan yang ketiga, walaupun kategori ini tumbuh di atas rata-rata nasional, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih dibawah 3,4 persen. Artinya, penciptaan lapangan kerja oleh milenial di kategori Informasi dan Komunikasi, terutama di Kota Pekanbaru masih sangat terbuka lebar.

Jika ditelaah lebih jauh, milenial saat ini mempunyai karakter yang tidak ingin dibatasi, mereka fleksibel terhadap perubahan, dan menyukai suasana kerja yang kolaboratif. Kondisi seperti ini diyakini bisa membuat milenial mampu berkembang baik secara personal maupun profesional.

Hasil Survei Milenial Deloitte Indonesia 2019: Bekerja Karena Alasan Status, menyimpulkan bahwa sebanyak 52 persen karyawan milenial menginginkan fleksibilitas waktudalamjamkerja. Sebanyak 70 persen dari mereka mengharapkan perusahaan juga memfasilitasi karyawan untuk belajar hal-hal baru. Kemudian 59 persen karyawan milenial berharap kemudahan komunikasi termasuk penggunaan aplikasi yang mendukung komunikasi dalam bekerja. Suasana ini sangat cocok dengan perusahaan rintisan (startup). Perusahaan startup mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasiskan teknologi.

Bidang yang digeluti pun bisa bervariasi, mulai dari pelayanan pembelian,

keuangan, ritel hingga video games. Beberapa contoh perusahaan start-up yang telah besar saat ini adalah Gojek, Traveloka, Tokopedia, OVO, Bulalapak dan Shopee.

Hal ini bisa menjadi inspirasi. Namun, untuk bisa langsung mendirikan Startup di tengah kondisi pandemi saat ini tentu tidak mudah. Lesunya perekonomian masih menjadi kendala. Pemerintah dapat mulai dari langkah yang sederhana dulu. Salah satunya adalah dengan pengembangan jiwa entrepreneur. Tenaga kerja milenial perlu didorong untuk menjadi entrepreneur yang memanfaatkan teknologi informasi.

Pelatihan wirausaha perlu ditingkatkan kualitasnya, perlu inovasi berbasis teknologi. Untuk tenaga kerja milenial dengan tingkat pendidikan yang rendah, diperlukan pelatihan keterampilan yang mampu meningkatkan skill dalam satu bidang yang diminati, dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Jadi, pada akhirnya, milenial di Riau bukan lagi banyak yang mencari pekerjaan, tapi sudah mencipta lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan.

Ekspor 2020, Penggerak Ekonomi Di Masa Resesi

Oleh : Irfarial, SE

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 15 FEBRUARI 2021



Resesi ekonomi masih mengelayut di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Provinsi Riau. Hal ini tidak lain karena wabah pandemi Covid-19 yang belum kunjung mereda. Bahkan di beberapa tempat masih bermunculan kasus-kasus baru dengan kecenderungan meningkat. Ini menandakan bahwa Covid-19 masih merajalela dan belum ada yang dapat memprediksi kapan akan berakhir. Namun semua negara masih terus berupaya antara lain dengan vaksin yang dapat memicu tumbuhnya kekebalan tubuh terhadap Virus Corona.

Resesi ekonomi yang masih berjalan terlihat dari rilis BPS pada Jum'at, 5 Februari 2021 yang lalu. BPS merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2020 masih terkonstraksi atau minus sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibanding tahun 2019. Demikian juga pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV 2020 mengalami penurunan sebesar 1,47 persen (c-to-c) dibanding tahun 2019. Secara akumulasi selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 1,12 persen dibanding tahun 2019. Jika dikeluarkan sektor migas atau tanpa menghitung minyak dan gas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih tetap mengalami penurunan yaitu sebesar 0,20 persen

Sebuah lembaga penelitian di AS, National Bureau of Economic Research (NBER) mendefinisikan resesi sebagai indikasi turunnya daya beli masyarakat secara umum dan naiknya angka pengangguran. Turunnya daya beli masyarakat di Riau tercermin dari tingkat inflasi Riau yang rendah selama tahun 2020, bahkan telah terjadi deflasi (inflasi negatif) sebanyak empat kali yaitu di bulan Maret (-0,01 %), April (-0,26 %), Juli (-0,24 %), dan bulan September (- 0,01 %). Sementara tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau meningkat dari 5,76 persen menjadi 6,32 persen pada Agustus 2020.

Akan tetapi terdapat hal menarik yang terjadi pada Perekonomian Riau selama tahun 2020. Di tengah berbagai sektor/lapangan usaha andalan Perekonomian Riau mengalami kontraksi atau penurunan. Demikian juga jika dilihat dari sisi pengeluaran, berbagai komponen pengeluaran Perekonomian Riau mengalami kontraksi. Yang menarik adalah, salah satu komponen PDRB Riau dari sisi pengeluaran, yaitu komponen ekspor barang dan jasa selalu bertumbuh positif di setiap triwulan selama tahun 2020, sementara komponen pengeluaran lainnya mengalami penurunan. Komponen ekspor barang dan jasa seakan-akan menjadi penyelamat dari lesunya kinerja berbagai

sektor perekonomian.

Hal ini terlihat ketika pada triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi Riau minus sebesar 3,22 persen (c-to-c) dibanding tahun 2019, komponen ekspor barang dan jasa menjadi satu-satunya komponen yang bertumbuh positif sebesar 5,57 persen. Kemudian pada triwulan III 2020, dimana pertumbuhan ekonomi Riau minus sebesar 1,67 persen (c-to-c) dibanding tahun 2019, ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 9,54 persen. Demikian seterusnya sampai triwulan IV 2020. Bahkan secara tahunan, yaitu tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Riau yang minus sebesar 1,12 persen (c-to-c) dibanding tahun 2019, komponen ekspor barang dan jasa menjadi satu-satunya komponen pengeluaran yang bertumbuh positif yaitu sebesar 13,10 persen, sedangkan komponen pengeluaran lainnya mengalami kontraksi, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga turun sebesar 2,11 persen, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) turun sebesar 0,40 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah turun sebesar 6,39 persen, dan pembentukan modal tetap bruto turun sebesar 1,86 persen (Rilis BPS, Jum'at 5 Februari 2021). Dapat dibayangkan andai ekspor pun mengalami pertumbuhan minus betapa terpuruknya pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2020.

Dengan pertumbuhan positif yang dialami oleh komponen ekspor barang dan jasa, baik langsung maupun tidak langsung dapat menjadi penggerak sektor/lapangan usaha ekonomi Riau lainnya untuk bertumbuh, terutama sektor/lapangan usaha yang berorientasi ekspor. Antara lain sektor pertanian yang tumbuh sebesar 4,35 persen, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,93 persen, dan jasa keuangan dan

asuransi yang tumbuh sebesar 4,15 persen.

Demikianlah kenyataannya, meskipun berbagai kebijakan pelarangan diterapkan oleh negara-negara yang terdampak Covid-19, seperti lockdown, pelarangan penerbangan, dan lain sebagainya, ternyata barang-barang hasil alam Riau tetap leluasa memasuki berbagai negara di dunia. Tercatat kurang lebih 156 negara telah menerima ekspor Riau selama tahun 2020, baik yang rutin setiap bulan maupun selang seling. Untuk benua Asia, ekspor Riau terbesar nilainya adalah ke Tiongkok sebesar US\$ 2,40 miliar, India sebesar US\$ 1,77 miliar, dan ke Pakistan sebesar US\$ 740,55 juta. Sementara ke benua Eropa terbesar nilainya adalah ke Belanda sebesar US\$ 777,33 juta dan Spanyol sebesar US\$ 476,41 juta. Sedangkan ke benua Amerika terbesar nilainya adalah ke Amerika Serikat sebesar US\$ 508,01 juta.

Sementara dari sisi komoditas, selama tahun 2020 telah diekspor sebanyak 58 golongan komoditas (berdasarkan kode harmonized system (HS), yaitu nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia). Komoditas tersebut dikirim melalui pelabuhan muat di Riau dan pelabuhan muat di provinsi lainnya seperti di Sumut, Sumbar, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, dan Bali.

Dan dapat dipastikan nilai ekspor terbesar Provinsi Riau berasal dari produk sawit dan turunannya, yang termasuk golongan Lemak dan Minyak Hewan/nabati (kode 15), yaitu sebesar US\$ 8,30 miliar, diikuti produk Kertas dan Karton (kode 48) sebesar US\$ 1,63 miliar, Bubur Kayu (Pulp) (kode 47) sebesar US\$ 1,19 miliar, dan Berbagai Produk Kimia (kode 38) sebesar US\$ 957,19 juta.

Seperti itulah peran ekspor yang sebesar Rp. 546 ribu tadi, ternyata dalam menopang perekonomian Riau di sumbangan GKM tahun 2020. Bagaimana dengan tahun 2021. Merujuk data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020, sejak Maret 2020 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia terhitung sebanyak 743.198 kasus, total orang di tes sebanyak 4.912.745 orang dengan positive rate sebesar 21,7 persen. Riau berada di urutan ketujuh dengan jumlah 24.966 kasus terkonfirmasi setelah Kalimantan Timur. Dengan bermunculannya kasus-kasus baru dengan kecenderungan meningkat, menandakan bahwa Covid-19 masih merajalela.

Dengan demikian di tahun 2021 peran ekspor tentu akan tetap menjadi pilihan utama bagi pemerintah bahkan lebih ditingkatkan, termasuk Riau dengan kontribusi ekspor sebesar 8,43 persen menjadi nomor tiga terbesar setelah Jawa Barat 16,28 persen, dan Jawa Timur 12,44 persen terhadap ekspor nasional. Namun yang lebih diharapkan adalah dengan adanya keberadaan sektor/ lapangan usaha berorientasi ekspor di Riau berikut multiplier effect nya dapat lebih diperluas lagi kontribusinya sehingga dapat menjangkau seluruh penduduk Riau untuk kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.

Andil Rokok dalam Kemiskinan dan Pengeluaran Kita

Oleh : YANDIKA WELRA, SST

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 17 FEBRUARI 2021



Setelah bersusah payah mencetak angka kemiskinan sebesar 1 digit untuk pertama kalinya di Maret 2018 yang lalu, kini persentase angka kemiskinan nasional kembali menyentuh 2 angka. Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis persentase penduduk miskin nasional untuk kondisi bulan September 2020 sebesar 10,19 persen, atau terjadi penambahan sebanyak 0,41 persen dibandingkan bulan Maret 2020 yang sebesar 9,78 persen, dan meningkat sebanyak 0,97 persen dibandingkan bulan September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

Kondisi yang tidak berbeda jauh juga dirasakan Provinsi Riau. Setelah sempat mempertahankan tren angka kemiskinan yang terus turun sejak September 2017, 3 tahun kemudian pergerakan tersebut berbalik arah. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau per September 2020 dilaporkan sebanyak 7,04 persen, atau bertambah sebesar 0,22 persen dibandingkan kondisi Maret 2020.

Gambaran kemiskinan di atas seolah mempertegas betapa kuatnya efek dari kejadian pandemi Covid-19 terhadap aspek sosial ekonomi, karena sebelumnya pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 juga dilaporkan mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) kondisi bulan Agustus

2020 terhitung sebesar 7,07 persen, atau mengalami kenaikan sebanyak 1,84 persen dari kondisi bulan Agustus 2019.

Semakin menyempitnya lapangan pekerjaan akibat situasi pandemi Covid-19 membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian, sehingga akan berdampak kepada semakin sulitnya bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada ujungnya bisa menyeret mereka ke dalam jurang kemiskinan.

Secara konsep, BPS menggunakan pendekatan basic need approach (kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar) dalam mengukur kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan di dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan (GK). Seseorang baru dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran sebulan yang besarnya di bawah GK.

GK terdiri dari 2 komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pada kondisi bulan September 2020 yang lalu, GK di Provinsi Riau diketahui sebesar Rp. 546 ribu per kapita per bulan, atau mengalami kenaikan sebanyak 0,37 persen dari kondisi Maret 2020 yang sebesar Rp. 544 ribu per kapita per bulan. Dari nilai GK

jauh lebih besar daripada GKBM, yakni 73 berbanding 27 persen.

Bila kita pelajari lebih dalam lagi, dari seluruh komoditas penyusun GK yang ada, ternyata komoditas rokok filter menempati urutan ke dua dengan sumbangan terbesar. Posisi rokok filter hanya tertinggal 1 peringkat tepat di bawah komoditas beras, namun masih berada di atas komoditas terkenal semisal cabe merah, daging ayam ras, dan mie instan. Di daerah perkotaan, sumbangan rokok filter dihitung sebesar 9,56 persen, sementara di perdesaan malah lebih besar, yakni sebesar 14,46 persen. Dominasi rokok tersebut disinyalir sudah berlangsung cukup lama, baik pada level nasional maupun pada level Provinsi Riau sendiri, mengingat sampai saat ini rokok masih menjadi salah satu kebutuhan harian utama masyarakat kita.

Fenomena di atas menjadi sebuah ironi karena di dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, rokok masih memegang peranan penting dalam penentuan kemiskinan. Dalam kondisi penghasilan yang berkurang imbas dari pandemi Covid-19, seharusnya wajib bagi kita untuk lebih cermat dalam mengatur pengeluaran belanja. Skala prioritas harus disusun. Jangan sampai uang yang sedikit dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kebutuhan primer harus diutamakan. Makanan yang bergizi, biaya pendidikan, dan juga biaya kesehatan harus dipenuhi terlebih dahulu.

Bila kita tengok data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 yang lalu, maka diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 1,3 juta. Lebih lanjut, ternyata persentase pengeluaran untuk kelompok barang

makanan lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok barang non makanan (49,84 persen berbanding 50,16 persen). Pola tersebut hanya sempat terjadi sebanyak 2 kali dalam 1 dekade terakhir (sebelumnya pada tahun 2015). Kondisi yang demikian wajar terjadi di tahun 2020 yang lalu. Karena adanya pandemi Covid-19, rumah tangga terpaksa menambah bujet pengeluaran non makanan semisal biaya pengobatan/kuratif, biaya pencegahan/preventif (seperti pembelian vitamin, masker, hand sanitizer), hingga kepada penambahan pengeluaran untuk kelompok komoditas barang pos dan telekomunikasi (biaya internet dan pulsa) sebagai penunjang kegiatan Work From Home (WFH) ataupun School From Home (SFH).

Bila data pengeluaran konsumsi tersebut kita lihat lebih detail lagi, maka akan kita temukan fakta bahwa ternyata rokok masuk ke dalam lima besar kelompok pengeluaran terbesar rumah tangga dari 20 kelompok komoditas yang ada, dan lebih menyedihkannya lagi hal itu terjadi pada populasi 40 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran terendah, dan juga terjadi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Keunggulan rokok tersebut berada di atas kelompok komoditas harian lainnya seperti ikan, daging, telur dan susu.

Kalau saja pengeluaran untuk rokok tadi dapat dialihkan kepada bahan-bahan makanan, tentu bisa lebih berdaya guna, karena setiap harinya manusia membutuhkan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak dan juga kalori dalam mendukung aktivitasnya sehari-hari. Keempat komponen tersebut terkandung di dalam setiap makanan yang kita makan.

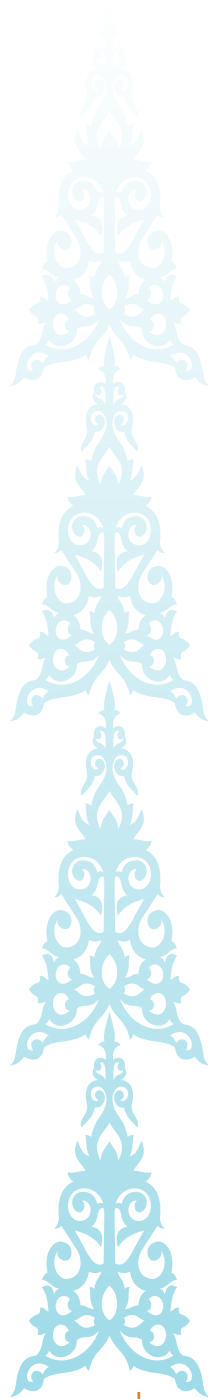
Setelah kita membaca bagaimana rokok memiliki peranan yang besar dalam

porsi yang tidak sedikit dalam total pengeluaran rumah tangga, tentu kita harus merasa khawatir, lebih-lebih saat ini kita tengah berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak ideal. Namun tidak sah rasanya mempersoalkan pengaruh rokok yang besar bila kita tidak melihat dari sisi pola kebiasaan perokoknya sendiri.

Masih dari data Susenas, diketahui bahwa jumlah perokok aktif penduduk berusia 5 tahun ke atas di Provinsi Riau mengalami penurunan, yakni dari 22,67 persen pada tahun 2019 menjadi 21,86 persen di tahun 2020. Penurunan tersebut juga diiringi dengan berkurangnya rataan jumlah rokok yang dihisap oleh perokok kita, yakni dari 120 batang per minggu (2019) menjadi 111 batang per minggu (2020). Namun rataan tersebut masih jauh sekali dari rata-rata nasional, yang jumlahnya hanya sebesar 81 batang per minggu. Itu artinya, walau jumlah perokok kita berkurang, namun jumlah batang rokok yang kita hisap masih tinggi.

Melihat sekumpulan fenomena di atas, tentunya kita perlu sama-sama memikirkan bagaimana caranya menekan laju konsumsi rokok di masyarakat. Sebenarnya pemerintah pernah menelurkan beberapa kebijakan dalam hal tersebut, salah satunya baru-baru ini ialah dengan menaikkan cukai rokok per tanggal 1 Februari 2021 yang lalu, dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,5 persen. Kenaikan tarif rokok perlu dilakukan untuk menekan daya beli masyarakat terhadap rokok. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya adalah dengan membatasi iklan produk rokok, hingga kepada langkah persuasi seperti mengeluarkan iklan layanan masyarakat dan juga menyematkan gambar dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat merokok pada

bungkus rokok. Namun itu semua belum cukup mampu mengerem kebiasaan merokok masyarakat kita. Bila pemerintah sudah berupaya dan kondisi ekonomi yang sedang tidak sehat juga tengah melanda, lalu perlu dengan cara apalagi agar kita mau mengurangi kebiasaan merokok kita?



Pertambahan Penduduk dan Kerusakan Lingkungan

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,MM

TERBIT DI [HTTPS://THECOLUMNIST.ID](https://thecolumnist.id) 21 FEBRUARI 2021



Bumi tidak muda lagi, bahkan boleh dibilang sangat tua. Para ahli memperkirakan usia bumi saat ini mencapai 4,54 miliar tahun dengan margin error 50 juta tahun (cnnindonesia.com). Kondisi bumi pun kian hari kian memprihatinkan. Pemanasan global, kekeringan, kerusakan hutan, mencairnya gletser dan salju di kutub, serta kerusakan lingkungan adalah bentuk kerusakan yang terjadi di bumi akibat ulah manusia.

Antara manusia sebagai penduduk bumi dan kerusakan lingkungan ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Semakin bertambah banyak penduduk maka kerusakan lingkungan juga semakin besar.

Tahun 2020, Jumlah penduduk dunia mencapai 7,79 miliar. Angka ini diperkirakan akan terus naik hingga mencapai 9,4 miliar pada tahun 2050. Penyebabnya adalah tingginya angka kelahiran negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Indonesia masuk dalam peringkat ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data dari hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (21/01/2021), jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 270,20 juta jiwa, meningkat sebesar 173 juta dalam rentang waktu 6 dekade. Terbayangkah, seperti apa kerusakan lingkungan yang terjadi di

Indonesia akibat dari penambahan penduduk yang demikian besar?

Menurut Prof. Dr. Nina Fedoroff dalam Agricultural outlook Forum U.S. department of Agriculture (2010), menyatakan bahwa jumlah manusia di bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kita harus berupaya agar pertumbuhan penduduk terkendali. Perubahan iklim akibat pertumbuhan penduduk berakibat buruk bagi produksi pangan sehingga miliaran penduduk terancam kelaparan.

Ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam (SDA) sangat tinggi. Melalui pemanfaatan SDA, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pangan, sandang, dan papan. Tetapi, Ketersediaan SDA yang terbatas menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang terus bertambah. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya bencana yang akan merugikan dan dapat merusak lingkungan.

Dengan dalih berupaya memenuhi kebutuhan hidup penduduk, manusia melakukan deforestasi dan alih fungsi lahan. Yang semula merupakan lahan hutan berubah menjadi area pertanian atau perkebunan. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah produksi padi sebagai tanaman penghasil beras. Produksinya meningkat dari 48,1 juta ton di tahun 1993 menjadi 55,1 juta ton di

tahun 2020. Begitu juga dengan Kelapa sawit, terjadi peningkatan dari 9,1 juta hektar di tahun 2011 menjadi 14,7 juta hektar di tahun 2019.

Tidak hanya tanaman pertanian dan perkebunan, air juga menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan air adalah pokok karena hampir seluruh aktifitas kesehariannya manusia memerlukan air. Tidak saja untuk keperluan hidup sehari-hari seperti makan dan minum tetapi juga sebagai alat transportasi, pembangkit tenaga, pertanian, peternakan dan banyak lagi kepentingan dari air (Saparuddin, 2010). Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan air juga meningkat.

Meskipun air dibutuhkan dan ketersediaannya terbatas, tetapi manusia masih juga tetap tidak menyadari betapa pentingnya air. Hal ini terbukti masih banyaknya terjadi pencemaran air yang mengakibatkan kualitas air menjadi kurang baik di Indonesia. Terlihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu berkisar pada angka 50.

Penambahan jumlah penduduk juga menyebabkan tingginya permintaan akan kebutuhan energi untuk semua aktivitas manusia. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), kebutuhan energi Indonesia pada 2020 sebesar 290 juta ton setara minyak (millionton oil equivalent/mtoe). Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan kebutuhan energi di tahun 2050 diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat yakni sebesar 1.000 mtoe (medcom.id).

Produk akhir yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan konsumsi manusia

adalah berupa sampah. Penduduk yang banyak akan menghasilkan sampah yang banyak pula. Dilansir dari idntimes.com, pada tahun 2020 jumlah timbulan sampah mencapai 67,8 juta ton dan diperkirakan pada tahun 2050 komposisi sampah akan meningkat lebih dari dua kali lipat. Sampai detik ini masalah sampah masih menjadi masalah klasik yang belum dapat diselesaikan di Indonesia.

Dari apa yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa penambahan jumlah penduduk banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Namun ibarat kata “Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia harus dapat diterima dan dimanfaatkan. Baik dampak atau akibat yang timbul akibat dari banyaknya jumlah penduduk harus dicari solusi untuk menyiasatinya.

Hal pertama yang dapat dimanfaatkan dari jumlah penduduk yang besar adalah memanfaatkan penduduk pada usia produktif. Kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia yang produktif oleh karena itu dibutuhkan investasi pada bidang pendidikan kesehatan.

Kedua, besarnya jumlah penduduk dapat dimanfaatkan menjadi potensi pasar yang besar baik dalam maupun luar negeri. Ketiga, bonus demografi yang terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan dan diharapkan dapat mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Sedangkan untuk mengatasi dampak atau masalah yang timbul akibat dari peningkatan jumlah penduduk adalah dengan menciptakan inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan pemanfaatan teknologi.

Untuk masalah lahan pertanian padi, dibutuhkan diversifikasi pangan agar tidak hanya beras yang menjadi sumber bagi kebutuhan pangan penduduk Indonesia tetapi dapat diganti dengan jenis tanaman pangan lainnya seperti ubi kayu, sagu, jagung, kentang, pisang, dan sorgum.

Begitu juga dengan perkebunan kelapa sawit. Perluasan lahan perkebunan dapat dihentikan dan dilakukan peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui penggunaan bibit unggul yang dapat menghasilkan produksi 2 kali lipat dari produksi saat ini. Upaya ini dalam rangka menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan hutan.

Mengingat air sangat dibutuhkan, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian air adalah dengan melakukan penghematan air, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan tidak membuang sampah sembarangan yang berakibat dapat mencemari air. Selain itu dengan membuat lubang biopori atau kolam penampungan air juga dapat menjaga kelestarian air.

Masalah selanjutnya yang harus diatasi adalah masalah penggunaan energi. Dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan energi terbarukan. Ibarat toko serta ada (toserba), Indonesia merupakan surga dari energi terbarukan. Mulai dari tenaga matahari, angin, air, lautan, sampai panas bumi semua ada dan banyak di Indonesia. Dibutuhkan inovasi dan teknologi untuk dapat memanfaatkan energi terbarukan tersebut.

Masalah klasik lainnya yang harus diatasi adalah sampah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini tetapi sampai detik ini masih belum teratasi. Tidak hanya membutuhkan inovasi dan

juga teknologi, tetapi dibutuhkan kesadaran masyarakat serta regulasi pemerintah yang mengatur tentang sampah di Indonesia.

Kepedulian semua pihak sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan negara yang peduli akan lingkungannya. Ini bukan saja tugas satu orang, tetapi tugas kita semua. “When we heal the earth, we heal ourselves.” — David Orr.

Lampu Kuning Kemiskinan Riau

Oleh : Lina Agustina Pujiwati, SST,M.Ec.Dev

OPINI TERBIT DI RIAU POS , 24 FEBRUARI 2021



Lampu Kuning Kemiskinan Riau*

Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir semua sektor kehidupan, salah satunya adalah kemiskinan. Kenaikan jumlah penduduk miskin tak terelakkan. Perlu sinergitas dan kepedulian semua stakeholder untuk menekan laju kenaikan kemiskinan.

Pasien positif Covid-19 pertama kali diumumkan pemerintah Provinsi Riau pada 18 Maret 2021. Sejak saat itu, masyarakat mulai merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyerang hampir di semua sendi kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dll.

Salah satu dampak pandemi Covid-19 yang saat ini dirasakan adalah naiknya angka kemiskinan Riau. Rilis data BPS Provinsi Riau (15/2) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Riau kondisi September 2020 naik 0,14 persen poin dibanding periode yang sama 2019, menjadi 491,22 ribu jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin Riau bertambah 7,3 ribu jiwa.

Fakta tersebut menjadi lampu kuning yang menyita perhatian kita bersama. Akankah pemerintah mampu menahan laju kenaikan jumlah penduduk miskin di tengah pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir?.

Ekonomi Riau

Kenaikan angka kemiskinan Riau terkait dengan kondisi makro ekonomi. Data BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau triwulan III-2020 mengalami kontraksi 1,74 persen (y-on-y). Angka ini jauh menurun dibanding capaian periode yang sama tahun 2019, yang tumbuh 2,77 persen (y-on-y).

Kontraksi pertumbuhan ekonomi berimbas pada penurunan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 turun menjadi 2,32 persen, setelah sebelumnya konsumsi rumah tangga triwulan III 2019 mampu tumbuh 2,12 persen.

Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan desakan kebutuhan hidup, turunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung mengurangi konsumsinya. Banyak hal menjadi faktor penyebab berkurangnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Salah satunya adalah turunnya daya beli masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup, terutama pada rumah tangga miskin atau hampir miskin. Tak elak, jumlah penduduk miskin-pun bertambah.

Ketenagakerjaan Riau

Pandemi Covid-19 juga memaksa pelaku ekonomi melakukan berbagai adaptasi agar bisa terus memproduksi menghasilkan

kan barang dan jasa. Pengurangan jam kerja atau bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Penyesuaian ini tentu saja berdampak langsung pada penerima pendapatan, terlebih rumah tangga miskin. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukkan bahwa 520,92 ribu penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Dari angka tersebut, 446,31 ribu penduduk mengalami pengurangan jam kerja (shorter hours) dan 35,40 ribu penduduk menjadi pengangguran.

Selain hal tersebut di atas, jumlah pekerja setengah menganggur juga bertambah 0,56 persen poin. Pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Pada Agustus 2019, jumlah pekerja setengah menganggur sebanyak 5,76 persen. Angka ini bertambah menjadi 6,32 persen pada Agustus 2020. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tak heran jika penduduk miskin di Indonesia bertambah jumlahnya.

Si Miskin Kian Miskin

Sebagai imbas pandemi Covid-19, kondisi penduduk miskin terlihat semakin memburuk. Hal ini tercermin dari dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan yang semakin besar. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,11 (September 2019) menjadi 1,32 (September 2020). Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,25 (September 2019) menjadi 0,43 (September 2020).

Penataan Bansos

Jumlah penduduk miskin diperkirakan akan terus bertambah, seiring dengan belum diketahuinya kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Meski vaksinasi

Covid-19 sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu, namun program tersebut dirasa belum maksimal. Banyak penduduk takut melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan. Bahkan, menurut perhitungan Bloomberg, vaksinasi di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Dengan rata-rata vaksinasi Covid-19 hanya 64.187 dosis per hari, diprediksi butuh lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan herd immunity yakni memvaksinasi 75 persen populasi dengan suntikan dua dosis.

Kendati demikian, upaya sistematis untuk percepatan penanggulangan kemiskinan tetap harus dilakukan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebenarnya telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial. Hal tersebut, patut mendapat apresiasi, karena tanpa program perlindungan sosial, dapat dipastikan jumlah penduduk miskin akan semakin banyak. Jika September 2020 penduduk miskin Riau bertambah 7,30 ribu jiwa dibanding September 2019, maka tanpa bansos dari pemerintah, kenaikan itu tentu akan semakin besar.

Salah satu keluhan yang kerap muncul dalam program bansos adalah penyalurannya yang kurang tepat sasaran. Permasalahan ini berawal dari tidak akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai database pendistribusian bansos. Banyak daerah belum memperbaharui data kemiskinan yang pada tahun 2016 telah dikeluarkan pemerintah pusat. Untuk itu, updating data kemiskinan mikro menjadi urgent dilakukan guna memastikan program bansos berjalan dengan baik.

Lepas dari masalah pendistribusian bansos, perlu disadari bahwa bansos hanyalah program penopang kehidupan sehari-hari masyarakat miskin dan rentan mi-

skin. Program ini belum bisa dijadikan alat utama untuk menurunkan kemiskinan. Dibutuhkan sinergi para pelaku ekonomi untuk secara simultan memulihkan pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan pembangunan yang bersifat padat karya dengan tetap disertai protokol kesehatan yang ketat.

Hal tersebut dirasa mendesak untuk segera dilakukan agar mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi dapat kembali bekerja. Mengapa? Sebab jika hanya mengandalkan bansos, rumah tangga miskin tanpa penghasilan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bansos yang digulirkan pemerintah saat ini masih di bawah rata-rata garis kemiskinan rumah tangga nasional, yang besarnya 2,216 juta (Susenas September 2020).

Tak kalah penting, program bansos juga perlu diiringi dengan upaya peningkatan kapabilitas penduduk, terutama rakyat miskin. Hal tersebut menjadi urgent karena peningkatan skill akan memperbesar peluang penduduk miskin menuju kemandirian yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan.

Pendekatan Spasial

Kebijakan menurunkan angka kemiskinan kiranya perlu memperhatikan aspek spasial sehingga langkah yang diambil lebih tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat miskin. Hal ini penting, sebab sejak September 2019 lalu hingga September 2020, penduduk miskin perkotaan di Riau naik 8,6 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan justru turun 1,3 ribu jiwa. Dengan kata lain, masyarakat yang tinggal di kota lebih merasakan dampak Covid-19 dibanding mereka yang hidup di desa.

Meskipun demikian, kita juga tidak bisa mengesampingkan upaya menurunkan kemiskinan di perdesaan karena secara keseluruhan, kantong-kantong kemiskinan lebih banyak dijumpai di daerah rural. Tercatat, 312,76 ribu penduduk miskin tinggal di perdesaan dan 178,46 ribu penduduk miskin tinggal di perkotaan.

Roda Ekonomi

Agar penduduk miskin dapat bekerja dan memperoleh pendapatan, pemerintah perlu memastikan roda perekonomian terus bergerak. Stimulus ekonomi diperlukan untuk merangsang pelaku ekonomi tetap memproduksi menghasilkan barang dan jasa.

Dalam hal ini, faktor kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Kebijakan new normal yang masih terkesan setengah-setengah perlu diperketat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga juga perlu digalakkan. Selama pandemi, ada kecenderungan penduduk kelas menengah atas menahan belanjanya. Jika hal ini terus terjadi, maka akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, struktur ekonomi Riau 2020 masih didominasi (39,58 persen) oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Terakhir, kemiskinan yang kian bertambah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Dibutuhkan sinergitas dan kepedulian seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bahu membahu mengambil peran melawan pandemi covid-19 hingga Riau bisa menekan laju kemiskinan.

Setahun Bersama Virus Corona

Oleh : Noliza, SST

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 3 MARET 2021



Setahun Bersama Virus Corona

Sudah hampir satu tahun Indonesia hidup dengan pandemi virus corona. Banyak dampak dan perubahan kehidupan yang disebabkan oleh pandemi ini. Seluruh aspek kehidupan kita terganggu karena hal ini. Apakah kita bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Dan bagaimana kelangsungan kehidupan kita di tahun-tahun berikutnya?

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret Tahun 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Menurut Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menilai memprediksi virus Corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020. Sejak saat itu lah wabah virus corona terus merajalela ke berbagai daerah. Dimana setiap hari di informasikan pasien yang terjangkit dan meninggal terus bertambah.

Hal ini lah mendorong setiap Pemerintah Daerah mulai melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk Provinsi Riau. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Riau perlu dilakukan untuk menekan angka Pasien COVID-19 yang terus meningkat terutama di Kota

Pekanbaru. Kota Pekanbaru salah satu kota dengan angka tertinggi penderita covid di antara 12 kabupaten/kota di Riau dan juga di Indonesia. Kebijakan PSBB tentunya memberikan dampak yang besar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dari Aspek Ekonomi

Akibat PSBB, dunia usaha, tempat hiburan, wisata, dan tempat ibadah di tutup. Kegiatan perekonomian/usaha terbatas dan makin lemah. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan omset, akibatnya tidak sedikit karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Ada juga perusahaan yang tidak melakukan PHK, tetapi karyawan digaji tidak penuh. Sementara untuk usaha kecil dan mikro banyak yang gulung tikar. Sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sebesar 7,74 persen menjadi 8,56 persen di tahun 2020. Peningkatan pengangguran akhirnya memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat. Terbukti penduduk miskin Kota Pekanbaru meningkat dari 2,52 persen pada Maret tahun 2019 menjadi 2,62 persen pada Maret tahun 2020. Dalam aspek ini, Pemerintah sudah berusaha melakukan kebijakan-kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), program Kartu Sembako,

Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan keringan listrik.

Dari Aspek Pendidikan

Sejak diberlakukannya PSBB, semua sekolah tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau video. Hal ini membuat para guru, anak, dan orang tua terkejut karena ketidaksiapan dengan situasi yang terjadi. Sistem pembelajaran seperti ini menuntut para guru, siswa dan orang tua harus bisa menggunakan teknologi. Kendalanya, apakah setiap guru bisa menggunakan teknologi yang ada? Dan apakah setiap siswa memiliki handphone atau PC dengan kuota internet untuk melakukan pembelajaran daring? Karena masih ada penduduk kita dibawah garis kemiskinan, untuk makan saja sulit, apalagi untuk membeli kuota internet dan handphone yang memiliki kualitas untuk pembelajaran daring. Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah sudah berusaha memberikan bantuan kuota internet untuk anak sekolah.

Dampak lainnya pendidikan secara sistem daring ini menuntut orang tua lebih banyak berperan serta mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Namun tidak semua orang tua bisa full mendampingi anak-anaknya karena harus bekerja mencari nafkah. Setelah hampir satu tahun menjalani pemebelajaran secara daring, orang tua dan murid merasa tatap muka dengan guru lebih penting dalam hal pembelajaran.

Dari Aspek Kesehatan

Setiap hari diberitakan jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Bahkan rata-rata rumah sakit sudah penuh dengan

pasien COVID-19, sedangkan petugas kesehatan sudah kewalahan dan sudah banyak juga yang bertumbuhan. Belum lagi APD yang kurang dan sulit didapat, contohnya masker. Pada saat awal-awal mewabahnya virus corona, kita sempat sulit memperoleh masker, bahkan masker dijual dengan harga yang tinggi. Saat ini masker bukan saja jadi kebutuhan tenaga kesehatan dan penderita covid-19, tapi kebutuhan seluruh penduduk.

Dampak lain yang dirasakan dari virus corona ini menyebabkan orang yang memiliki penyakit lain tidak berani berobat ke rumah sakit/puskesmas dan mereka pun sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Selain itu juga menyebabkan terhambatnya pelayanan imunisasi lengkap pada balita. Tentu hal ini bisa menjadi permasalahan baru lagi untuk masa mendatang jika balita tersebut tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan di aspek kesehatan bisa terlihat dari penambahan APD untuk rumah sakit/puskesmas, menyediakan tempat penginapan bagi tenaga kesehatan di hotel, pemberian rapid tes dan swab masal, serta menanggung biaya pasien covid yang di rawat. Selain itu, di tahun 2021, pemerintah berusaha memberikan vaksin sinovac secara bertahap untuk seluruh masyarakat.

Peran serta pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak virus corona sudah ada dan cukup banyak, namun apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah tepat sasaran? Apakah bantuan-bantuan tadi diterima oleh masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut? Untuk itu harus dikawal dan diperhatikan betul oleh seluruh kalangan

agar masyarakat yang membutuhkan terus? benar-benar dapat bantuan tersebut.

Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi kapan pandemi virus corona ini akan berakhir. Setelah beberapa bulan kita hidup dengan pemberlakuan PSBB, kegiatan ekonomi terus melambat dan lama kelamaan bisa saja akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia dan pergerakan barang. Karena tidak semua kegiatan/pekerjaan bisa dilakukan dari rumah dan kita juga tidak bisa mengandalkan bantuan pemerintah terus-menerus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sekitar bulan Juni 2020, Pemerintah mulai merepak kebijakan new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Dengan diberlakukannya new normal, kita mulai melakukan aktifitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona.

Sudah hampir satu tahun kita hidup berdampingan dengan virus corona, segala aspek kehidupan kita mengalami krisis dan dampak yang buruk. Namun sampai saat ini, bisa kita lihat masih ada masyarakat kita yang tidak percaya akan adanya virus corona tersebut. Masih banyak kita temui masyarakat yang tidak memakai masker dan tetap kumpul-kumpul. Sementara informasi tentang pasien COVID-19 juga terus bertambah setiap harinya. Apakah kita masih mau kehidupan kita seperti ini

Untuk itu seluruh lapisan masyarakat harus lebih sadar akan bahayanya pandemi virus corona ini, karena kunci untuk menanggulangi pandemi virus corona ini kita semua harus disiplin terhadap protokol kesehatan sehingga angka penularan virus corona bisa berkurang dan dapat ditekan. Tentunya, kita semua sudah mendambakan dapat hidup normal kembali.

Membentuk Lansia Berkualitas

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST.ID , 6 MARET 2021



Aging is an inevitable process". Penggalan kata mutiara dari William Holden ini mengingatkan kita bahwa menua itu adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan karena menua merupakan proses alami yang terjadi pada manusia. Orang yang mengalami proses ini sering kali disebut lanjut usia (lansia).

Lanjut usia (lansia) biasanya adalah seseorang dengan usia 60 tahun ke atas dan memiliki ciri-ciri rambut yang mulai memutih, kulit yang mulai keriput, mata yang mulai tidak jelas melihat, pendengaran yang mulai berkurang, daya ingat yang mulai melemah, dan masih banyak lagi kemunduran atau kekurangan fisik lainnya yang terjadi.

Ditandai dengan terjadinya perubahan fisik maupun psikis, lansia identik dengan lamban, lemah, dan sangat bergantung kepada orang lain. Dengan kondisi demikian, seringkali keberadaannya dianggap sebagai beban. Tidak hanya dalam lingkungan keluarga dan dunia kerja, tetapi juga dalam proses pembangunan. Seperti apakah lansia yang diharapkan dalam pembangunan?

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk lanjut usia kian bertambah. Populasi lansia dunia diperkirakan akan meningkat 223 persen atau sebesar 694 juta orang antara tahun 1970–2025. Bahkan

diperkirakan akan mencapai 2 miliar orang pada tahun 2050 dan sekitar 80 persen dari populasi tersebut berada di negara-negara berkembang (WHO, 2002).

Dilansir dari media kompas.com, Jepang merupakan negara yang memiliki jumlah lansia berumur tinggi terbanyak di dunia. Sebesar 27 persen dari jumlah populasinya adalah penduduk lanjut usia. Hal ini disebabkan karena tingginya usia harapan hidup penduduk Jepang. Diperkirakan rata-rata usia perempuan hidup sampai 87,45 tahun dan laki-laki diperkirakan hidup sampai 81,41 tahun.

Walaupun tidak sebanyak Jepang, saat ini Indonesia mengalami penambahan jumlah penduduk lansia yang cukup banyak. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dirilis oleh BPS tanggal 21 Januari 2021, persentase penduduk lanjut usia di tahun 2020 sebesar 9,78 persen atau meningkat 2,29 persen dari tahun 2010 (BPS). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia berada dalam masa transisi menuju era aging population yaitu kondisi ketika persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai lebih dari 10 persen.

Dampak Negatif dan Positif Penduduk Lansia

Semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia memberikan

dampak negatif dan positif bagi proses pembangunan. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin besar atau ketergantungan lansia terhadap generasi yang lebih muda semakin besar.

Bagi kelompok masyarakat ekonomi mampu, hal ini tidak menjadi masalah karena segala kebutuhan hidup lansia dapat dipenuhi. Sedangkan untuk kelompok masyarakat ekonomi lemah yang berpenghasilan pas-pasan atau bahkan kurang, memenuhi kebutuhan lanjut usia seringkali tidak dapat dilakukan dengan baik.

Kondisi ini memaksa para penduduk lansia pada kelompok ini bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Walaupun seringkali pekerjaan yang dilakukan sangat tidak layak atau tidak sesuai. Seperti misalnya banyak dijumpai lanjut usia yang bekerja mengumpulkan barang-barang bekas atau mengemis di persimpangan-persimpangan jalan.

Hal negatif lainnya adalah semakin bertambahnya penduduk lansia membuat pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk biaya perawatan kesehatan dan dana pensiun. Sementara pajak yang diperoleh dari penduduk lansia semakin kecil karena mereka tidak lagi bekerja. Begitu juga dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang akan terus mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Walaupun demikian, tidak selamanya keberadaan penduduk lanjut usia selalu memberikan dampak negatif. Terdapat beberapa dampak positif yang

bisa didapatkan dengan bertambahnya penduduk lanjut usia.

Pertama, penduduk lanjut usia dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kelompok-kelompok sosial seperti bergabung dalam kelompok pengajian, grup olahraga khusus lanjut usia, ikatan kelompok masyarakat, dan kelompok sosial lainnya.

Kedua, generasi tua atau lanjut usia masih dapat melakukan perawatan keluarga seperti mengasuh cucu. Di saat orang tua bekerja, maka lansia dapat dilibatkan dalam pengasuhan dan perawatan cucu. Hal ini dapat menyebabkan pola tumbuh kembang anak menjadi baik karena diawasi secara intens oleh keluarga dekat.

Ketiga, seperti film yang dibintangi oleh Robert De Niro dan Anne Hathaway dalam "The Intern". Lansia yang memiliki kondisi fisik dan psikis masih baik dapat diperkerjakan dengan mengikuti program kerja magang diperusahaan-perusahaan tertentu.

Keempat, di daerah pedesaan yang identik dengan sektor pertanian, seringkali tenaga kerja sektor ini adalah para penduduk lanjut usia. Seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, dalam pernyataannya, Senin 8 Juni 2020, "Bahkan pekerja sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang (28,79% penduduk) yang rata-rata masuk usia tua, sedangkan kelompok usia muda 19-39 tahun hanya 10% yang terjun ke pertanian". Ini menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia masih bisa produktif dalam bekerja.

Membentuk Lansia Berkualitas

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia tidak bisa dihindari. Semua harus bisa menyikapinya dengan memikirkan cara bagaimana menciptakan lanjut usia yang berkualitas. Tidak hanya lansia yang sehat, mandiri, dan aktif, tetapi juga harus produktif.

Untuk mendapatkan lansia yang sehat tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses panjang yang harus dimulai sejak masih muda. Melalui penerapan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, olahraga yang teratur, berpikiran positif, dan beristirahat yang cukup, diharapkan dapat menciptakan generasi sehat di masa lanjut usia.

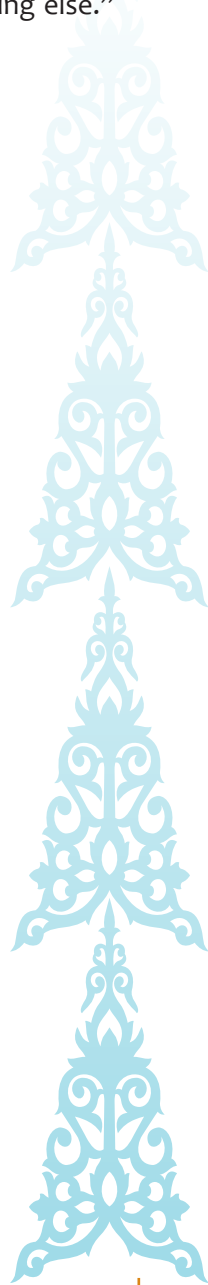
Pada prinsipnya lansia yang bekerja bukanlah suatu aib atau hal yang memalukan. Selama yang dikerjakan adalah pekerjaan yang positif dan sesuai dengan usianya maka hal ini dapat berdampak baik. Tidak hanya untuk para lansia itu sendiri tetapi juga untuk keluarganya, masyarakat sekitar, dan negara. Di saat lansia dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, hal ini dapat berarti mengurangi ketergantungan terhadap penduduk usia produktif.

Untuk bisa mencapai itu maka dibutuhkan lansia yang sehat dan mandiri. Dapat dipastikan adalah lansia yang aktif. Tidak hanya aktif dalam hal bekerja tetapi juga dapat aktif dalam masyarakat dan kelompok-kelompok sosial. Hal ini dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang berada di sekitar lansia.

Banyak orang-orang lanjut usia yang tetap produktif dan sukses dalam kehidupannya, misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, penyanyi mahadiva Titiok Puspa, jurnalis senior Karni Ilyas, dan

masih banyak lagi lansia sukses lainnya di Indonesia. Produktivitas dan kesuksesan dapat diraih jika kondisi fisik sehat dan aktif dalam aktivitas sehari-hari.

Bukanlah hal yang mustahil untuk bisa menciptakan generasi lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. “No one can avoid aging, but aging productively is something else.”
– Katharine Graham.



Pertanian Sektor Tangguh

Oleh : Desi Damaiyanti, SST
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 8 MARET 2021



Hampir semua sektor ekonomi mengalami keterpurukan di masa pandemi, namun sektor pertanian ternyata mampu bertahan di tengah dahsyatnya efek dari wabah Covid-19 ini. Sektor pertanian bisa dikatakan sebagai penyelamat perekonomian Riau di masa pandemi, terbukti sektor ini masih mampu tumbuh positif lebih dari 4 persen.

Peningkatan produksi padi. Dengan melihat lebih detail pertumbuhan subsektor pembentuknya, tanaman pangan selama tahun 2020 mampu tumbuh positif lebih dari 5 persen. Berbagai kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan selama masa pandemi sama sekali tak terbukti. Program Pemerintah Provinsi Riau melalui gerakan penyediaan pangan daerah yang dengan gencar dilakukan selama 2020 membuahkan hasil yang gemilang. Berbagai upaya dengan melakukan terobosan untuk peningkatan produksi padi terus dilakukan. Awal Maret lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merilis hasil survei KSA (Kerangka Sampel Area) yang menunjukkan adanya kenaikan realisasi panen padi sepanjang tahun 2020. Kenaikan tersebut berkisar 2,52 persen atau sekitar 1,59 ribu hektare dibandingkan 2019 lalu.

KSA (Kerangka Sampel Area) merupakan metode yang digunakan oleh BPS bekerja sama dengan Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam rangka melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen. Produksi padi di Riau sepanjang Januari hingga Desember 2020 mengalami kenaikan sekitar 12,81 ribu ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi tertinggi justru terjadi pada Maret 2020, di mana pada bulan ini wabah virus corona secara resmi diumumkan oleh Pemerintah masuk ke Indonesia. Jika dilihat menurut subround, pada subround Mei-Agustus 2020 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 2,98 persen. Kenaikan produksi padi ini menjadi sesuatu hal yang sangat kontras terjadi mengingat perekonomian Riau pada triwulan kedua justru mengalami kontraksi pertumbuhan hingga mencapai minus 4,49 persen (q-to-q). Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan terkena dampak paling kecil selama masa pandemi dibandingkan sektor lainnya.

Pada subround September-Desember 2020 produksi padi meningkat pesat mencapai 10,36 ribu ton GKG atau mengalami kenaikan sekitar 40,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 lalu. Fase pola hidup normal baru atau yang lebih dikenal dengan istilah new normal sudah diberlakukan di Provinsi Riau pada

periode ini. Tampak ada geliat pada semua sektor ekonomi sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 setara dengan 139,13 ribu ton beras, atau dapat dikatakan naik 5,55 persen. Peningkatan produksi beras memang sangat diperlukan untuk memenuhi pangan penduduk Riau yang mencapai 6.394,09 ribu jiwa (hasil Sensus Penduduk 2020).

Subsektor Perkebunan Tumbuh 4,20 Persen

Subsektor pertanian yang lain seperti perkebunan pada 2020 juga tumbuh positif 4,20 persen. Subsektor ini merupakan penggerak roda perekonomian di beberapa wilayah di Riau, seperti Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Daerah ini tentunya memiliki komoditas unggulan masing-masing. Sebut saja, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu dengan komoditas karet dan kelapa sawitnya, Indragiri Hilir dengan komoditas kelapa nya, dan Kepulauan Meranti dengan komoditas sagu nya. Pada awal masa pandemi, harga sejumlah komoditas unggulan di subsektor perkebunan seperti karet dan kelapa sawit sempat mengalami penurunan, namun di akhir tahun 2020 harga kedua komoditas tersebut kembali naik seiring meningkatnya permintaan pasar dunia.

Sektor Pertanian Menjadi Penyangga

Di tengah kondisi pandemi covid-19 banyak masyarakat yang beralih pekerjaan ke sektor pertanian. Dampak yang paling terasa akibat mewabahnya virus ini adalah banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara sejarah membuktikan bahwa

sektor pertanian mampu menjadi sektor penyangga yang menampung tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Banyak pekerja yang beralih ke sektor pertanian, karenanya tidak dapat dipungkiri sektor ini menjadi alternatif pilihan terakhir bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukkan adanya penambahan sekitar 50 ribu orang penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan tahun 2019.

Sektor Pertanian Prioritas

Sektor pertanian sudah sepatutnya menjadi sektor yang diprioritaskan selama masa pandemi ini, mengingat sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua dalam menggerakkan perekonomian di Riau. Sektor pertanian menyumbang 26,83 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Terlebih lagi, sektor ini terbukti tangguh dalam menghadapi ancaman besar wabah Covid-19.***

Over Populasi dan Ancaman Latennya

Oleh : Robby Junius, SE

OPINI TERBIT DI THECOLUMNIST.ID , 9 MARET 2021



Pernahkah kita bertanya, berapakah daya tampung maksimal planet ini terhadap populasi manusia yang terus meningkat? Sampai kapankah planet ini dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan?

Saat ini saja, 1 dari 10 orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Bayangkan apa yang terjadi saat kompetisi semakin ketat dalam memperebutkan sumber daya yang bisa disediakan oleh alam.

Jumlah manusia bertambah sangat cepat dimuka bumi, sementara kapasitas daya dukung dan daya tampung lahannya sudah tidak lagi mendukung. Bumi tengah mengalami overpopulasi. Semakin banyak manusia yang hidup di muka bumi, maka semakin banyak juga hal yang dibutuhkan. Seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan hal lainnya yang menjadi bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tentu kebutuhan manusia tersebut sangat bergantung kepada sumber daya alam yang terbatas pula.

Butuh waktu hingga tahun 1961 untuk mencapai jumlah penduduk Indonesia 97,02 juta jiwa. Akan tetapi sangat menakjubkan hanya butuh waktu kurang dari 60 tahun, jumlah penduduk Indonesia sudah meningkat hampir 3 kali lipatnya. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 270,20 juta jiwa. Pertanyaannya adalah, apakah luas planet ini beserta sumber dayanya juga meningkat seiring dengan terus berkembang pesatnya jumlah penduduk?

Ini mengingatkan kita pada kutipan Thomas Robert Malthus dalam An Essay on the Principle of Population mengenai keruntuhan global akibat overpopulasi. Dalam teorinya, Malthus menggambarkan bahwa penambahan penduduk akan mengikuti deret ukur atau apabila digambarkan dalam angka adalah 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Sementara penambahan bahan makanan mengikuti deret hitung atau apabila digambarkan dalam angka adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Artinya, penambahan penduduk jauh lebih cepat dari penambahan bahan makanan. Akibatnya suatu saat nanti akan terjadi perbedaan yang besar antara jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan makanan, sehingga bahaya kelaparan akan mengancam penduduk bumi. Terlebih lagi, Malthus juga berpendapat bahwa bahan makanan sangat penting untuk kehidupan manusia sementara nafsu manusia tidak dapat ditahan, termasuk nafsu biologis untuk menghasilkan keturunan.

Dan Brown dalam novelnya berjudul Inferno menggambarkan bahwa

overpopulasi sudah ada di depan mata. Mari tengok sejenak pertumbuhan penduduk kita. Perlu ribuan tahun bagi bumi untuk menggenapkan jumlah penduduk menjadi 1 miliar jiwa. United Nations World Population Prospects juga mencatat jumlah penduduk baru mencapai 1 miliar pada 1804. Padahal, bumi sudah lahir sejak jutaan tahun sebelum masehi.

Lalu, secara menakjubkan, hanya perlu sekitar 100 tahun untuk melipatgandakan populasi menjadi 2 miliar pada 1927. Setelah itu, hanya perlu 50 tahun untuk berlipat menjadi 4 miliar pada 1974. Lalu, kita hanya perlu sampai 2024 untuk menjadi 8 miliar. Sehingga, pada 2048 kita sudah berdesakkan bersama 9 miliar penghuni bumi. Bila kita menghitung luas area biologis yang dibutuhkan manusia dalam memproduksi kebutuhannya (ecological footprint), sesungguhnya bumi sudah kelebihan beban. Laman footprintnetwork.org menghitung, sampai 2008 lalu sebenarnya manusia sudah membutuhkan satu setengah bumi. Dengan angka pertumbuhan seperti saat ini, maka pada 2050 mendatang manusia akan membutuhkan tiga keping bumi untuk menjalani sebuah kehidupan normal.

Dampak Overpopulasi

Beberapa permasalahan kompleks yang akan terjadi jika bumi mengalami overpopulasi yang bisa terjadi yaitu sebagai berikut.

Pertama, Kekurangan lahan tempat tinggal. Setiap manusia pastinya membutuhkan tempat tinggal. Pertumbuhan populasi yang cepat akan menuntut ketersediaan tempat tinggal yang tinggi. Akibatnya akan banyak alih fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya

merupakan lahan pertanian ataupun lahan hijau akan diganti menjadi lahan tempat tinggal. Seiring meningkatnya kebutuhan, pada akhirnya pembangunan lahan tempat tinggal bisa jadi tidak lagi memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

Dampak kedua adalah bencana alam seperti banjir. Hampir tak pernah berhenti kita mendengar berita tentang bencana banjir. Salah satu penyebabnya adalah karena kemampuan luar biasa manusia dalam memproduksi sampah yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk melakukan pengelolannya. Bahkan, seperti kita tahu kumpulan-kumpulan sampah laut atau sampah yang berakhir di lautan dan perairan besar lainnya yang dikenal dengan sebutan The Great Pacific Garbage Patch semakin hari semakin meluas. The Great Pacific Garbage Patch kini meluas dengan ukuran yang sepertinya tidak masuk akal. Dikutip dari laman nationalgeographic.grid.id, kumpulan sampah-sampah plastik yang mengambang di lautan antara Hawaii dan California ini terus membesar hingga berukuran 1,6 juta km². Itu artinya hampir seluas daratan Indonesia (1,6 juta km²).

Bayangkan saja apa yang akan terjadi beberapa puluh tahun mendatang jika tidak ada solusi yang tepat untuk menangani masalah ini. Mungkin seluruh lautan akan tertutup oleh sampah manusia yang semakin hari semakin banyak. Selain itu kebutuhan manusia akan pemukiman yang semakin padat hingga ke bantaran sungai juga bisa menyebabkan banjir. Belum lagi perilaku manusia dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam.

Dampak ketiga yaitu masalah kerawanan pangan. Salah satu dampak terbesar meningkatnya populasi adalah pertanian. Apakah kita dapat menanam

cukup pangan secara berkelanjutan untuk populasi yang terus berkembang? Juga, apakah kita dapat menghadirkan tantangan yang mendesak? Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya populasi baru ini. Dari mana datangnya makanan untuk dua hingga tiga kali lipat orang tambahan ketika kita saat ini saja belum swasembada beras apalagi swasembada pangan? Belum lagi perubahan iklim merusak hasil panen dan cuaca ekstrem mengganggu panen, serta banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Menumbuhkan cukup makanan untuk populasi kita yang terus bertambah akan menjadi tantangan yang sangat besar.

Selanjutnya dampak keempat yaitu masalah polusi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk tentu semakin meningkat juga mobilitasnya. Hal tersebut tentu saja akan menghasilkan peningkatan jumlah kendaraan yang tentu saja akan meningkatkan kadar polusi. Belum lagi polusi dari industri yang tidak ramah lingkungan. Pada akhirnya udara sehat akan menjadi hal yang langka dan mahal untuk didapatkan.

Berikutnya, dampak kelima yaitu penyebaran wabah penyakit. Lihatlah penyebaran Covid-19 saat ini. Tentu penyebaran penyakit yang mewabah akan semakin cepat dan banyak jumlahnya dalam kondisi overpopulasi. Pengendalian wabah akan sulit dilakukan dibandingkan saat jumlah penduduk masih sedikit. Mungkin saja kedepannya akan ditemukan lagi berbagai macam virus baru yang bisa mewabah ke seluruh dunia.

Last but not least, yaitu konflik sosial. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan

berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, konflik antar penduduk dan tindakan-tindakan kriminalitas.

Permasalahan overpopulasi ini tentu harus segera kita atasi supaya kelak tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Cara cepat untuk mengatasi masalah ini tentu saja tidak bisa dengan jalan pintas menghapus setengah populasi. Harus ada cara-cara lain yang lebih beradab.

Sayangnya, ancaman nyata overpopulasi di depan mata nyaris tidak terdengar atau hanya mengendap diruang sunyi. Isu-isu overpopulasi jauh kalah seksi dibandingkan isu-isu politik, ekonomi dan korupsi bahkan isu-isu infotainment. Orang-orang enggan membahas hal yang belum terjadi. Meskipun sebenarnya, masalah overpopulasi harusnya ditangani secara serius selagi masih bisa. Seharusnya pemerintah tidak hanya serius mengurus masalah ekonomi, politik, bencana, dan masalah-masalah hilir lainnya.

Masalah overpopulasi harusnya juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jika tidak, maka ramalan hari esok seperti yang digambarkan Dan Brown dalam novelnya yang berjudul *Inferno* bisa menjadi kenyataan: “Umat manusia, jika tidak terkendali, berfungsi seperti wabah, seperti kanker. Jumlah kita meningkat pada setiap generasi hingga kenyamanan duniawi yang pernah menyehatkan hidup dan persaudaraan kita menyusut sampai habis. Mengungkapkan monster-monster di dalam diri kita, yang bertempur hingga mati untuk memberi makan keturunan kita.”

Menakar Literasi Masyarakat Riau

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 10 MARET 2021



Pada awal tahun 2021 perpustakaan RI menjadikan Riau sebagai tujuan pertama dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat. Provinsi Riau memang memiliki prestasi yang terbilang cukup baik dibandingkan daerah lain. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menyampaikan bahwa angka kegemaran membaca tingkat pelajar untuk Kota Pekanbaru tertinggi se-Indonesia. Ini sejalan dengan data hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang sudah melaksanakan praktik literasi yang cukup menggembirakan dan harus terus ditingkatkan. Upaya meningkatkan literasi sejalan dengan upaya pemberantasan buta huruf. Provinsi Riau sendiri memiliki tingkat buta huruf yang tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kecilnya persentase penduduk buta huruf di Riau. Untuk kategori usia 45 tahun ke atas, persentase penduduk buta huruf sebesar 2,46 persen dan untuk kategori 15-44 tahun hanya sebesar 0,1 persen. Secara umum Provinsi Riau bisa dikatakan telah berhasil menyelesaikan masalah buta huruf.

Salah satu persoalan dalam literasi adalah rendahnya budaya membaca masyarakat. Ada dua sisi yang secara simultan harus ditingkatkan, yakni sisi

hulu dan sisi hilir. Sisi hulu yang dimaksud adalah bagaimana menjadikan membaca sebagai suatu budaya bagi masyarakat Riau itu sendiri. Disini diperlukan sinergitas dari berbagai pihak. Misalnya, untuk meningkatkan minat baca pelajar sangat diperlukan peran guru. Guru dapat memotivasi minat baca siswa melalui cara mewajibkan siswa membaca sebuah buku kemudian dipresentasikan di depan kelas, sebagaimana yang diterapkan di negara Australia. Metode seperti ini cukup efektif untuk menumbuhkan minat baca di kalangan pelajar. Karena bagaimanapun budaya membaca bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba tetapi melalui faktor kebiasaan dan didukung oleh faktor lingkungan sekitar.

Selanjutnya sisi hilir yang dimaksud adalah peran perpustakaan sebagai gudang ilmu. Menurut UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Riau sendiri memiliki sebuah perpustakaan daerah yang sangat megah dengan beragam fasilitas. Gedung yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau ini sangat mudah untuk diakses karena lokasinya yang strategis di pusat kota. Mudahnya akses sarana dan prasarana perpustakaan inilah yang

memberikan dampak peningkatan minat baca masyarakat Kota Pekanbaru. Tetapi bagaimana dengan daerah lain di Provinsi Riau? Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekolah di Riau yang belum memiliki perpustakaan sekolah. Ketiadaan perpustakaan sekolah ini tentu dapat berpengaruh pada rendahnya minat baca siswa.

Layanan perpustakaan keliling seperti ini bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menjangkau masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana yang sudah diterapkan di Kota Dumai dan Kabupaten Siak beberapa tahun belakangan. Perpustakaan keliling memudahkan akses masyarakat yang susah untuk menjangkau fasilitas dan ketersediaan perpustakaan umum yang jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Namun layanan ini juga perlu diiringi dengan menambah armada dan koleksi buku setiap tahunnya.

Namun bagaimanapun, peran orang tua juga menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan. Orang tua sebagai guru dalam meningkatkan minat baca bagi anak dapat distimulus dari sejak kecil, hal ini akan mempermudah anak untuk membiasakan membaca sejak usia dini. Anak-anak akan menjadi gemar membaca jika orang tua di rumahnya suka membaca dan suka membacakan cerita. Orang tua juga berperan memfasilitasi anak untuk membaca dengan menyediakan berbagai buku yang menarik untuk dibaca. Orang tua selayaknya menanamkan minat baca anak secara bertahap. Ketertarikan anak dalam membaca akan menumbuhkan minat baca pada anak dan jika kegiatan membaca itu dilakukan secara konsisten maka akan menumbuhkan budaya membaca itu sendiri. Karenanya peran

orang tua sangat mempengaruhi minat baca generasi ke depan. Pada akhirnya, upaya meningkatkan literasi dan budaya membaca masyarakat Riau membutuhkan peran dan dukungan dari semua pihak. Baik peran pemerintah sebagai penyedia fasilitas, peran guru sebagai motivator, dan peran orang tua sebagai role model dalam kehidupan keluarga.

SKB 3 Menteri, Benarkah Sebuah Solusi?

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

OPI TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 11 MARET 2021



Surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh tiga menteri sekaligus atau yang dikenal dengan istilah SKB 3 menteri menuai banyak pertentangan di kalangan masyarakat. Namundari beberapa poin yang dituangkan dalam SK tersebut, ada satu poin yang menjadi sorotan banyak pihak, yakni peraturan terkait seragam sekolah. Sebegitu urgen kah masalah atribut pakaian ini sehingga harus melibatkan tiga orang menteri sekaligus? Dalam surat keputusan tersebut disampaikan bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu. Bagi pihak sekolah yang melanggar tentunya akan dikenakan sanksi.

Mengecilkan Peran Institusi Pendidikan

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini jelas menimbulkan banyak penolakan dan pertentangan dari berbagai pihak karena terkesan tidak berpihak kepada sekolah sebagai institusi pendidikan. Dengan adanya aturan tersebut berarti pihak sekolah tidak diberikan kewenangan untuk mengatur seragam sekolah peserta didiknya sendiri, padahal dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 jelas sekali disebutkan fungsi lembaga pendidikan sekolah, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Menerapkan peraturan terkait seragam sekolah merupakan bukti upaya pihak sekolah untuk menjadikan peserta didik memiliki akhlak yang mulia.

Sementara isi SKB ini seolah-olah menyerahkan penuh kepada peserta didik maupun orang tua terkait seragam yang hendak digunakan saat bersekolah. Lalu dimana peran sekolah itu sendiri? Guru selaku pendidik tidak diberi kekuatan lagi untuk mengatur siswanya dalam masalah seragam sekolah. SKB ini juga seakan-akan mengecilkan peran guru dan sekolah. Bukankah sekarang ini kita seringkali mendengar berita guru yang dipukul oleh siswanya sendiri? Atau orang tua yang menganiaya guru karena tidak terima anaknya dihukum di sekolah, dan berita sejenis lainnya?

Maka SKB ini justru bukan menjadi solusi tapi menambah permasalahan baru karena makin memberikan peluang bagi peserta didik untuk tidak menghormati guru selaku pendidik dan instansi pendidikan itu sendiri. Jikalau SKB ini dimaksudkan supaya pihak sekolah menjadi toleran terhadap peserta didik yang berbeda keyakinan, maka inilah yang dinamakan toleransi yang kebablasan. Seharusnya poin terkait aturan pemakaian seragam dalam SKB tersebut

lebih dipersempit lagi, yakni pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah tidak boleh memaksakan atribut seragam khas agama tertentu pada peserta didik yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Jika poin itu yang disebutkan dalam SKB maka ini dapat dikatakan adalah sebuah solusi bagi peserta didik ataupun orang tua yang selama ini merasa terpaksa mengenakan seragam sekolah yang tidak sesuai dengan keyakinannya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun peraturan yang ditetapkan dalam surat keputusan ini justru dinilai terlalu berlebihan yang akhirnya malah membuat masalah baru di dunia pendidikan.

Pemerintah Hendaknya Lebih Selektif

Apalagi jika kita melihat kondisi dunia pendidikan saat ini, ada beberapa hal yang lebih urgen untuk dibenahi oleh pemerintah. Seperti proses pembelajaran daring yang selama ini dinilai sangat tidak efektif dan sudah banyak disampaikan oleh orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Pemerintah seharusnya sudah memikirkan metode pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini.

Apakah mungkin pembelajaran dengan metode daring terus dilakukan selama masa pandemi? Lalu siapakah yang bisa memastikan kapan masa pandemi di negeri ini akan berakhir? Ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap wabah Covid-19 melebihi ketakutan terhadap rendahnya kualitas generasi saat ini.

Pemerintah hendaknya lebih selektif dalam memilih permasalahan mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan dan dituangkan dalam sebuah surat sakti yang dinamakan Surat Keputusan. Jangan sampai surat sakti tersebut hanya menjawab

permasalahan yang sebenarnya tidak begitu krusial. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana menjadikan Surat Keputusan tersebut benar-benar menjadi sebuah solusi jitu yang menjawab persoalan pendidikan di negeri ini, bukan malah justru menimbulkan pertentangan dan meresahkan berbagai pihak terutama pihak institusi pendidikan yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai wadah yang legal dalam menanamkan nilai-nilai kepribadian pada generasi yang akan datang.

Menjaga Marwah Petani Riau

Oleh : Robby Junius, SE

TERBIT DI RIAU POS, 12 MARET 2021



“Aku ini sakit, sementara kalian identik dengan pendidikan yang renda, berseminar tentang keadaanku. Aku pekerja kasar dan penghasilannya kecil. ini lapar, sementara kalian menumpuk- Kenyataannya, persepsi ini seakan-akan numpuk laporan tentang keadaanku. terjustifikasi dengan fakta yang ada. Jika Aku ini terlantar, dan kalian masih kita lihat dari tingkat pendidikan petani melakukan konferensi yang kurang berarti. di Riau, berdasarkan data BPS hasil Survei Kalian menyelidiki semua yang menjadi Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018) 75,1 persennya hanya berpendidikan kekhawatiranku, namun sampai sekarang SMP atau lebih rendah. Hal ini seakan aku ini tetap sakit lapar dan terlantar.” menegaskan persepsi bahwa petani (Puisi Ratapan Petani Kecil – Anonymous) mayoritas berpendidikan rendah.

Membaca puisi Ratapan Petani Kecil di atas bisa jadi membuat kita bertanya-tanya, sudah bagaimana kondisi petani di era Industri 4.0 saat ini? Adakah menjadi petani bisa menjadi profesi pilihan para generasi muda? Ataukah menjadi petani hanya menjadi pilihan terakhir demi menyambung kehidupan? Dan bagaimana jika tidak ada lagi? Lalu adakah cara untuk menjaga masa depan para petani?

Nyatanya yang kita jumpai di lapangan saat ini banyak petani yang tidak lagi menginginkan anaknya menjadi petani. Hal ini tentu saja tidak terjadi serta merta, akan tetapi karena para petani telah merasakan pahit dan getirnya menjadi seorang petani, sehingga menjadi petani bukan lagi menjadi sebuah pilihan.

Tentu saja bukan salah para petani. Mereka tentu ingin menaikkan status sosial dilingkungannya. Lihatlah persepsi negatif yang berkembang, petani seakan-akan

Melihat hal ini, tentu saja para orang tua lebih memilih anak-anaknya untuk mencari pekerjaan selain menjadi petani. Lihatlah struktur umur petani saat ini. Masih berdasarkan data SUTAS 2018, di Riau, 54,6 persen petani sudah berumur 45 tahun atau lebih. Ini menunjukkan bahwa para generasi muda kurang berminat terhadap profesi petani.

Kondisi ini diperparah dengan kualitas kesejahteraan para petani itu sendiri. Kita ambil contoh para petani padi, berdasarkan data SUTAS 2018, dari 84,7 ribu rumah tangga padi, rata-rata mereka hanya menguasai lahan sawah seluas 0,06 hektar. Dengan kondisi seperti ini, petani tidak dapat lagi memaksimalkan produksi di lahannya yang terbatas. Tentu saja hal ini menjadi salah satu pemicu yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Dengan kondisi lahan yang terbatas, produksi padi yang dihasilkan pun belum bisa maksimal. Dari rilis BPS Riau tentang Luas Panen dan Produksi Padi pada 1 Maret 2021, produksi padi tahun 2020 sebesar 243,69 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,55 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 230,87 ribu ton GKG. Sayangnya hal ini belum tentu bisa dipertahankan pada tahun ini. Potensi panen Januari – April tahun ini diperkirakan hanya 85,38 ribu ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 21,20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang sebesar 108,35 ribu ton GKG. Artinya produksi yang dihasilkan oleh petani belum bisa stabil, masih terjadi naik turun.

Dampak Berkurangnya Petani

Dengan semakin menuanya para petani dan kurangnya regenerasi, lalu apa akibatnya terhadap tatanan kehidupan masyarakat? Pertama, kita akan menjadi ketergantungan terhadap impor pangan. Jika petani semakin berkurang, pemerintah tentunya akan semakin ketergantungan terhadap impor pangan. Di Indonesia sendiri ketersediaan pangan dalam negeri tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduknya.

Kedua, kenaikan harga pangan. Tidak ada petani, tidak ada pangan. Itu artinya ada ketimpangan antara ketersediaan dengan pasokan, maka akan terjadi kelangkaan bahan pangan dan menjadi mahal.

Ketiga timbulnya kekacauan. Dengan berkurangnya petani, kebutuhan pangan menjadi hal yang sulit dipenuhi. Pemerintah tentu saja bertanggungjawab untuk pemenuhan hak pangan rakyatnya. Jika petani semakin berkurang dan pemerintah

tidak mampu memenuhinya tentu akan berpotensi menimbulkan kekacauan yang tidak berkesudahan.

Sungguh ironis, disaat keberadaan petani memiliki posisi vital dalam keberlangsungan hajat hidup orang banyak, akan tetapi profesi petani masih terstigma berada di kasta bawah, tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan jika petani tidak ada.

Upaya Menaikkan Kesejahteraan dan Marwah Petani

Petani sebagai ujung tombak penyedia kebutuhan pangan di negeri ini harus diletakkan pada posisi yang terhormat. Rumah tangga petani harus terjaga kesejahteraannya, sebelum memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sebab bagaimana mungkin kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi, jika rumah tangga petani saja belum terpenuhi kebutuhannya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, harus ada solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Perlu perbaikan mulai awal pra tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen. Terobosan inovasi teknologi pertanian di era modern ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

Hal-hal yang bisa dilakukan, pertama, rangkul para petani dan tingkatkan keterampilan mereka. Berikan dorongan dan insentif agar petani semangat dan termotivasi kembali ke sawah untuk meningkatkan produksinya.

Kedua, berikan petani ilmu pengetahuan dalam penanganan hama

penyakit. Hama merupakan hal yang seringkali menjadi dikeluhkan petani. Sungguh menyedihkan melihat petani hanya bisa pasrah menerima serangan hama penyakit, karena tidak memahami cara penanganannya. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan petani bisa mengantisipasi sebelum terserang hama penyakit dan menanggulangi secara tepat dan lebih awal jika ada serangan hama.

Ketiga, beri jaminan ketersediaan pupuk dengan harga murah lalu ajarkan petani cara penggunaan yang efektif dan efisien. Selama ini petani melakukan pemupukan hanya seadanya. Kalaupun dipupuk, belum tentu pemupukan tepat sasaran dan tepat guna. Seringkali juga petani mengeluhkan tidak sanggup membeli pupuk.

Keempat, saat ini masih banyak petani di Riau yang hanya panen sekali dalam setahun, sekedar memenuhi kebutuhan keluarganya saja. Dalam hal ini, pemerintah mungkin bisa mendorong para petani untuk meningkatkan frekuensi panen, minimal dua kali panen dalam setahun. Sehingga hasilnya tidak hanya untuk konsumsi keluarga, tapi bisa dijual untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kelima, penyediaan sarana prasarana pertanian. Untuk pertanian padi, ketersediaan air merupakan hal yang vital. Pemerintah bisa membangun atau memperbaiki jaringan irigasi yang sudah ada. Selain itu, juga bisa menyediakan pompa air untuk lahan-lahan pertanian yang tidak terjangkau oleh jaringan irigasi. Kemudian penyediaan alat-alat mesin pertanian bagi petani. Terkadang petani terkendala dalam mengolah lahan, karena menunggu giliran lahannya di bajak, akibat mesin bajak yang terbatas. Begitu juga

perontokkan padi pascapanen, masih ada antrian dikarenakan mesin perontok yang terbatas. Sehingga banyak yang melakukan perontokan secara manual. Tentu saja akan memakan waktu dan tenaga yang lebih besar.

Keenam, jaminan ganti biaya bagi petani jika terjadi gagal panen. Tidak ada jaminan komoditas yang diusahakan petani akan selalu berhasil, karena bisa saja terjadi puso. Jangan biarkan petani menanggung hal ini sendiri. Selama ini petani menjadi pahlawan dengan menyediakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional, maka sudah saatnya petani juga diberi perhatian saat mengalami gagal panen. Perhatian ini bisa berupa bantuan benih untuk penanaman kembali, insentif pengganti biaya tanam dan lainnya.

Ketujuh, pemanfaatan teknologi pertanian dan pendampingan dalam penerapannya. Saat negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand berjaya dengan teknologi pertaniannya, kita masih berkutat dengan sekali panen dalam setahun. Sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan tersebut. Pemanfaatan teknologi pertanian bisa menjadi solusi. Saat ini sudah sulit menambah luasan lahan pertanian, bahkan yang ada pun terancam alih fungsi menjadi pemukiman. Maka, yang harus ditingkatkan adalah produktivitasnya. Akan tetapi teknologi saja hanya akan menjadi percuma, jika tidak diberikan pendampingan dan pemahaman kepada petani dalam penerapannya.

Terakhir, penyediaan lembaga yang membantu penyerapan hasil panen petani. Harga ditingkat petani seringkali berbeda jauh dengan harga ketika sudah sampai di pasar. Pemerintah bisa mengambil peranan untuk menjaga kestabilan harga ditingkat

petani, terutama saat musim panen, dengan cara membentuk badan usaha untuk menyerap dan memasarkan hasil pertanian petani.

Mungkin suara-suara para petani ini tidak nyaring terdengar karena mereka tidak punya sesuatu yang bisa menyuarakan aspirasi mereka. Jangan hanya lihat senyum mereka saat panen raya, tapi juga dengarkan ratapan mereka saat gagal panen melanda.

Tanpa mereka sadari, hidup mati bangsa ada di tangan petani. Tanpa pertanian kalian kelaparan, tanpa pertanian takkan ada masa depan. (Potongan puisi Calon Petani Berdasi – Nurfitriani).

<https://riau.bps.go.id>

SKB Tiga Menteri Saat Masih Banyak Anak Tak Mampu Sekolah

Oleh : Robby Junius, SE

OPINI TERBIT DI THECOLUMNIST.ID ,18 MARET 2021



Belum lama ini tepatnya pada tanggal 3 Februari 2021 pemerintah menerbitkan aturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas tentang penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda, di mana sebagian besar anak masih bersekolah dari rumah, ditambah lagi himpitan kesulitan ekonomi, agak aneh jika melihat pemerintah sampai mengeluarkan SKB tiga menteri yang mengatur tentang seragam sekolah, yang justru memicu polemik. Hal ini seharusnya tidak perlu, karena sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 yang pada Pasal 3 Ayat 4 huruf d menetapkan bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

Jika kita lihat dari SKB tersebut, yang paling memicu perdebatan yaitu diktum ketiga yang berbunyi “Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan,

mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”.

Menyikapi diktum ketiga pada SKB 3 Menteri, ada hal yang perlu diapresiasi dan dikritisi. Pertama hal yang perlu diapresiasi dari diktum ketiga tersebut, yaitu pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu. Hal ini patut diapresiasi karena memberi perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik untuk berpakaian sesuai tuntunan agamanya masing-masing dan tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah dan sekolah.

Memang tidak pantas kalau ada sekolah yang melakukan pelarangan peserta didiknya untuk menggunakan seragam dan atribut sesuai keyakinannya. Karena sekolah sebagai lembaga pendidikan semestinya memberikan contoh yang baik, mendorong agar para siswa mau melaksanakan ajaran agamanya secara baik. Sampai disini, SKB tiga menteri ini patut diapresiasi.

Namun diktum ketiga tersebut perlu juga dikritisi dan nyatanya memang menimbulkan polemik. Polemik tersebut bermula dari ketentuan yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan,

mensyaratkan, mengimbuu penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Hal ini mungkin tidak akan menjadi polemik jika yang tidak diperbolehkan tersebut adalah mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan penggunaan pakaian seragam dan atribut kekhasan agama tertentu terhadap peserta didik yang berlainan agama. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan terhadap peserta didik yang seagama, semestinya pemerintah tidak perlu melarang, bahkan sampai menuangkannya dalam SKB Tiga Menteri.

Pemerintah semestinya cukup memastikan saja tidak ada pemaksaan atribut keagamaan tertentu terhadap pemeluk agama yang berbeda atau memastikan kebebasan setiap peserta didik dalam menjalankan keyakinannya. Di sisi lain jika misalnya sekolah memandang perlu menerapkan aturan berpakaian dalam rangka mendidik dan mengajarkan pembiasaan hal yang sesuai ketentuan agama kepada siswanya, semestinya pemerintah tidak perlu ikut campur. Misalnya sekolah menerapkan aturan wajib jilbab bagi siswi muslimah, bisa jadi hal itu adalah pembiasaan dan pembentukan karakter bagi peserta didik tersebut. Pembentukan karakter bisa dilakukan melalui pembiasaan yang diharapkan akan menjadi kesadaran dan kebutuhan.

Perhatikan Siswa Tidak Mampu

Saat ini, fokus pemerintah semestinya tidak kepada persoalan seragam. Pemerintah sebaiknya memikirkan bagaimana strategi meningkatkan mutu pendidikan. Setahun bersekolah tanpa tatap muka (sekolah daring) nyatanya menyimpan masalah. Belum tentu materi-materi yang diberikan oleh guru dapat terserap dengan baik oleh para siswa.

Bagaimana kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak sekolah inilah yang semestinya harus dirisaukan, bukannya sibuk mengatur soal seragam.

Alih-alih menerbitkan SKB tiga menteri soal seragam, ada baiknya pemerintah saat ini fokus memikirkan kelangsungan pendidikan anak-anak tidak mampu. Dikutip dari laman mediaindonesia.com (16 Juni 2020) data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4,5 juta. Jumlah yang masih sangat banyak, bahkan melebihi jumlah penduduk Provinsi Bali hasil Sensus Penduduk 2020 BPS.

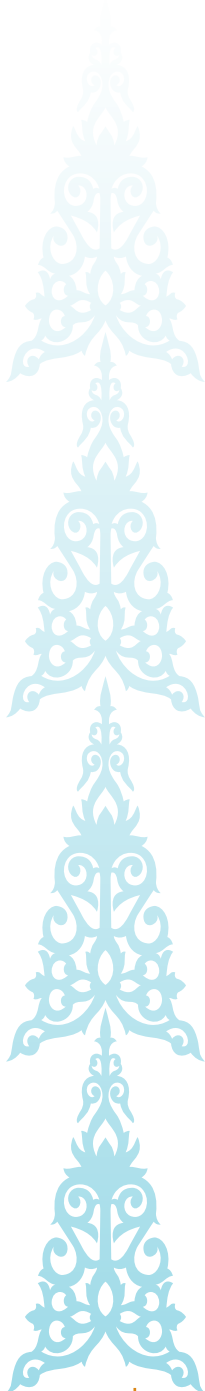
Pemerintah lebih baik melakukan penelitian mengenai penyebab anak-anak putus sekolah dan mencari solusi terbaik untuk menekan angka anak putus sekolah dibandingkan menerbitkan SKB tiga menteri tentang seragam. Bahkan bisa jadi justru ketidakmampuan dalam membeli seragam juga merupakan salah satu pemicu anak berhenti sekolah.

Semoga, SKB tiga menteri ini tidak lagi menimbulkan polemik dan pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib jutaan anak-anak yang tidak lagi bersekolah. Sungguh sangat disayangkan, jika nantinya mutiara-mutiara tersebut harus terus berkubang di dalam lumpur kemiskinan dan ketidakberdayaan, hanya karena harus berhenti sekolah. Alangkah mulianya jika pemerintah bisa berempati terhadap anak-anak yang tidak mampu dan mendengar jeritan mereka yang ingin bersekolah.

“Kumenunggu di tepi sekolah yang teduh. Banyak cerita yang aku dapat di sana. Hati ini menjerit tanda ku berhasrat. Andaikan aku punya uang tuk sekolah. Ku

ingin sekolah seperti mereka, tuk gapai cita
cita bahagiakan orang tua. Ku ingin sekolah
seperti temanku, tuk selalu bersama
menghapus kemiskinan” (Jerit hati anak
putus sekolah - Rangga Pramudya)

<https://riau.bps.go.id>



Melihat Produksi Padi Kuantan Singingi

Oleh : Robby Junius, SE

OPINI MEDIA TERBIT DI HALUANRIAU , 20 MARET 2021



Padi merupakan komoditas strategis bagi Indonesia, mengingat sampai saat ini, nasi yang merupakan olahan dari padi merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk menyusun perencanaan yang baik diperlukan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Senin, 1 Maret 2021 yang lalu, terjadi peningkatan produksi yang relatif besar di Kabupaten Kuantan Singingi. Jika produksi padi pada tahun 2019 sebesar 19.321,74 ton-GKG maka pada tahun 2020 produksi padi meningkat menjadi 27.197,76 ton-GKG. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 40,76% atau setara dengan 7.876,02 ton-GKG.

Faktor dominan yang menyebabkan kenaikan produksi tersebut yaitu terjadinya peningkatan pada luas panen tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Jika pada tahun 2019 luas panen padi seluas 5.405 hektar, maka pada tahun 2020 luas panen padi meningkat menjadi 8.091 hektar. Artinya ada penambahan luas panen padi sebesar 49,7% atau setara dengan 2.686 hektar. Hal yang sangat menggembirakan tentu saja, meskipun tentu saja masih belum bisa menjadikan swasembada beras untuk Kabupaten Kuantan Singingi.

Peningkatan ini merupakan keberhasilan para pihak (baik petani maupun pemerintah) untuk meningkatkan jumlah panen di sebagian besar lahan padi sawah yang semula hanya satu kali panen per tahun, menjadi dua kali panen setahun. Peningkatan panen pada Oktober-Desember 2020 terjadi karena petani bersedia melakukan penanaman lebih awal, yaitu pada bulan Juli-Agustus 2020 sehingga bisa dipanen pada akhir tahun 2020. Hal ini tentu patut diapresiasi, karena pada tahun 2019, padi yang ditanam pada akhir tahun baru bisa dipanen pada awal tahun 2020.

Nah, bagaimana jika kita lihat pada tahun ini? Sayangnya prospeknya terlihat kurang begitu menggembirakan. Masih berdasarkan rilis BPS Provinsi Riau, angka sementara produksi padi di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari-April 2021 hanya 3.686,29 ton-GKG, jauh lebih kecil dibanding periode yang sama pada tahun 2020 yaitu sebesar 10.692,49. Semestinya ini menjadi alarm dini bagi para pihak, bahwa mempertahankan jauh lebih sulit daripada mencapai peningkatan produksi.

Hal yang akan menjadi tantangan untuk mempertahankan produksi padi adalah bagaimana mendorong petani untuk segera melakukan penanaman kembali pada lahan yang telah dipanen

pada periode Oktober-Desember tahun 2020 sebelum berakhirnya triwulan pertama 2021 ini. Jika para pihak lengah, dan penanaman kembali lahan yang telah panen pada periode Oktober-Desember 2020 menunggu setelah Idul Fitri, maka hal itu akan menjadi ancaman yang nyata dalam usaha untuk mempertahankan produksi padi di Kabupaten Kuantan Singingi, karena lahan yang sudah berhasil ditingkatkan menjadi dua kali panen pada tahun 2020, bisa jadi kembali hanya bisa panen satu kali pada tahun 2021. Semestinya untuk mempertahankan luasan panen pada tahun ini, lahan yang baru panen pada akhir 2020, harus segera ditanam kembali pada awal 2021 ini.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan peran aktif pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian padi. Perhatian pemerintah tersebut bisa dalam hal pemberian subsidi pupuk, bantuan benih, insentif tanam, penyediaan alat dan mesin pertanian. Akan tetapi perhatian pemerintah yang dibutuhkan petani bukan hanya berfokus dalam segi sarana dan prasarana saja, tetapi juga tidak kalah penting pemberian motivasi, bimbingan teknis dan pemantauan secara terus menerus sehingga petani merasa diperhatikan.

Pemerintah desa juga bisa sangat berperan dalam membantu petani padi, terutama dalam hal penyerapan dan pemasaran hasil pertanian padi tersebut. Salah satu caranya bisa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMdes diharapkan bisa bersinergi dengan petani atau kelompok tani. Dengan potensi yang ada BUMDes bisa diarahkan untuk membantu memasarkan hasil produksi. BUMDes yang

menjadi tempat penampung sekaligus pemasaran. Nantinya, BUMDes juga bisa berperan dalam menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan petani. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan petani pun akan menjadi semakin termotivasi untuk kembali ke sawah.

Tidak mudah untuk meraih peningkatan, akan tetapi jauh lebih sulit untuk mempertahankan. Butuh usaha, kerja keras dan kepedulian para pihak.

Ironis: Antara Ketahanan Pangan dan Sampah Makanan

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TERBIT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID , 21 MARET 2021



“Gemah Ripah loh Jinawi”.

Ungkapan kalimat ini memiliki arti tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Suatu cerminan keadaan bangsa Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam yang besar termasuk sumber bahan makanan. Sampai-sampai ada istilah “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

Tetapi, sangat ironis. Meskipun memiliki potensi sumber bahan makanan yang besar, ketahanan pangan Indonesia masih dianggap tidak terlalu baik. Dan tidak hanya itu, situasi justru diperparah dengan banyaknya sampah sisa makanan yang dihasilkan. Suatu gambaran permasalahan yang sangat lengkap di negeri kita tercinta.

Ketahanan Pangan

Berdasarkan UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Seperti apa kondisi ketahanan pangan Indonesia?

Dari hasil penelitian yang dilakukan

oleh The Economist Intelligence Unit terhadap kinerja ketahanan pangan pada 113 negara di dunia, dihasilkan angka Global Food Security Index 2020 (GFSI 2020). Posisi teratas diduduki oleh negara Finlandia, sedangkan Indonesia menempati urutan 65 yang turun dari tahun sebelumnya di peringkat 62. Posisi ini jauh di bawah negara tetangga Singapura dan Malaysia yang berada di urutan ke 20 dan 43. Bahkan Vietnam pun menempati urutan ke 63, sedikit di atas Indonesia (foodsecurityindex.eiu.com).

Dari hasil tersebut, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengungkapkan, “Turunnya posisi Indonesia ini (GFSI 2020) dari posisi 62 ke posisi 65, mencerminkan masih perlunya upaya keras Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan” (idntimes.com, 14/03/2021).

Indonesia sebagai negara terluas di Asia Tenggara memiliki luas wilayah sebesar 5,19 juta KM², terdiri dari luas daratan sebesar 1,92 juta KM² dan lautan seluas 3,27 juta KM². Dengan posisinya yang berada di wilayah khatulistiwa dan memiliki banyaknya gunung berapi, menjadikan Indonesia sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi dan memiliki tanah yang kaya akan mineral dan subur. Kondisi ini sangat baik untuk pertanian. Julukan sebagai salah satu negara megadiversitas

pun menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya pangan yang beragam dan dalam jumlah besar di dunia.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan banyak pihak menunjukkan, Indonesia memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, dan gula sebagai sumber karbohidrat; 100 spesies tanaman kacang-kacangan sebagai sumber protein dan lemak; 70 spesies bumbu dan rempah; 40 spesies tanaman bahan minuman; dan 940 spesies tanaman obat tradisional (BKP, 2016). Tidak kalah besarnya, potensi hewan ternak sebagai penghasil daging pun sangat besar di Indonesia. Demikian juga dengan potensi perikanan yang bernilai produksi mencapai 38,3 juta Ton di tahun 2019.

Dengan potensi sumber daya pangan yang begitu besar. Harusnya Indonesia memiliki kesempatan untuk dapat memanfaatkan dan mengelolanya secara maksimal, baik sebagai bahan pangan untuk memasok kebutuhannya sendiri atau untuk negara lain jika berlebih. Bukan sebaliknya, dengan dalih jumlah produksi dalam negeri tidak mencukupi dan sebagai upaya untuk memenuhi cadangan kebutuhan bahan pangan maka dilakukanlah impor bahan pangan. Sering kali kondisi ini tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Dilansir melalui media cnbcindonesia.com (18/04/2020), terdapat sebelas kebutuhan pokok yang ditetapkan Kementan dan diawasi stoknya. Kebutuhan pokok tersebut adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging kerbau/sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, serta minyak goreng. Kendati kondisinya masih memiliki surplus yang cukup besar, tetap saja impor dilakukan untuk menghindari kelangkaan kebutuhan pokok.

Ketahanan pangan menjadi sangat penting karena mempengaruhi status gizi. Rendahnya ketahanan pangan mengakibatkan status gizi pun jadi berkurang dan berdampak kepada turunnya derajat kesehatan. Malnutrisi, stunting, underweight pada anak-anak mengakibatkan tumbuh kembang anak terhambat dan dampak jangka panjangnya adalah berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Tidak hanya anak-anak, rendahnya ketahanan pangan yang menyebabkan kekurangan gizi atau kurangnya asupan gizi pada ibu hamil akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Efek yang dihasilkan adalah terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan stunting pada bayi. Hal ini juga berdampak kepada kualitas SDM di masa yang akan datang.

Sampah Makanan

Sampah makanan terdiri dari dua jenis yaitu food loss dan food waste. Food loss terjadi pada tahapan produksi. Sedangkan food waste merupakan makanan yang layak dikonsumsi tetapi terbuang pada tahap eceran atau konsumsi akhir, misalnya makanan yang tidak habis dimakan, tidak matang, kadaluarsa. Biasanya dihasilkan oleh rumah tangga, hotel, restoran, catering, dan lainnya.

Jika dilihat dari komposisinya, 60 persen sampah yang dihasilkan di Indonesia adalah sampah organik yang didalamnya terdapat sampah sisa makanan. Program lingkungan PBB (UNEP) memperkirakan Indonesia memproduksi 20,9 juta ton sampah makanan rumah tangga setiap tahunnya atau masyarakat di Indonesia membuang sampah makanan sekitar 77

Kg/kapita setiap tahun. Karena capaian tersebut, Indonesia mendapat julukan sebagai produsen terbesar sampah makanan rumah tangga di Asia Tenggara (databoks, 8/302021).

Jika kita kalkulasi dan konversi ke dalam nilai rupiah, sampah yang dihasilkan dalam satu tahun setara dengan nilai 27 triliun yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah populasi penduduk miskin di Indonesia yang sebesar 26,42 juta orang. Padahal jika saja kita bisaantisipasi, tidak akan sebanyak ini sampah makanan yang dihasilkan. Jika dimanfaatkan, sampah makanan ini bisa diolah menjadi pakan ternak (dbs.com, 27/8/2020).

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya sampah makanan seperti, terlalu banyak menyimpan sehingga makanan menjadi kadaluarsa, konsumsi yang berlebihan karena lapar mata, gengsi atau malu karena takut dianggap lapar atau takut dianggap pelit jika harus membawa makanan yang berlebih dan tidak habis.

Dalam ajaran Agama Islam, salah satu adab makan yang benar adalah jangan menyisakan makanan dalam piring termasuk yang melekat pada jari. Seperti yang terdapat dalam Shahih Muslim dari Anas Radhiyallahu anhu, “Apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka bersihkanlah kotoran darinya, lalu makanlah dan janganlah membiarkannya untuk dimakan oleh syaitan!”. Dan beliau memerintahkan kami untuk membersihkan piring (dengan menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada), beliau bersabda, “Karena kalian tidak mengetahui di bagian makanan kalian yang manakah keberkahan itu berada.” (HR. Muslim).

Akibat yang ditimbulkan dari sampah sisa makanan dalam jumlah yang sangat besar adalah kerusakan lingkungan. Gas metana yang dihasilkan dapat menyebabkan pemanasan global karena termasuk Gas Rumah Kaca (GRK). Belum lagi air dan bahan bakar yang digunakan menjadi sia-sia dan terbuang percuma.

Mari kita memperhatikan apa yang kita makan, konsumsi secukupnya dan berupaya untuk tidak membuang-buang makanan. Ingat, masih banyak yang mengalami kekurangan makanan dan membutuhkan makanan. Pun jika sudah terlanjur menjadi sampah, sebaiknya kita lakukan pengolahan dan manfaatkan lebih lanjut. Dengan demikian, sampah makanan dapat berkurang dan ketahanan pangan negara kita menjadi lebih baik lagi.

“kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah. Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa harus ambil dua?” (Emha Ainun Nadjib).

Mampukah UMKM Riau menembus Pasar Ekspor?

Oleh : Agus Nuwibowo
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 22 MARET 2021



Seperi kita diketahui bersama, pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tak terkecuali Provinsi Riau sebagai bagian dari wilayah di Indonesia yang memiliki PDRB terbesar ke 6 di Indonesia. Salah satu kegiatan ekonomi yang paling terdampak oleh Pandemi ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang diberlakukan di hampir semua wilayah di Indonesia telah menekan gerak dan langkah UMKM dalam menjalankan usahanya. Keterbatasan modal dan segmen pasar yang masih bersekala lokal juga menjadi salah satu penyebabnya.

Namun ditengah pandemic covid-19 ini justru kinerja ekspor Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Sejak bulan Juli 2020, nilai ekspor Riau terus mengalami peningkatan, bahkan pada bulan Januari 2021 ekspor Riau mencapai nilai tertinggi dalam kurun 7 tahun terakhir, kemudian mengalami penurunan di bulan Februari tetapi nilainya masih di atas US\$ 1 miliar. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada 15 Maret 2021 merilis bahwa angka Ekspor Riau Februari 2021 sebesar US\$ 1,11 miliar, mengalami penurunan sebesar 27,83 persen dibandingkan Januari 2021. Nilai tersebut masih cukup tinggi, dan jika dikurangi dengan nilai impor, Provinsi Riau masih mengalami surplus perdagangan

luar negeri sebesar US\$ 1,01 Miliar.

Peningkatan ekspor ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga menjadi titik balik dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Riau, setelah tingkat kemiskinan mengalami peningkatan 0,22 persen poin dibulan September 2020.

Peningkatan ekspor Riau memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan masyarakat. Barang-barang ekspor yang didominasi oleh minyak kelapa sawit, produk kimia dan turunannya, bubur kayu dan kertas, merupakan hasil dari industri besar, sehingga tidak terkait langsung terhadap pendapatan masyarakat namun setidaknya akan memperkuat perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup para karyawannya. Disisi lain, bahan baku berupa kelapa sawit sebagian juga diperoleh dari petani perkebunan rakyat sehingga praktis meningkatkan pendapatan petani perkebunan. Disinilah UMKM dapat berperan sebagai penunjang kegiatan dari Perusahaan Besar, baik sebagai Petani, pedagang pengumpul, angkutan bahan baku, sampai supplier kebutuhan perusahaan atau pertanian.

Untuk terlibat dalam perdagangan ekspor, UMKM tidaklah harus masuk dalam perdagangan internasional. Dalam konsep

penghitungan PDRB, perdagangan antar provinsi juga masuk dalam perdagangan ekspor antar wilayah. Potensi ini yang masih memiliki ruang yang cukup luas untuk UMKM.

Berbeda dengan perdagangan Luar Negeri, Provinsi Riau masih mengalami devisa pada perdagangan antar wilayah. Hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan selama periode tahun 2019 perdagangan antar wilayah provinsi Riau mengalami devisa perdagangan sebesar 19,28 triliun. Untuk menutupi kekurangan dari produksi local, kita masih melakukan impor barang dari luar wilayah provinsi Riau di hampir semua komoditas yang dibutuhkan masyarakat, seperti bahan makanan, rokok, perlengkapan/peralatan rumah tangga, obat2an dan barang pribadi lainnya. Sedangkan untuk perdagangan ekspor antar wilayah pada komoditas yang berasal dari provinsi Riau masih didominasi industri besar, seperti santan kemasan, bahan bakar minyak, Kertas HPS, minyak Goreng/CPO padahal banyak komoditas yang mungkin dapat dikelola UMKM seperti pinang, karet, tepung sagu, makanan ringan dll. Disamping itu, pedagang pengumpul hasil pertanian/perkebunan juga dapat memberikan kontribusinya dalam perdagangan antar wilayah.

Untuk dapat meningkatkan kinerja UMKM Riau, terutama agar dapat memiliki peranan dalam perdagangan ekspor, tentunya diperlukan kehadiran Pemerintah Daerah ditengah-tengah UMKM Riau, bukan hanya pada bantuan modal atau stimulus, tetapi juga pembinaan dalam pengembangan dan pemasaran produknya.

Akhirnya kita dapat berharap kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau yang memiliki posisi strategis dalam pemulihan ekonomi Riau ditengah Pandemi Covid-19 melalui kebangkitan UMKM.

Menyoal Nasib Petani Karet

Oleh : Robby Junius, SE

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 23 MARET 2021



Aku adalah seorang petani
Namun menjadi petani saat ini
Sama halnya memilih mati”

(Penggalian Sajak Petani Karet –
Pringadi Abdi Surya)

Pak Badu, sebut saja begitu, sudah cukup lama menjadi petani karet di Teluk Kuantan. Dari hasil perkebunan karetnya, Pak Badu bisa menyekolahkan lima orang anaknya, bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Suatu hal yang wajar, karena dulu harga bahan pengolah karet (bokar) pernah menyentuh harga di atas dua puluh ribu rupiah per kilogram. Akan tetapi, saat ini Pak Badu sudah tidak bisa lagi bergantung kepada hasil perkebunan karet. Selain sebagian besar tanaman karetnya sudah berumur tua dan kurang produktif, alasan utamanya adalah karena harga bokar di tingkat petani yang tidak kunjung naik seperti dulu lagi. Cukup lama harga bokar bertahan di bawah sepuluh ribu rupiah. Meskipun akhir-akhir ini harga bokar sudah mulai membaik, akan tetapi tidak ada jaminan perbaikan harga itu akan bertahan.

Alhasil, Pak Badu pun mulai berangsur-angsur menebang pohon karetnya dan menggantinya dengan komoditas lain seperti kelapa sawit. Akan tetapi, tidak semua petani karet mampu melakukan hal ini. Banyak juga yang mau tidak mau tetap mengusahakan kebun karetnya karena

tuntutan hidup dan ketiadaan modal untuk beralih ke komoditas lain.

Karet masih menjadi tempat menggantungkan kehidupan bagi lebih dari 173 ribu rumah tangga di Provinsi Riau (Hasil SUTAS 2018 BPS). Selain bermanfaat sebagai tumpuan kehidupan petani, karet merupakan komoditas perkebunan yang ramah lingkungan. Tanaman karet ternyata bermanfaat bagi lingkungan hidup.

Dikutip dari laman iribb.org (23 Agustus 2017) beberapa manfaat tanaman karet bagi lingkungan diantaranya: tanaman karet dapat berperan dalam reboisasi dan rehabilitasi lahan, bisa mengurangi emisi rumah kaca, serta mencegah asap dan polusi udara yang buruk bagi kesehatan. Selain itu, perkebunan karet juga dapat mengatasi banjir, tanah longsor, dan semua masalah lingkungan yang disebabkan oleh kondisi tanah yang tidak stabil.

Sayangnya masa depan para petani karet tahun-tahun belakangan ini terlihat suram. Jika dulu musuh petani karet adalah intensitas hujan yang tinggi, saat ini ada yang lebih ditakuti petani, yaitu anjloknya harga getah karet. Para petani menjerit karena harga getah karet tidak lagi menyentuh angka sepuluh ribu rupiah. Bahkan, para petani yang sempat menikmati masa-masa keemasan berkebun karet, saat ini pun yang mulai lupa kapan terakhir mereka bisa

menikmati harga yang pantas.

Gesa Pembangunan Industri Hilir Karet

Di tengah kesulitan para petani karet, pemerintah tentunya tidak boleh lelah dalam memikirkan nasib mereka. Harus selalu dicari langkah-langkah untuk dapat memperjuangkan nasib mereka. Salah satu langkah strategis yang perlu digesa pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup para petani karet adalah pembentukan industri hilir karet. Saat ini, mayoritas pengolahan boka masih sebatas produk antara.

Padahal industri hilir karet semisal industri ban, vulkanisasi, alas kaki, dan alat-alat keperluan rumah tangga merupakan komoditas yang penting dalam keseharian masyarakat. Industri hilir karet tidak harus dimulai dalam skala besar, tetapi bisa diawali dengan pembentukan skala kecil dan menengah.

Dibentuknya industri hilir karet akan mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani karet. Selain itu, juga akan membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Tentunya untuk membentuk industri hilir karet, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, dari sektor hulu harus ada jaminan ketersediaan bahan baku (boka) bagi industri hilir. Untuk itu, alih fungsi lahan dari karet menjadi komoditas lain harus dicegah. Cara pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan stimulus kepada para petani karet dalam bentuk bantuan seperti pupuk, pestisida dan peralatan lainnya yang dibutuhkan petani. Bantuan berupa bibit unggul yang bersertifikat juga diharapkan mampu mencegah petani mengganti tanaman

karet yang sudah tua dengan komoditas lainnya.

Tentunya, agar bantuan ini tidak disalahgunakan, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap bantuan tersebut. Tujuannya agar pupuk, pestisida dan bantuan lainnya tidak digunakan untuk jenis tanaman lainnya. Untuk menjaga kelangsungan perkebunan karet, maka diperlukan juga jaminan kestabilan harga yang bersaing.

Secerach harapan terlihat terbit dari Kabupaten Kuantan Singingi yang mungkin bisa diikuti daerah-daerah lainnya. Saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi boka dipasarkan ke beberapa wilayah dengan menggunakan sistem lelang bersama satu waktu satu tempat satu harga satu mutu (4S). Sistem lelang 4S ini telah dilakukan oleh Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (APKARKUSI).

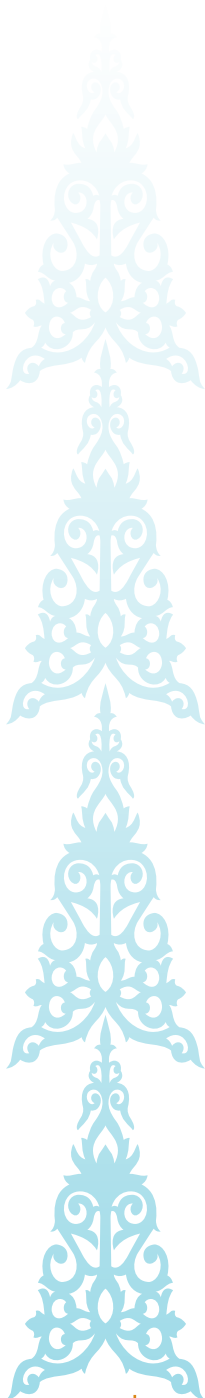
Dampak dari sistem lelang ini mampu meningkatkan harga boka dibandingkan harga biasanya. Dikutip dari laman riaonline.co.id (Selasa, 16 maret 2021) harga lelang karet yang dilakukan APKARKUSI sudah menyentuh Rp 12.186. Tentunya harga ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga boka ketika petani menjualnya ke penampung-penampung biasa. Selisihnya bahkan bisa menyentuh 1000-2000 rupiah. Keberadaan asosiasi para petani karet seperti APKARKUSI ini haruslah terus dikembangkan dan dijadikan percontohan.

Kedua, memberikan kepastian usaha dan kemudahan bagi investor. Para investor tentunya akan berhitung untuk berinvestasi dalam sektor industri hilir karet. Salah satunya adalah dari prosedur, perizinan dan biaya yang harus

dikeluarkan untuk memulai bisnis industri hilir tersebut. Proses perizinan harus jelas, transparan dan terukur baik dari segi waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, infrastruktur jalan sebagai sarana pengangkutan produk juga harus diperhatikan. Jalan di sini bukan hanya dalam bentuk jalan tol dan jalan-jalan nasional, tetapi juga pembangunan jalan-jalan kecil lainnya.

Ketiga, memperkuat keberadaan industri hilir karet dengan membantu penyerapan produk hasil industri hilir karet tersebut. Pemerintah mungkin bisa membuat kebijakan untuk menggunakan produk tersebut sebagai produk utama bagi kebutuhan-kebutuhan di wilayah pemerintahan. Misalnya, mewajibkan penggunaan ban kendaraan dinas pemerintah dari produk industri lokal tersebut. Atau mungkin kebijakan untuk memberikan potongan pajak kendaraan bagi pengguna ban dari produk industri lokal tersebut.

Terakhir, tentunya kita berharap kedepannya nasib para petani karet dapat meningkat seiring dengan peningkatan harga getah karet. Diharapkan pula pembangunan industri hilir karet bisa direalisasikan. Bukan sekedar berhenti sampai tahapan wacana saja.



Nasib Beras Riau

Oleh : Irfarial, SE

TERBIT DI MEDIA RIAU POS, 24 MARET 2021



Sebelum Riau diserbu oleh tanaman sawit, Beras Riau dahulunya sangat terkenal di daerahnya. Misalnya beras yang berasal dari Kabupaten Kampar, tersebar mulai dari Kuala Kampar (sekarang Kabupaten Pelalawan), Kampar, Bangkinang, Kuok, sampai ke Kabun dan Rambah (sekarang Kabupaten Rokan Hulu). Demikian juga beras yang berasal dari Indragiri Hilir, seperti dari Reth, Sungai Batang dan Tembilahan. Beras Indragiri Hulu di taluk kuantan (sekarang Kabupaten Kuansing). Dan beras yang berasal dari Kabupaten/Kota yang wilayahnya dahulu merupakan Kabupaten Bengkalis. Bahkan para transmigrasi yang sebagian besar dari pulau Jawa, pada awal kedatangannya dahulu ke Riau diberi lahan untuk ditanami antara lain adalah padi. Namun sawah dan ladang yang dahulunya menguning dengan padi ketika hendak di panen, banyak yang sudah beralih atau konversi ke tanaman sawit.

Tanaman sawit sudah menjadi tanaman primadona di Riau, mengalahkan tanaman apapun yang pernah ada di Riau. Meskipun tanaman selain sawit masih banyak dijumpai di Riau, akan tetapi pertambahan luasnya setiap tahun tidak sebanyak dan sedahsyat pertambahan luas tanaman sawit. Sehingga Provinsi Riau terkenal dengan provinsi yang memiliki tanaman sawit terluas di Indonesia. Pada tahun 2019 luas perkebunan sawit Riau diperkirakan telah mencapai 2,82 juta

hektar, dimana 1,82 juta hektar adalah perkebunan rakyat, sedangkan sisanya yaitu sebesar 79.244 hektar milik perkebunan besar negara dan 928.418 hektar milik perkebunan besar swasta nasional. Riau merupakan provinsi dengan produksi CPO terbesar (9,87 juta ton), meskipun produktifitas CPO tertinggi masih berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun demikian meski tanaman sawit adalah tanaman primadona, hal ini tidaklah menyurutkan niat dan keteguhan hati para petani padi Riau untuk tetap terus menggarap sawah dan ladangnya. Dari data rilis BPS terlihat bahwa, pada tahun 2020, luas panen padi Riau meningkat sebesar 2,52 persen dibanding tahun 2019 atau meningkat seluas 1.591,09 hektar, dimana pada tahun 2019 luas panen padi Riau seluas 63.142,04 hektar meningkat menjadi 64.733,13 hektar pada tahun 2020. Akan tetapi tidak semua kabupaten/kota yang mengalami peningkatan luas panen selama tahun 2020, bahkan ada yang mengalami penurunan. Lima Kabupaten/Kota mengalami penurunan luas panen, yang tertinggi penurunannya adalah Kabupaten Bengkalis seluas 2.711,87 hektar. Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan luas panen, sehingga dapat mendongkrak peningkatan luas panen padi Provinsi Riau. Sebagai penyumbang utama peningkatan luas panen Riau pada tahun 2020 adalah kabupaten Kuantan Singingi, yaitu pada tahun 2019 luas panen padi

Kuantan Singingi seluas 5.405,29 hektar meningkat menjadi 8.091,00 hektar pada tahun 2020, atau meningkat seluas 2.685,71 hektar (49,69 persen).

Peningkatan luas panen tentu berdampak kepada jumlah produksi padi Riau. Pada tahun 2020, produksi padi Riau meningkat sebesar 5,55 persen dibanding tahun 2019 atau meningkat sebesar 12.811,07 ton-gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 7,31 ribu ton beras untuk konsumsi pangan penduduk. Sementara produksi padi Riau tahun 2020 sebesar 243.685,04 ton-GKG atau setara dengan 139.131,46 ton beras.

Namun jumlah produksi padi atau yang disetarakan dengan beras yang dihasilkan Riau tersebut masih jauh dari kata cukup atau dengan kata lain Riau belum mampu menutupi kebutuhan beras penduduk Riau. Kebutuhan konsumsi penduduk Riau terhadap beras pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 622.286,97 ton beras. Sehingga terdapat defisit atau kekurangan beras di Riau sebanyak 483.155,51 ton beras. Suatu jumlah yang cukup besar, dan selama ini kekurangan tersebut diatasi dengan mengimpor beras dari provinsi tetangga bahkan juga dari luar negeri.

Meskipun Riau selalu kekurangan beras sehingga kebutuhan penduduk Riau akan beras harus didatangkan dari luar Riau, namun beras Riau tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada. Walaupun hanya memiliki luas panen 64.733,13 hektar, para petani Riau yang sebagian besar tinggal di pedesaan akan tetap berangkat ke sawah dan ke ladangnya dengan harapan semakin banyak penduduk yang mau bertani sehingga luas panen akan terus bertambah.

Wabah pandemi covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir, sementara resesi ekonomi masih melanda di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, pengangguran bertambah dan orang miskin juga bertambah. Maka program penciptaan petani milenial bisa menjadi pilihan. Apalagi berdasarkan hasil sensus penduduk september 2020 yang lalu, bahwa sekitar 27,24 persen atau sekitar 1,72 juta jiwa penduduk Riau kaum milenial, yaitu penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan usia rata-rata saat ini adalah 24-39 tahun. Disamping itu penduduk Riau juga didominasi oleh Generasi Z sekitar 30,79 persen atau sebanyak 1,94 juta jiwa dengan rata-rata usia 8-23 tahun. Sebagian besar dari kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Potensi tanaman padi dan tanaman berumur pendek lainnya seperti palawija, hortikultura sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Dengan adanya program penciptaan petani milenial secara masif dengan di motori oleh pemerintah yang memiliki berbagai kewenangan dan fasilitas bersinergi dengan berbagai perusahaan besar dengan program CSR nya. Kemudian melibatkan tenaga ahli dan akademisi yang profesional di bidang pertanian, menggunakan teknologi tepat guna tepat sasaran dan penguasaan cuaca. Diperkuat dengan program pendampingan yang selalu melakukan pengawasan dan pembinaan yang intensif mulai dari hulu hingga hilir, sehingga produksi benar-benar dapat dinikmati oleh petani bukan sebaliknya merugikan petani. Peranan BULOG sangat penting dalam menyerap hasil produksi petani.

Pengembangan Sektor Pertanian Melalui Kelompok Tani

Oleh : Robby Junius, SE

TERBIT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID, 26 MARET 2021



Pandemi covid-19 sudah jelas berdampak terhadap perekonomian di Riau. Dari rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Riau terkontraksi 1,12 persen pada tahun 2020. Namun di tengah pertumbuhan ekonomi yang negatif, sektor pertanian terbukti menjadi sektor yang tangguh di saat pandemi. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PRDB Riau yaitu sebesar 26,83 persen, setelah industri pengolahan sebesar 28,27 persen.

Tahun 2020 sektor pertanian masih bisa tumbuh 4,35 persen. Bahkan jika melihat triwulan IV 2020 dibanding TW IV 2019, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh positif sebesar 3,08 persen di antara lima sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB. Empat sektor utama lainnya justru bertumbuh negatif, yaitu sektor industri pengolahan minus 0,02 persen, sektor pertambangan dan penggalian minus 5,37 persen, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor minus 8,19 persen dan sektor konstruksi minus 4,86 persen.

Berdasarkan hal tersebut, sektor pertanian sangat bisa menjadi pendorong pemulihan perekonomian. Apalagi mayoritas penduduk bekerja di Riau berdasarkan data BPS kondisi Agustus 2020

bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 39,17 persen. Tentunya penting untuk mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk memaksimalkan produksi dari sektor ini, di samping tentu saja perlu juga mengungkit daya beli masyarakat dari sisi permintaan.

Intervensi Pemerintah Untuk Pengembangan Sektor Pertanian

Masyarakat yang bergerak di sektor pertanian mayoritas berada di desa. Pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan komitmen untuk membangun dari desa, ditunjukkan dengan alokasi anggaran dana desa tahun 2021 sebesar 72 triliun. Untuk Provinsi Riau, dana desa tahun 2021 hampir sebesar 1,5 triliun. Kebijakan dana desa 2021 adalah mendukung pemulihan perekonomian desa yang salah satu poinnya berbunyi pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian desa. Kebijakan berikutnya, mendukung pengembangan sektor prioritas yang diantaranya adalah program ketahanan pangan dan ketahanan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi.

Ada beberapa hal penting yang bisa diintervensi oleh pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian. Pertama pemerintah harus membantu penyediaan

alat-alat mesin pertanian saat masa persiapan lahan. Kedua, memastikan ketersediaan air pada saat masa tanam. Ketiga, memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau saat tumbuhan mulai tumbuh. Keempat, membantu penyerapan dan pemasaran hasil produksi pertanian agar tidak terjadi penumpukan. Kelima, pemerintah harus hadir untuk memastikan tidak terjadi penurunan harga saat masa panen. Keenam, tidak kalah pentingnya yaitu pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan untuk akses ke lokasi pertanian, sehingga memudahkan dalam proses transportasi dan pengangkutan hasil pertanian.

Pemberdayaan Melalui Kelompok Tani

Selain sarana prasarana dan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan hal yang wajib dilakukan jika ingin memajukan sektor pertanian. Pemberdayaan petani bisa dilakukan melalui wadah kelompok tani. Pemberdayaan bukan sekedar mendorong petani untuk bekerja menggarap lahannya saja, tetapi dalam pemberdayaan juga mengandung arti peningkatan kualitas para petani melalui proses pembelajaran ataupun pendampingan.

Untuk mendorong agar para petani bersedia bergabung menjadi anggota kelompok tani, maka pemerintah bisa memberikan stimulus-stimulus khusus yang hanya bisa didapatkan jika mereka bergabung dalam kelompok tani. Stimulus-stimulus tersebut semisal bantuan permodalan bagi kelompok tani tersebut, maupun jaminan penyerapan hasil pertanian masyarakat dengan harga yang bersaing

Pemberdayaan melalui kelompok

tani bisa dilakukan dengan penguatan terhadap kelompok tani tersebut, sehingga nantinya bisa menjadi semakin bertumbuh. Penguatan kelompok tani harus dimulai dari manajemen yang baik. Sehingga langkah awal yang bisa dilakukan adalah pendampingan pengelolaan manajemen kelompok tani. Kemudian perlu dilakukan penyusunan rencana kelompok yang disepakati bersama. Setelah rencana kelompok tersusun, maka perlu dilakukan pencatatan laporan keuangan yang baik.

Setelah penguatan sektor manajemen, berikutnya yang perlu dilakukan penguatan dari sisi pengetahuan untuk mengubah kebiasaan menuju arah yang lebih baik. Nantinya dari setiap kelompok tani bisa ditunjuk agen-agen perubahan yang akan diberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai teknologi pertanian. Agen-agen inilah nantinya yang akan berperan sebagai pembimbing bagi anggota kelompok yang lainnya. Penyuluhan pertanian juga harus rutin dilakukan, untuk selalu menyegarkan para petani, dan menyampaikan teknologi-teknologi terbaru dalam pertanian.

Setelah penguatan dari sektor manajemen dan pengetahuan teknologi pertanian, berikutnya adalah pembukaan akses pemasaran yang luas bagi petani. Dengan terbukanya akses pasar yang luas akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani, karena bisa memilih pembeli dengan harga terbaik. Kemudian pengenalan kelompok tani dengan pihak-pihak swasta juga akan semakin membuka wawasan petani, sehingga nantinya petani juga bisa menjalin kemitraan tidak hanya dalam pemasaran, tetapi juga penyediaan bibit, pupuk dan saran pertanian.

Setelah manajemen pengelolaan

kelompok tani bisa diperkuat, berikutnya jika memungkinkan, pemerintah bisa mengadakan kompetisi antar kelompok tani, agar mereka semakin termotivasi untuk lebih baik lagi.

Pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk memastikan hal tersebut. Investasi di bidang pertanian sudah merupakan suatu keharusan jika ingin pertanian maju, yang pada akhirnya akan mengungkit perekonomian masyarakat.

<https://riau.bps.go.id>

Wacana Impor Beras di Panen Raya, Apa Kata Data?

Oleh : Robby Junius, SE

TERBIT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID, 28 MARET 2021



S elama ini kita sering mendengar sebutan Indonesia sebagai negara agraris. Sebutan tersebut tentu saja melekat karena pertanian memegang peranan dominan dalam perekonomian Indonesia, dimana bila kita lihat struktur Produk Domestik Bruto Indonesia menurut rilis BPS (5 Februari 2021), dominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,70 persen merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor Industri Pengolahan sebesar 19,88 persen. Mayoritas penduduk bekerja Indonesia juga bergerak di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan dominasi sebesar 29,76 persen.

Sektor pertanian juga telah menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi pandemi covid-19. Disaat ekonomi Indonesia 2020 turun sebesar 2,07 persen dibanding 2019, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berhasil bertahan dan tumbuh positif sebesar 1,75 persen.

Keberhasilan sektor pertanian bertahan menghadapi pandemi merupakan suatu hal yang menggembirakan. Salah satu subsektor dari pertanian yang menunjukkan hasil menggembirakan yaitu tanaman pangan. Dari rilis BPS (1 Maret 2021) terlihat produksi padi 2020 sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan 0,08 persen dibanding 2019 sebesar 54,60 juta ton GKG.

Peningkatan produksi ini masih menunjukkan arah yang menggembirakan pada 2021. Data potensi produksi padi pada Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan 26,88 persen dibandingkan periode yang sama 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG. Jika dikonversikan ke beras, potensi produksi beras pada Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan 26,84 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang sebesar 11,46 juta ton beras. Potensi puncak produksi Januari-April 2021 diperkirakan pada bulan Maret yaitu sebesar 8,7 juta ton GKG atau 4,99 juta ton beras dan bulan April sebesar 8,59 juta ton GKG atau 4,92 juta ton beras.

Namun, ditengah perkiraan peningkatan panen dan sedang memasuki masa panen raya, tiba-tiba kita dikejutkan dengan adanya kabar akan ada impor beras. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud menyatakan, impor beras perlu untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021. Sehingga, tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik (kompas.tv – Rabu, 17 Maret 2021).

Fenomena impor beras bukan merupakan hal yang baru. Selama momentumnya tepat, impor beras boleh saja dilakukan dengan tujuan untuk

menjaga ketersediaan kebutuhan pangan nasional dan menjaga kestabilan harga. Impor beras juga bisa dilakukan jika terjadi gagal panen besar-besaran ataupun adanya bencana alam. Dengan harga yang stabil, diharapkan inflasi tetap terjaga dengan baik dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Kapan Harus Impor?

Impor beras menjadi perlu ketika beberapa data yang menjadi indikator terpenuhi. Indikator bisa kita bagi menjadi tiga sisi, yaitu dari sisi penyediaan, harga dan cadangan beras pemerintah. Ketiga indikator ini harus terjaga, baik untuk kepentingan petani maupun kepentingan konsumen.

Indikator dari sisi penyediaan dilihat dari tingkat produksi beras di dalam negeri. Dari data BPS, periode Januari-April biasanya merupakan periode panen raya. Jika tidak ada kejadian gagal panen ataupun bencana, kemungkinan stok dalam negeri akan melimpah. Bahkan panen periode Januari-April tahun ini diperkirakan meningkat dibanding periode yang sama tahun 2020. Berdasarkan publikasi Hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 oleh BPS, konsumsi beras per kapita Indonesia yaitu sebesar 111,58 kg. Dengan demikian diperkirakan kebutuhan beras Indonesia tahun ini berkisar 30 juta ton. Dengan hasil panen Januari-April diperkirakan 14,54 juta ton beras, rasanya dari sisi penyediaan beras petani masih cukup aman untuk tidak dilakukan impor.

Indikator kedua dilihat data dari sisi harga. Menurut data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan bulan Januari-Februari relatif stabil bahkan cenderung menurun baik beras premium maupun beras

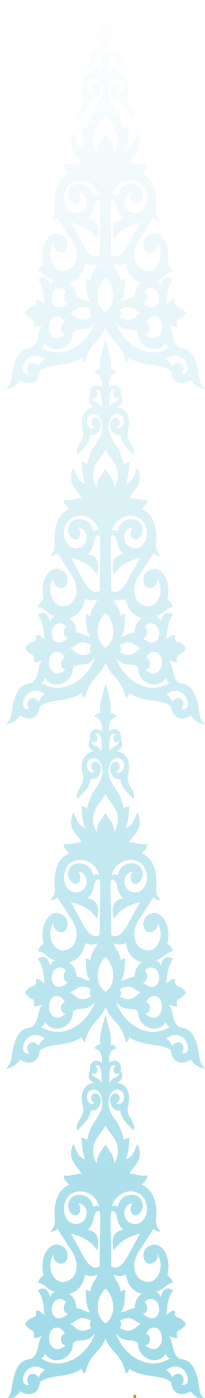
medium. Rata-rata harga beras premium di penggilingan bulan Februari Rp. 9.772/kg turun sedikit dibandingkan harga bulan Januari Rp. 9.780/Kg. Begitupun harga beras medium bulan Februari Rp. 9.386/kg turun sedikit dibandingkan harga bulan Januari Rp. 9.405/Kg. Dari indikator harga yang masih stabil, rasanya indikator inipun belum menunjukkan keharusan melakukan impor beras.

Indikator ketiga yaitu cadangan beras pemerintah. Sejak tahun 2005, Pemerintah telah memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh BULOG. CBP merupakan sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG yang digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga baik ditingkat produsen maupun konsumen. Ditingkat produsen stabilitas dilakukan dengan cara melakukan penyerapan di saat musim panen agar harga ditingkat produsen tidak jatuh, sedangkan di tingkat konsumen dilakukan melalui penyaluran beras ketika permintaan meningkat, agar harga juga tidak naik tinggi. Dikutip dari laman bulog.co.id, CBP ideal yang harus dimiliki idealnya sekitar 750 ribu – 1,25 juta ton. Menurut Direktur Utama Bulog Budi Waseso dikutip dari finance.detik.com (Jumat, 19 Maret 2021), stok beras Bulog per 14 Maret sudah mencapai 883.585 ton dimana 859.877 ton diantaranya merupakan CBP. Selain itu, sisa stok beras impor 2018 juga masih bersisa 275.811 ton yang belum tersalurkan. Ditambah lagi pada masa panen raya ini Bulog optimis dapat menyerap hingga 390.800 ton beras, artinya setelah April CBP Bulog bisa di atas 1 juta ton sehingga tidak perlu lagi impor beras.

Dilihat dari ketiga indikator tersebut, sepertinya momentum untuk

mewacanakan impor beras saat ini masih terlalu dini. Apalagi saat ini masih masa panen raya, penting untuk menjaga motivasi dan semangat petani, agar sektor pertanian bisa tetap bertumbuh meskipun masih diterjang pandemi covid-19. Dengan didukung oleh penyediaan data oleh BPS menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilakukan setiap akhir bulan, kebijakan ini bisa dikaji lagi pada semester dua nanti, karena pada periode tersebut akan lebih terlihat kemampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Untuk saat ini, mungkin ada baiknya pemerintah terlebih dahulu menfokuskan untuk menyerap gabah dari petani lokal, selain untuk CBP, juga untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani, agar tidak turun saat panen raya.

<https://riau.bps.go.id>



Regulasi di Balik Asap Rokok

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

TERBIT DI THE COLUMNIST.ID, 3 APRIL 2021



Beberapa bulan terakhir ini diambil dengan tujuan mengendalikan berbagai pemberitaan di konsumsi produk hasil tembakau terutama media massa menyebutkan pada dampak kesehatan. Namun pada keberhasilan pemerintah (dalam hal ini kenyataannya, keputusan ini dirasa kurang efektif dalam menekan prevalensi perokok aktif di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masih di atas 25 persen.

Mendengar berita tersebut kita patut senang atas keberhasilan ini, namun kita juga patut merasa miris karena itu berarti bahwa rokok ilegal makin marak beredar di negeri ini. Jumlahnya pun cukup membuat kita tercengang. Awal tahun 2021, media massa nasional menyebutkan adanya upaya penyelundupan 7,2 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar 7,6 miliar di Perairan Pulau Buluh, Provinsi Riau.

Tak kalah heboh dengan berita baru-baru ini yang menyebutkan 10,2 juta batang rokok ilegal di Aceh yang dimusnahkan, dengan potensi kerugian negara mencapai 11,7 milyar rupiah. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, benarkah maraknya peredaran rokok ilegal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang menaikkan bea cukai rokok?

Rokok Merupakan ‘Kebutuhan Primer’

Pada akhir tahun 2020 Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok di 2021 dengan rata-rata kenaikan 12,5 persen. Keputusan

Secara teori jika pajak suatu produk terlampau tinggi, maka akan ada dampak masuknya produk ilegal. Terlebih jika produk tersebut merupakan produk yang memang dibutuhkan oleh banyak orang.

Kita sudah mafhum jika saat ini rokok bisa dikatakan ‘kebutuhan primer’ bagi sebagian orang, karena nyatanya dalam keseharian rokok dianggap lebih penting dibanding makanan. Pengeluaran untuk membeli rokok di kalangan keluarga miskin bahkan tercatat lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk membeli daging maupun telur ayam.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, menunjukkan bahwa rokok kretek filter memberikan sumbangan lebih dari 10 persen terhadap total garis kemiskinan. Sulit dipercaya memang jika pengeluaran masyarakat untuk membeli rokok hampir sama besarnya dengan pengeluaran

untuk membeli beras. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perokok yang lebih memilih tidak makan daripada tidak ngebul. Jadi sangatlah wajar jika adanya kebijakan kenaikan bea cukai rokok ini justru memicu masyarakat untuk beralih ke produk ilegal dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Akibatnya rokok ilegal tersebut semakin marak dan tujuan awal untuk meningkatkan kesehatan justru tidak tercapai.

Regulasi Rokok di Indonesia

Di negara-negara maju, industri rokok dibatasi dengan ketat seiring dengan tingginya kesadaran masyarakatnya. Hal ini tentunya mendorong industri rokok global mengalihkan pasar ke negara-negara berkembang. Di Indonesia, industri rokok secara leluasa membidik generasi muda. Dengan mensponsori olah raga, konser-konser musik, industri rokok memberikan pencitraan seolah-olah peduli pada orang lain.

Regulasi pengendalian masalah merokok di Indonesia sebenarnya sudah tertera secara jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yakni berupa Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003. Aturan dalam PP ini meliputi kandungan kadar nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, serta penetapan kawasan tanpa rokok. Disebutkan dalam PP tersebut bahwa iklan dan promosi dapat dilakukan di media elektronik hanya pada waktu-waktu tertentu, yakni pada periode jam 21.30 sampai dengan 05.00 waktu setempat. Disebutkan juga secara rinci bahwa kawasan tanpa rokok yang dimaksud meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat terjadinya proses belajar mengajar, tempat ibadah,

dan angkutan umum.

Pada kenyataannya regulasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih sering kita saksikan iklan rokok muncul di layar televisi, juga baliho dan reklame rokok yang menjadi penghias di sepanjang jalan. Bahkan hampir tidak kita jumpai area publik, seperti di taman, angkutan umum, dan kantor pemerintahan yang bebas rokok.

Memanfaatkan Potensi Tembakau

Upaya pemerintah dalam menekan jumlah prokok di Indonesia belum membuahkan hasil yang diharapkan. Perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak. Sudah saatnya, para pemangku kepentingan di sektor komoditi tembakau nasional 'banting setir' ke aneka produk turunan tembakau selain rokok yang lebih bermanfaat bagi kesehatan manusia, dan ramah lingkungan.

Pemerintah hendaknya konsisten menjalankan regulasi yang telah dibuat, bukan sekedar formalitas belaka. DPR sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga semestinya mendukung pengendalian bahaya rokok bukan malah membiarkan rokok menggerogoti kesehatan masyarakat. Dan yang tak kalah penting kerja sama dari berbagai pihak yakni pemerintah, peneliti, dan pengusaha dalam memanfaatkan potensi tembakau.

Meredupnya industri tembakau jangan sampai mematikan peluang bisnis tembakau itu sendiri. Dengan demikian 'citra' tembakau akan dengan sendirinya berubah, dari pembawa petaka menjadi pembawa manfaat bagi manusia dan alam.

Inflasi Jelang Ramadhan

Oleh : Rika Wahyuni, SST,MM

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 7 APRIL 2021



Hanya dalam hitungan hari, umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadhan. Ramadhan tahun ini merupakan Ramadhan ke dua selama masa pandemi Covid-19. Hal unik yang terjadi setiap Ramadhan tiba adalah suatu hal yang bertolak belakang dimana saat semua orang berpuasa seharusnya konsumsi menurun namun terjadi sebaliknya, jumlah konsumsi masyarakat justru semakin meningkat. Peningkatan jumlah konsumsi tentu erat kaitannya dengan permintaan barang dan jasa yang berakibat pada kenaikan harga. Bagaimana gambaran harga menjelang Ramadhan dan apakah harga komoditas seperti cabai, bawang, telur, dan daging ayam akan terus meningkat saat Ramadhan nanti?

Harga sangat penting dalam pergerakan ekonomi suatu daerah. Harga barang yang sangat tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, sebaliknya harga yang terlalu rendah akan menekan laba dari penyedia barang dan jasa. Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Fenomena pergerakan harga menjelang Ramadhan dapat dilihat dari kenaikan harga berbagai komoditas di bulan Maret. BPS mencatat angka Inflasi Maret gabungan tiga kota (Pekanbaru, Tembilahan, dan Dumai) di Provinsi Riau adalah sebesar 0,1 persen.

Tembilahan dan Dumai mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,07 persen dan -0,04 persen, sementara Kota Pekanbaru Inflasi sebesar 0,15 persen. Dari tiga kota yang diamati. Kota Pekanbaru pada bulan Maret mengalami Inflasi, sementara dua kota lainnya mengalami deflasi. Hal ini tentu menarik untuk kita cermati mengingat bahwa Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi dan pusat perekonomian di Provinsi Riau. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota Pekanbaru merupakan miniatur yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Riau secara umum.

Angka inflasi dirinci menurut kelompok pengeluaran, tiga kelompok inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 1,73 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,26 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,23 persen. Konsumsi masyarakat di tiga kelompok ini akan cenderung meningkat menjelang dan selama Ramadhan. Sementara harga komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Maret di Kota Pekanbaru adalah cabai merah disusul oleh obat dengan resep, ikan serai, bawang merah, dan ikan tongkol.

Selama tiga bulan berjalan di tahun 2021, komoditas cabai merah, cabai rawit,

daging ayam, bawang merah dan telur selalu masuk ke dalam daftar sepuluh besar komoditas penyumbang inflasi. Seperti diketahui bersama, komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan. Jika harga pada komoditas tersebut terus mengalami kenaikan, tentu saja akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika diamati dari pergerakan inflasi Kota Pekanbaru saat menjelang bulan Ramadhan pada tiga tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Dimana Inflasi Pada Tahun 2019 adalah sebesar 0,56 persen, Tahun 2020 sebesar 0,34 persen, dan Tahun 2021 sebesar 0,15 persen. Yang artinya pergerakan harga-harga barang menjelang Ramadhan di Kota Pekanbaru memiliki tren semakin terkendali setiap tahunnya. Hal ini tentunya diharapkan akan terus berlanjut selama bulan Ramadhan dan saat Hari Raya Idul Fitri nanti.

Banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harga barang di suatu daerah, seperti biaya produksi, pola distribusi barang, nilai mata uang, kondisi alam, dan sebagainya. Namun secara garis besar, harga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran barang dan jasa. Aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru yang sebagian besar bergerak pada sektor industri dan jasa, dan hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor pertanian mengakibatkan sebagian besar komoditas konsumsi masyarakat khususnya pangan berasal dari luar Kota Pekanbaru, baik itu dari Kabupaten/Kota tetangga maupun dari luar Provinsi Riau. Oleh karena itu faktor distribusi barang tentu merupakan faktor yang perlu dicermati pemerintah Kota Pekanbaru secara serius sebagai upaya dalam mengendalikan harga. Terhambatnya rantai distribusi barang,

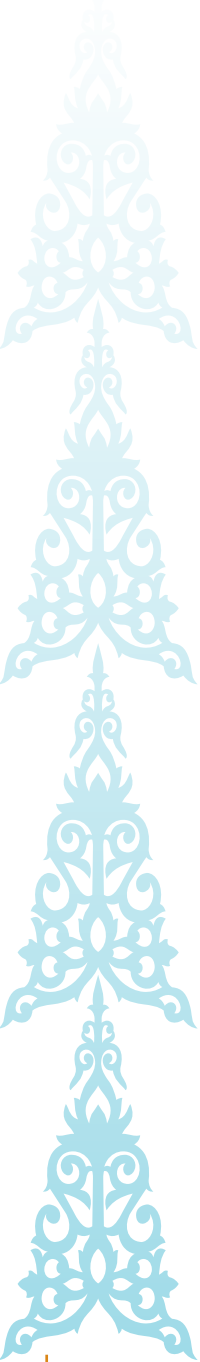
tentu akan sangat mempengaruhi harga barang secara umum.

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Riau, pola utama distribusi perdagangan di Provinsi Riau untuk komoditas strategis antara lain beras, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras memiliki dua macam pola yaitu 2 rantai dan 3 rantai. Pola utama distribusi perdagangan terpendek pada tahun 2019 adalah komoditas daging ayam ras sebanyak 2 rantai yaitu dari produsen ke pedagang eceran, dan sampai ke konsumen. Sedangkan 3 komoditas strategis lainnya membentuk 3 rantai yaitu dari produsen ke pedagang grosir/ pengepul, pedagang eceran, baru sampai ke konsumen. Dilihat dari Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) komoditas cabai merah adalah yang tertinggi diantara 4 komoditas strategis di Provinsi Riau Tahun 2019 yaitu 57,14. Berikutnya adalah MPP komoditas bawang merah yaitu 39,77 persen. MPP komoditas daging ayam ras dan beras masing-masing sebesar 23,46 persen dan 18,14 persen. Semakin pendek rantai pola distribusi akan menghasilkan persentase MPP yang lebih kecil sehingga harga barang yang sampai di masyarakat akan lebih murah.

Selain faktor distribusi barang, adanya alternatif daerah asal barang khususnya komoditas pangan akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian harga di Kota Pekanbaru. Pengalihan fungsi lahan kosong yang selama ini lebih banyak digunakan sebagai lahan perumahan atau pusat perdagangan, menjadi lahan pertanian khususnya pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura perlu semakin ditingkatkan. Pemenuhan kebutuhan komoditas pangan yang berasal dari wilayah sentra pertanian di sekitar Kota Pekanbaru juga perlu menjadi

perhatian Pemerintah Kota, sehingga tidak hanya bergantung pada wilayah di luar Provinsi Riau. Karena semakin mudah akses distribusi barang antar wilayah, maka biaya transportasi akan lebih murah sehingga harga barang di Kota Pekanbaru akan lebih stabil dan angka Inflasi akan terus terkendali.

<https://riau.bps.go.id>



Narkoba, Ancaman di Tengah Pandemi

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

TERBIT DI MEDIA RIAU POS, 14 APRIL 2021



Pada pertengahan bulan Maret lalu kita dikejutkan dengan berita yang menjadi headline di berbagai media terkait hasil operasi narkoba oleh Mapolda Riau. Dari operasi tersebut ditangkap ratusan orang tersangka penyalahguna, kurir, dan bandar narkoba dengan sejumlah barang bukti pil ekstasi, sabu-sabu dan ganja yang mencapai puluhan kilogram. Kondisi ini menjadi bukti bahwa narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar negeri ini.

Di tengah masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 ternyata ada bahaya lain yang mengancam yakni penyalahgunaan narkoba. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2019 pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang, namun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba ini justru menurun sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba (press release BNN, akhir tahun 2020). Namun masa pandemi yang melanda negeri ini sejak Maret tahun lalu telah membuka peluang meningkatnya kembali kasus narkoba. Sepertinya para pelaku pengedar narkoba benar-benar memanfaatkan situasi pandemi corona ini.

Adanya pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 ternyata tidak mengurangi peredaran narkoba, yang terjadi justru malah

sebaliknya, bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang ‘tumbuh subur’ di tengah pandemi. Himpitan ekonomi yang semakin terasa membuat sebagian orang mencari cara yang instan untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan risiko besar yang akan dihadapi.

Kasus Narkoba di Riau

Kasus narkoba di wilayah Provinsi Riau masih tergolong tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2019, Provinsi Riau masuk dalam sepuluh besar kejadian kejahatan terkait narkoba, yakni di peringkat ke-7 di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Data yang dihimpun dari Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri menyebutkan sebanyak 1.671 kejadian kejahatan narkoba di Provinsi Riau pada tahun tersebut.

Sejalan dengan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) BPS pada tahun 2018 lalu, yang menyebutkan sebesar 36,43 persen desa/kelurahan di Riau mengalami kejadian kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Besarnya persentase tersebut menjadikan Riau sebagai wilayah kedua tertinggi setelah Sumatera Barat. Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap penyeludupan narkoba, mengingat keadaan alam Riau yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga ke Selat Malaka

dan meliputi daerah perairan sungai. Salah satu wilayah perairan yang kerap dijadikan tempat penyeludupan narkoba adalah Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

Penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa dan pelajar juga ditemukan di Riau. Pada operasi Anti Narkotika (Antik) beberapa waktu lalu, jajaran Polda Riau berhasil menangkap 14 orang pelajar dan 5 orang mahasiswa. Sangat miris memang, generasi muda yang seyogyanya menjadi ujung tombak pembangunan justru turut menghancurkan tongkat estafet masa depan bangsa. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah mengabaikan nilai-nilai agama, norma, serta hukum yang berlaku di tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Narkoba tidak hanya merusak mental dan kesehatan penggunanya, tetapi juga merusak sistem saraf dan beberapa organ tubuh. Istilah yang mengatakan “Indonesia adalah surga bagi peredaran narkoba” sepertinya benar adanya. Seorang pelaku pengedar narkoba mengatakan dengan gamblang bahwa Indonesia adalah pasar narkoba yang bagus dengan angka permintaan yang terus meningkat, harga yang tinggi, dan hukum yang bisa dibeli.

Upaya pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran narkoba di tengah wabah pandemi covid-19 memiliki tantangan tersendiri. Peredaran narkoba yang sebelumnya dilakukan secara nyata di tempat-tempat hiburan misalnya kini telah menasar dari rumah ke rumah. Peredarannya pun diprediksi banyak melalui dunia maya (online), karenanya perlu pengawasan yang lebih ketat.

Upaya sosialisasi bahaya narkoba

yang biasanya menghadirkan massa besar tentunya tidak dapat dilakukan sementara waktu. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang ada. Bagaimanapun, keluarga mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembinaan diri seseorang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga broken home. Pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan norma sejak dini akan menjadi benteng bagi kehidupan seorang anak kedepannya. Masyarakat juga memiliki peran tersendiri dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan jauh dari penyalahgunaan narkoba.

Belenggu Penghalang Emansipasi Perempuan Indonesia

Oleh : Heni Nainggolan, SST,MM

OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST.ID, 21 APRIL 2021



Hari ini Indonesia memperingati Hari Kartini. Perjuangan Kartini telah membuka jalan bagi perempuan pribumi untuk memiliki kesempatan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Akan tetapi, sampai saat ini terlihat masih banyak perempuan Indonesia yang belum memperoleh kelayakan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.

Jika ditelusuri pada kelompok umur muda (15-24 tahun), tercatat banyak kaum perempuan yang tidak bersekolah lagi dan juga belum bekerja. Angka ini biasa diistilahkan dengan NEET (Not in Education, Employment, or Training). Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019 terhitung sebanyak 6 juta lebih (27,53 persen) perempuan Indonesia berusia 15-24 tahun tergolong dalam NEET (tidak sedang bersekolah, tidak sedang bekerja, juga tidak sedang mengikuti pelatihan). Dengan kata lain 1 dari 4 perempuan muda Indonesia tidak berpartisipasi aktif baik dalam pendidikan ataupun pekerjaan.

Pada Agustus 2020, dari perempuan berumur 15-34 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, ternyata lebih dari tiga puluh persennya hanya berpendidikan SMP ke bawah.

Hal ini menggambarkan masih banyak perempuan di Indonesia yang tidak mampu untuk menamatkan pendidikannya

di atas SMP dan lebih memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja.

Banyaknya perempuan tidak dapat melanjutkan tingkat pendidikan karena berada pada daerah terpencil atau hidup di perkotaan tetapi memiliki orang tua yang berpenghasilan pas-pasan. Sehingga pada akhirnya tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab sulitnya perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Jika ditelusuri dari status pekerjaan, banyak perempuan yang bekerja hanya sebagai pekerja keluarga atau tanpa dibayar. Pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 12,89 juta orang perempuan atau sebesar 25,42 persen yang berstatus sebagai pekerja keluarga di Indonesia. Mereka mayoritas berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Selain itu, banyak juga kaum perempuan yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi menjadi terjebak dalam kubangan lumpur prostitusi. Sebagai contoh dikutip dari news.detik.com, terjadi kasus penggebrekan sejumlah penginapan di Tangerang Selatan pada akhir Maret 2021. Kaum perempuan muda yang ditangkap melakukan open BO (booking online) tersebut mengaku tidak mampu melanjutkan pendidikan dan juga belum memiliki skill dalam dunia pekerjaan.

Hal ini seperti menjadi masalah yang tak pernah terselesaikan bahkan semakin menghantui dunia perempuan di Indonesia. Masalah yang terjadi pada dunia perempuan ini tentunya secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap generasi bangsa berikutnya. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan pengembangan pola pikir kaum perempuan di seluruh penjuru nusantara. Sehingga diharapkan terlahir perempuan-perempuan yang memiliki komitmen untuk menjadi perempuan berpendidikan dan berkompeten.

Setiap insan perempuan juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat dalam mencapai pendidikan dan pekerjaan yang layak. Tentunya yaitu dengan tanpa adanya larangan atau pembatasan bagi kaum perempuan untuk melanjutkan pendidikan serta memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam hal pendidikan, pemerintah dapat menanggulangi problema ini misalnya dengan program biaya sekolah gratis untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat mendongkrak tingkat pendidikan yang ditamatkan khususnya pada kaum perempuan.

Untuk dunia pekerjaan, kaum perempuan juga memerlukan perhatian khusus. Terlebih lagi di tengah situasi pandemi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah karyawan atau bahkan penutupan berbagai lapangan usaha, dimana angka pengangguran khususnya pada kaum perempuan menjadi semakin bertambah.

Kaum perempuan harus tetap

memiliki semangat Kartini dalam menghadapi dilema yang terjadi. Salah satu cara yang ditempuh saat ini yaitu dengan semakin banyak perempuan Indonesia yang beralih ke dunia industri digital. Potensi bisnis online ini dimanfaatkan untuk mendistribusikan usaha kecil menengah yang sebagian besar digeluti kaum perempuan. Usaha ini dapat berkembang diiringi perubahan mindset dari konvensional menjadi berbasis teknologi atau online. Untuk itu, pemerintah juga diharapkan perlu memperhatikan permodalan serta peningkatan skill dalam sektor usaha kecil menengah agar terus dapat berkembang diiringi kemajuan teknologi.

Masih banyak hal lain yang dapat dikembangkan oleh kaum perempuan untuk menekan pengangguran perempuan dan pekerjaan yang tidak layak. Perempuan harus lepas dari rasa putus asa meski berada dalam berbagai keterbatasan. Seperti inspiratif Kartini untuk perempuan Indonesia, “Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi.” Perempuan Indonesia harus memiliki keinginan, semangat dan komitmen yang kuat untuk bisa mencapai kesuksesan.

Ramadan Momentum Pemulihan Mentalitas

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 31 APRIL 2021



Wabah virus Covid-19 masih terus melanda negeri ini. Dampak yang timbul akibat pandemi ini telah kita rasakan hampir pada semua lini kehidupan. Sisi ekonomi merupakan hal yang paling kentara dirasakan oleh masyarakat. Banyak orang yang mengalami phk, pendapatan yang menurun, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang akhirnya gulung tikar.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Riau pada Agustus 2020 sebesar 6,32 persen (naik dari 5,97 persen pada tahun 2019) dan angka kemiskinan pada September 2020 sebesar 7,04 persen (naik dari 6,90 persen pada September 2019). Himpitan ekonomi yang semakin memburuk akibat kehilangan pekerjaan dan kesulitan finansial pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kesehatan mental. Tak bisa dipungkiri jika pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik semata tetapi juga telah mempengaruhi kesehatan mental masyarakat.

Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu

akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk (dikutip dari promkes.kemkes.go.id).

Sebagian dari kita mungkin merasakan gangguan tersebut, seperti rasa cemas dan gelisah akan terinfeksi virus Covid-19, bahkan tidak sedikit yang mengalami paranoid akibat dibombardir berita tentang wabah virus ini. Banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa dampak kesehatan mental adalah konsekuensi paling signifikan dari bencana tersebut, yang menyebabkan ribuan kematian dan sangat merusak perekonomian.

Kondisi gangguan mental yang lebih buruk juga terjadi pada para penyintas Covid-19 akibat stigma yang kerap muncul dari masyarakat. Stigma ini tentunya memberikan efek menambah tekanan psikis, tidak hanya bagi penyintas itu sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Menurut penelitian terbaru dari University of Exeter dan King's College London, kesepian pada orang dewasa selama masa lockdown di tengah pandemi Covid-19 merupakan faktor kunci atas gejala depresi dan kesehatan mental lainnya.

Hadirnya bulan Ramadan di tengah pandemi Covid-19 ini bagaikan sebuah oase di padang pasir. Kehadirannya telah

dinanti-nantikan oleh kaum muslimin dan memang sudah selayaknya kita bahagia dengan hadirnya bulan penuh berkah ini. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, “Orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya (HR. Muslim).” Ramadan ini merupakan momentum bagi kita untuk kembali men-charge mentalitas kita yang tengah kusut dan porak poranda akibat wabah virus corona.

Hadirnya bulan Ramadan ini memberikan waktu bagi kita untuk sejenak beristirahat dengan penatnya kehidupan dunia dan fokus meraih pahala untuk kehidupan akhirat. Serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini akan membuat jiwa kita lebih tenang, damai, dan terbebas dari gangguan psikis. Pada bulan Ramadan umat muslim berlomba-lomba melakukan berbagai amalan kebaikan. Ganjaran dilipatgandakan pahala pada bulan ini meningkatkan potensi kebaikan yang ada.

Bahkan Ramadan melalui rangkaian ibadah zakatnya mampu mengubah seseorang yang sebelumnya sangat sulit untuk berbagi rezekinya pada orang lain. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara benar dan profesional akan mampu menjadi solusi dalam membantu mengendurkan himpitan ekonomi yang menimpa masyarakat di tengah krisis akibat pandemi. Selain kegiatan ibadah, berbagai aktivitas dan tradisi di bulan Ramadan ini juga dapat meningkatkan kesehatan mental masyarakat.

Kita mungkin masih ingat pemberitaan di media yang menyebutkan telah terjadi peningkatan kasus perceraian akibat pandemi Covid-19. Karenanya

kehadiran bulan Ramadhan ini diharapkan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menciptakan bonding (kedekatan) bersama keluarga. Aktivitas makan sahur, buka puasa, hingga sholat tarawih berjama'ah merupakan momen yang mampu melekatkan kembali ikatan hati dalam anggota keluarga.

Tak ada seorang pun yang tau sampai kapan pandemi di negeri ini akan berakhir, namun kesehatan mental jangan sampai luput dari perhatian. Sudah selayaknya kita senantiasa menjaga mentalitas diri dari berbagai ancaman akibat wabah virus ini. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai upaya pemulihan dan penguatan kesehatan mental, dengan melakukan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. ***

Takjil dan Tapioka

Oleh : Irfarial, SE

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 3 MEI 2021



Meski bulan Ramadhan sudah sampai di pertengahan, namun para pedagang makanan dan minuman untuk berbuka puasa yang disebut dengan takjil, masih banyak dijumpai, bahkan di beberapa tempat bertambah banyak. Hal ini disebabkan karena kegiatan ngabuburit masih saja menjadi kegiatan mengasikkan bagi sebagian masyarakat. Ngabuburit adalah kegiatan sebagian masyarakat berburu takjil sambal menunggu waktu berbuka puasa, sebagai pelipur setelah seharian berpuasa. Berbagai Aneka makanan ditawarkan oleh pedagang, seperti macam-macam kolak, cendol, bolu kemojo dan kue beraneka jenis dan rasa, siomay, tekwan, kerupuk, pempek, bakso, dan penganan kreasi baru lainnya. Semuanya dapat diperoleh dengan mudah, baik yang dijual oleh para pedagang di pinggir jalan maupun di beberapa pusat jajanan serba ada (pujasera). Kegiatan ngabuburit harus diawasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dari pemerintah, supaya tidak menjadi kluster baru penyebaran covid-19.

Aneka makanan dan minuman yang dijual sebagian diantaranya berbahan baku tapioka, baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai pelengkap. Tapioka atau disebut tepung kanji adalah tepung pati yang diekstrak dari umbi singkong atau ubi kayu. Sedangkan tepung singkong adalah

tepung dari hasil parutan singkong yang dikeringkan. Namun umumnya masyarakat menyebut tepung tapioka atau tepung kanji.

Selain untuk keperluan membuat berbagai penganan yang lezat, tapioka juga dapat dipergunakan untuk membuat kaku pakaian, disebut dengan istilah dikanji, yaitu pakaian yang dibubuhi cairan kanji menjadi keras atau kaku, ketika diseterika lipatannya dapat membentuk garis lurus yang sempurna (wikipedia).

Selain itu tepung tapioka juga dibutuhkan oleh industri kertas. Menurut Erythrina (2010) pada proses pembuatan lembaran kertas, sifat kertas dapat diperbaiki dengan penambahan zat-zat lain seperti pigmen, pengisi dan pewarna. Pigmen ini berfungsi untuk mengisi pori-pori permukaan kertas sehingga permukaan menjadi rata. Tapioka digunakan untuk meningkatkan kehalusan permukaan kertas dan opasitas, sehingga kertas tidak tembus pandang. Penambahan tapioka dapat pula meningkatkan kecerahan (brightness), kemampuan daya cetak lembaran dan ketahanan lipat. Penambahan tapioka dilakukan pada saat pembentukan kertas baik dalam keadaan basah maupun dalam keadaan kering untuk memperbaiki sifat fisik dan sifat optik kertas (Casey, 1981).

Dengan demikian kebutuhan tapioka

di Provinsi Riau sangatlah besar. Apalagi di Riau beroperasi dua industri kertas terbesar di Indonesia, yaitu yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kedua pabrik tersebut membutuhkan tapioka yang sangat besar dalam proses produksinya. Namun kebutuhan tapioka bagi kedua pabrik tersebut masih diimpor dari luar negeri dengan deskripsi barang berkode HS 110814 (merujuk Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, yaitu 'Pati ubi kayu (cassava)' atau tapioka.

Berdasarkan data BPS, total impor tapioka Riau dari 2010-2020 senilai US\$ 168,06 juta. Kalau di rupiahkan dengan menggunakan kurs tengah masing-masing tahun maka menjadi 4,38 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar dan menggiurkan andai tapiokanya diproduksi di Riau. Selama rentang waktu 2010-2020, impor tapioka Riau terbesar terjadi pada tahun 2014-2015, sedangkan yang terendah tahun 2010 senilai US\$ 9,77 juta, sedikit di atasnya pada tahun 2020 senilai US\$ 12,25 juta. Sebagian besar dan paling utama impor tapioka Riau berasal dari Thailand. Dan pernah ada dari negara lain tapi jumlahnya sangat sedikit, yaitu tahun 2014 dari Tiongkok senilai US\$ 306,79 ribu, tahun 2017 dari Malaysia senilai US\$ 7,79 ribu, dan tahun 2018 dari Australia senilai US\$ 92,74 ribu.

Sebenarnya antusias penduduk Riau untuk bertanam singkong cukup besar. Diantaranya yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Palas Sejahtera Kota Pekanbaru yang diketuai Awaldi Hasibuan. Mereka telah beberapa kali memamerkan singkong raksasa hasil budidayanya. Bahkan Gubernur Riau waktu itu Arsyadjuliandi Rachman dibuat takjub dengan singkong raksasa seberat 160 kg (Republika, Juni 2016). Kelompok ini juga memamerkan singkong raksasanya

dalam expo rakernas salah satu organisasi keagamaan yang dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tahun 2018 (Sigapnews, 2018).

Berdasarkan data Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, luas panen dan produksi singkong/ubi kayu Provinsi Riau selama 2014-2019 cukup berfluktuasi, dan yang tertinggi adalah pada Jan-Des 2019 dengan luas panen 4.314,7 Ha dan produksi sebesar 129.654,0 ton. Tanaman ini tersebar di dua belas kab/kota, dengan produksi terbesar berada di Kabupaten Kampar 31.419,2 Ha, Kabupaten Siak 19.716,3 Ha, dan Kabupaten Bengkalis 19.571,6 Ha. Sedangkan produksi terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti 2.622,1 Ha.

Meskipun Provinsi Riau masih mengimpor tapioka, namun dalam rentang waktu 2010-2020, Provinsi Riau pernah mengekspor singkong ke Malaysia dalam bentuk kepingan kering (dried chips) atau beku yang masuk dalam golongan barang HS 071410, yaitu berturut-turut tahun 2012 senilai US\$ 1.503,00, tahun 2017 senilai US\$ 22.103,26, dan tahun 2018 senilai US\$ 5.801,60. Meskipun kecil nilainya tetap tercatat sebagai ekspor.

Akankah nilai impor tapioka yang sangat fantastis tersebut di atas, dapat diambil alih oleh petani-petani Riau. Atau akan tetap begini saja melihat devisa negara yang begitu besar nilainya mengalir keluar negeri.

Mobilitas dan Covid-19

Oleh : Sarah Solikhatus Risma

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 10 MEI 2021



Memasuki April 2021, Provinsi Riau kembali masuk dalam zona merah wilayah dengan penularan Covid-19. Pada 26 April Riau kembali mencatat rekor penambahan kasus Covid-19 terbanyak dalam sehari yaitu mencapai 614 kasus. Bahkan penambahan kasus Covid-19 per 4 Mei 2021, posisi Riau menempati urutan kedua di bawah Jawa Barat dan melebihi DKI Jakarta sebanyak 483 kasus. Berdasarkan data satgas Covid-19, kasus Covid-19 di Riau memasuki puncak penambahan kasusnya pada bulan ini dengan kasus penyebaran menanjak naik hingga 14.000 dibandingkan Oktober 2020 yang hanya mencapai 7.000 kasus atau naik 100 persen.

Sebelumnya, grafik penurunan jumlah kasus Covid-19 sebenarnya sudah terjadi memasuki akhir tahun 2020 kemarin. Namun trennya kembali meningkat di akhir triwulan I 2021, memasuki awal April, di mana meningkatnya aktivitas luar rumah masyarakat menjadi salah satu penyebab karena merupakan awal dimulainya kegiatan menyambut Ramadan.

Menurut ahli berdasarkan data historis, gelombang kedua penyebaran virus biasanya akan menimbulkan jumlah kasus yang lebih banyak dan penularan yang lebih agresif. Meningkatnya mobilitas penduduk seiring dengan berakhirnya masa PSBB, mobilitas penduduk atau aktifitas pergerakan yang memungkinkan untuk dilakukan di luar rumah kembali

meningkat. Data angkutan penumpang darat yang bersumber dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri menunjukkan bahwa pada triwulan I 2021 terjadi peningkatan aktifitas angkutan penumpang di sejumlah terminal Riau sebesar 14,73 persen, yaitu mencapai 330.562 penumpang, dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang hanya sebesar 288.123 penumpang. Namun jika dibandingkan dengan triwulan I 2020 data aktivitas terminal sebenarnya masih menunjukan penurunan sebesar -7,26 persen dari masa normal sebelum pandemi Covid-19 terjadi, di mana mencapai 356.429 penumpang. Sedangkan untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Riau menurut data yang dirilis oleh BPS pada Maret 2021 naik sebesar 0,53 persen yaitu mencapai 38,69 persen dibandingkan dengan TPK Februari 2021 yang hanya sebesar 38,16 persen. Tren peningkatan TPK mulai terlihat dari awal bulan Januari atau triwulan I 2021 jika dibandingkan dengan data triwulan IV 2020.

Google juga secara berkala mengeluarkan data mobilitas masyarakat yang diukur dari tag lokasi perangkat pengguna secara daring yang kemudian dibandingkan dengan waktu normal sebelum kondisi pandemi Covid-19 terjadi. Mobilitas masyarakat diukur melalui kunjungan ke beberapa tempat umum, seperti: toko makanan, apotek, tempat kerja, taman dan lainnya. Hasilnya

menunjukkan bahwa masyarakat Riau menjelang akhir Februari atau memasuki awal Maret tercatat melakukan peningkatan kunjungan yang cukup signifikan, khususnya untuk toko bahan makanan dan apotek. Tercatat sampai akhir April 2021, kunjungan masyarakat ke tempat-tempat toko bahan makanan dan apotek mengalami tren positif mencapai 16% jika dibandingkan dengan periode dasar awal pencatatan, yaitu nilai median selama periode 3 Januari s/d 6 Februari 2020, di mana kondisi masih normal atau belum ada pandemi Covid-19 di Riau. Sedangkan untuk kunjungan ke fasilitas umum lainnya, seperti: tempat kerja, tempat rekreasi, dan lainnya masih menunjukan pola negatif, dimana intensitas nya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan masa normal sebelum pandemi Covid-19. Namun aktivitas kunjungan masyarakat terlihat meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun 2020.

Vaksinasi Covid-19

Dimulainya proses vaksinasi Covid-19 di tengah masyarakat seakan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat akan potensi kekebalan tubuh terhadap serangan virus Covid-19. Vaksinasi Covid-19 sepertinya menurunkan kesadaran masyarakat akan tetap pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan walaupun jumlah angka kasus sempat menurun. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk dengan prinsip social-distancing dalam berkegiatan, diantaranya: pembatasan kegiatan yang mengharuskan adanya kerumunan atau aktivitas di luar rumah; bekerja dan sekolah di rumah; dan pembatasan penggunaan fasilitas umum secara massal. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan

yang dilakukan seperti: memakai masker; mencuci tangan; dan menjaga jarak. Diharapkan dari adanya penerapan kebijakan pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat secara bersama dapat mencegah penyebaran Covid-19, seiring dengan terus digalakkannya program vaksinasi penduduk sehingga dapat menciptakan herd immunity dalam populasi penduduk yang diharapkan. Kita harus ingat bahwa kita tidak akan sehat sampai orang lain sehat juga. #lebihbaik #dirumahsaja.

Regulasi Berbasis Agama dan Indeks Demokrasi

Oleh : Desi Damaiyanti, SST
OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST.ID, 19 MEI 2021



Menjelang berbuka puasa, sambil menunggu azan magrib saya mengisi waktu dengan membaca beberapa tulisan di media online. Saya tertarik dengan tulisan Ria Indah Sari yang dimuat oleh The Columnist pada 4 Mei 2021 dengan judul “Zakat Penghasilan dan Degradasi Indeks Demokrasi”. Tulisan ini membahas tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikaitkan dengan regulasi pemerintah terkait program cinta zakat yang saat ini sedang marak dicanangkan oleh Pemerintah.

Regulasi tersebut jika ditindaklanjuti dalam sebuah Perpres (Peraturan Presiden) disinyalir akan menurunkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Benarkah demikian? Menanggapi hal tersebut, izinkan saya lewat tulisan ini mengulasnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda.

Indeks Demokrasi Indonesia atau yang lazim dikenal dengan istilah IDI merupakan alat ukur untuk melihat capaian demokrasi di Indonesia dalam menyusun program perencanaan pembangunan politik. Badan Pusat Statistik merilis nilai IDI pada tahun 2019 sebesar 74,92, atau meningkat sebesar 2,53 poin dibanding capaian IDI tahun 2018 (72,39).

Ada tiga aspek yang dirangkum dalam indeks ini yaitu aspek kebebasan

sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Ketiga aspek tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tulisan ini kita fokuskan pada aspek kebebasan sipil.

Aspek kebebasan sipil meliputi empat variabel, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Empat variabel tersebut lebih rinci lagi terbagi dalam sepuluh indikator. Jika kita cermati nilai IDI pada tiap indikator akan terlihat bahwa pada aspek ini tercatat hanya tiga indikator yang menurun cukup signifikan, yaitu indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (menurun dari 82,35 pada tahun 2018 menjadi 77,21 pada tahun 2019), indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (dari 70,22 pada tahun 2018 menjadi 65,69 pada tahun 2019), serta indikator ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama (dari skor 91,47 pada tahun 2018 menjadi 87,79 pada tahun 2019).

Lalu bagaimana dengan regulasi program zakat yang disinyalir menurunkan nilai IDI? Jika kita perhatikan regulasi tersebut berkaitan erat dengan dua indikator penyusun variabel kebebasan

berkeyakinan pada IDI yakni indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama dan indikator tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Kedua indikator ini selama kurun waktu enam tahun terakhir tidak mengalami fluktuasi yang cukup berarti (masih berkisar di angka 80-an). Ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak berpengaruh signifikan pada nilai IDI di level nasional.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan nilai IDI di level daerah? Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau mengeluarkan peraturan terkait kewajiban menunaikan zakat profesi pada semua ASN di lingkungan Pemkab Siak. Isi Perda tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Pada pertengahan tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau pun menerapkan peraturan yang sama bagi semua ASN di lingkungan Pemprov Riau. Selanjutnya mari kita cermati kembali nilai IDI di Provinsi Riau secara series pada aspek kebebasan sipil. Ternyata nilai indeks pada aspek tersebut selama kurun waktu enam tahun terakhir tidaklah menurun, justru malah meningkat (74,35 pada tahun 2014 menjadi 85,15 pada tahun 2019). Bisa jadi untuk beberapa indikator mengalami penurunan, namun tidak memengaruhi indeks pada aspek tersebut, terlebih nilai IDI secara agregat.

Begitu juga dengan aturan tertulis lainnya terkait pelaksanaan ibadah yang telah diterapkan di beberapa daerah, di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara misalnya. Sebagaimana yang diberitakan di beberapa media bahwa pada awal tahun 2019 lalu, Pemerintah

Tidore Kepulauan membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan puasa Senin-Kamis pada seluruh ASN yang beragama Islam di lingkungan pemkot Tikep, dan program tersebut telah dijalankan pada tahun 2019.

Kembali ke pembahasan kita terkait IDI, apakah tepat jika dikatakan bahwa surat edaran ini mengekang aspek kebebasan sipil? Jika kita lihat skor IDI pada aspek ini di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 justru meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2018, dari 78,94 menjadi 85,61. Dapat kita simpulkan bahwa aturan-aturan tertulis tersebut tidaklah mengekang aspek kebebasan sipil sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.

Negara, dalam hal ini pemerintah, memegang peranan yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan umat beragama, baik sebagai regulator maupun fasilitator. Sebagai fasilitator tentunya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Sebagai regulator, pemerintah membuat regulasi yang mengatur tata caranya.

Sah-sah saja jika lantas pemerintah membuat aturan tertulis yang mengatur itu, termasuk perkara adanya sanksi bagi yang melanggar, seperti Perda tentang wajibnya mengeluarkan zakat profesi bagi ASN yang telah diterapkan di beberapa daerah, Perda yang dikeluarkan oleh Pemkab Rokan Hulu tentang wajibnya sholat berjamaah bagi ASN atau Perda lain yang semisalnya.

Saya tidak sepakat jika ada yang mengatakan Perda tersebut tidak bisa diberlakukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Jika demikian, saya justru

mempertanyakan konsep demokrasi itu sendiri. Karena nyatanya masih banyak hal lain terkait demokrasi yang lebih urgen untuk dibenahi di negeri ini. Dalam implementasinya, perda-perda tersebut berjalan lancar karena isinya sejalan dengan ajaran agama Islam dan memang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Kalaupun ada yang merasa dirugikan secara personal karena merasa ‘dipaksa oleh negara’ untuk melakukan ibadah yang sifatnya privasi, sesungguhnya itu semua hanya konsekuensi dari sebuah proses.

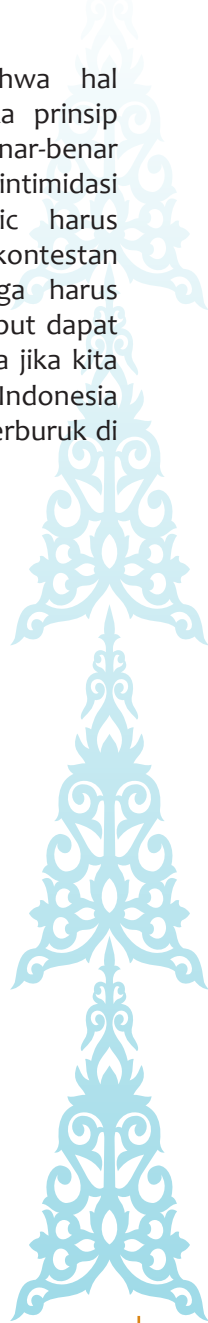
Segala hal yang tidak terbiasa dilakukan maka siapapun yang akan melakukan pastinya akan terasa berat, namun jika itu sudah menjadi kebiasaan tentunya akan ringan untuk dilakukan. Dalam melakukan ibadah memang seharusnya dilandasi kesadaran dan tanggungjawab individu itu sendiri, tetapi hanya sebagian orang yang bisa melakukannya, sebagian lagi perlu sedikit dipecut untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu. Secara jujur kita akui bahwa untuk memulai sebuah kebiasaan baik itu terkadang kita memang harus ‘dipaksa’. Pada praktiknya, tidak ditemui masalah yang berarti dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut, sehingga tidak bijak jika kita malah memperlmasalahkannya.

Kembali kita bahas soal Indeks Demokrasi, sesungguhnya PR yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah bagaimana mewujudkan sistem demokrasi yang benar pada saat proses pemilihan pemimpin daerah. Dari tiga aspek pada IDI, aspek hak-hak politik merupakan aspek dengan nilai terendah yang harus terus ditingkatkan.

Masih terekam jelas dalam ingatan kita bahwa pada akhir tahun 2020 lalu,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang terjadi di tiga daerah di Riau, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai (dilansir dari berita detik.com). Dua dari tiga daerah tersebut akhirnya melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara.

Tentu kita sepakat bahwa hal tersebut tidak perlu terjadi jika prinsip demokrasi dalam pemilu benar-benar diterapkan. Segala bentuk intimidasi dan permainan money politic harus dicegah, kongkalikong antara kontestan dan penyelenggara pemilu juga harus diberantas. Jika hambatan tersebut dapat kita atasi, tak berlebihan rasanya jika kita optimis sejarah tak lagi mencatat Indonesia dengan nilai Indeks Demokrasi terburuk di dunia.



Uji Hipotesis, Bukti Eksistensi SStatistik di Dalam Alquran

Oleh : Muji Basuki, SST,M.Si

OPINI TERBIT DI GORIAU.COM, 21 MEI 2021



Hipotesis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satu artinya adalah anggapan dasar. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa uji hipotesis adalah sebuah proses menguji sebuah anggapan terhadap sesuatu. Secara lebih lengkap, uji hipotesis adalah cabang Ilmu Statistika Inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu anggapan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak anggapan tersebut. Sebut saja misalnya seorang peneliti beranggapan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan keyakinan seseorang terhadap adanya virus Covid19 di Provinsi Riau, maka orang tersebut harus menguji terlebih dahulu anggapan itu dengan sebuah proses pengujian.

Disebut sebagai proses, karena secara sederhana pengujian hipotesis diawali dengan data collecting, editing, inputting, validating, sampai dengan analyzing. Selanjutnya barulah dilakukan pengujian statistic terhadap hipotesa/ anggapan itu, untuk menentukan apakah anggapan itu akan diterima atau ditolak. Jika dari hasil pengujian statistik dihasilkan nilai uji yang signifikan untuk menerima anggapan itu, maka anggapan itu pun di terima, sebaliknya jika dari hasil pengujian statistik dihasilkan nilai uji yang tidak signifikan, maka anggapan itu pun ditolak. Ketika dari proses pengujian hipotesis

menghasilkan kesimpulan untuk menerima sebuah anggapan, seorang peneliti tetap harus menyisakan kemungkinan salah terhadap kesimpulan tersebut, karena dalam pengujian hipotesis dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalah tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan yang terjadi saat menolak hipotesis awal padahal hipotesis awal benar. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan yang terjadi saat menerima hipotesis awal padahal hipotesis awal kita salah.

Dalam perspektif agama Islam, uji hipotesis adalah sebuah akhlak penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Hipotesis atau anggapan di dalam Al Quran disebut dengan istilah zhann. Dikutip dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1425/>, lafal al-**zhann** ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 67 kali dalam 55 ayat di dalam 32 surah dengan 23 bentuk lafal al-**zhann** yang berbeda-beda. Adapun bentuk lafal al-**zhann** yang paling banyak diulang adalah lafal **zhann** sebanyak 10 kali pengulangan dalam berbagai konteks nya, baik zhann kepada Allah SWT maupun zhann kepada sesama manusia. Pengulangan kata zhann sebanyak itu tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang dilingkupi dengan berbagai keterbatasan, sementara saat yang sama manusia adalah makhluk yang punya beragam harapan dan keinginan. Gap antara keterbatasan dan harapan itulah

yang menjadi salah satu alasan munculnya zhan dalam diri manusia.

Kaidah umum yang Allah SWT tetapkan di dalam Al Quran adalah bahwa seorang mukmin hendaknya tidak terlalu banyak memperturutkan zhan/anggapan/prasangka nya.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa... “ (QS Al Hujurat ayat 12)

Kata “banyak” dalam ayat diatas menunjukkan bahwa mayoritas prasangka adalah dosa, tapi juga ada sebagian kecil prasangka yang dapat menghantarkan seseorang kepada kebenaran. Artinya, jika seseorang mendasarkan sebuah kesimpulan hanya atas dasar prasangka, maka hal ini hanya akan menjatuhkan dirinyake dalam kesalahan (baca : dosa). Lalu, prasangka seperti apa yang bisa menghantarkan seseorang kepada kebenaran, minimal ketepatan dalam pengambilan kesimpulan?

Masih di dalam Surat Al Hujurat, Allah SWT memberikan metodologi agar sebuah prasangka tidak menjatuhkan seseorang ke dalam kesalahan, dan metodologi yang dimaksud adalah tabayyun/pengecekan.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka lakukanlah tabayyun agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (QS Al Hujurat ayat 6)

Ayat ini turun berkenaan dengan kisah seorang sahabat Nabi saw bernama Al Walid ibnu Uqbah yang ditugaskan untuk mengambil zakat yang sudah terkumpul di sebuah kaum yang mu'allaf (baru masuk Islam). Ketika Al Walid sampai

di pertengahan jalan menuju kaum itu, dia merasa gentar akan diserang oleh kaum itu. Akhirnya Al Walid kembali kepada Nabi saw dan mengabarkan bahwa kaum itu tidak mau membayar zakat. Hampir saja terjadi kesalahpahaman yang berujung fatal saat itu, sampai Allah SWT menurunkan ayat ini.

Disinilah letak pentingnya tabayyun terhadap suatu data atau informasi, agar penyikapan yang diambil oleh seseorang menjadi tepat terhadap informasi tersebut. Metode tabayyun adalah sebuah metode yang sama persis dengan pengujian hipotesis di dalam ilmu statistik. Dimulai dari diterima nya data atau informasi, di validasi, di analisis dan akhirnya di simpulkan.

Di era informasi saat ini, tabayyun atau uji hipotesis adalah akhlak yang harus diperkuat agar kehidupan sosial antar manusia menjadi harmoni.

Tetap Tumbuh Meski Pandemi

Oleh : Irfarial, SE
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 24 MEI 2021



Ditengah pandemi covid-19 yang belum juga reda, Perekonomian Riau pada triwulan I 2021 (y-on-y) dapat tumbuh sebesar 0,41 persen, artinya Provinsi Riau berhasil keluar dari lembah resesi ekonomi. Padahal sebelumnya dua triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi Riau berkontraksi atau mengalami pertumbuhan minus, yang menyebabkan Riau dan provinsi-provinsi lainnya termasuk Perekonomian Nasional, masuk ke lembah resesi ekonomi.

Keberhasilan Provinsi Riau terlepas dari jerat resesi ekonomi pada triwulan I 2021 (y-on-y) diharapkan menjadi penyemangat atau motivasi bagi seluruh masyarakat Riau untuk terus lebih giat dan gigih menggerakkan perekonomian pada triwulan-triwulan berikutnya. Sebab pengaruh pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perekonomian Riau masih sangat besar. Hal ini terlihat jelas di akhir triwulan I 2021 khususnya pada minggu-minggu berikutnya. Provinsi Riau sempat tercatat sebagai provinsi dengan penambahan kasus tertinggi di Sumatera dan nomor tiga tertinggi di Indonesia. Demikian juga kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sempat mencatatkan diri sebagai kota dengan penambahan kasus covid-19 tertinggi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik Provinsi

Riau mencatat bahwa pada Februari 2021 sebanyak 315,28 ribu orang (6,31 persen) penduduk usia kerja Provinsi Riau terdampak situasi pandemi Covid-19. Dari jumlah penduduk yang terdampak, yang terbanyak dialami oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 268,51 ribu orang, diikuti oleh pengangguran karena Covid-19 sebanyak 27,13 ribu orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 9,98 ribu orang, dan sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 9,66 ribu orang.

Persoalan lainnya adalah struktur perekonomian Riau yang ditopang oleh tiga lapangan usaha dengan peranan sebesar 75,78 persen, hanya dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan pada triwulan I 2021 (y-on-y) itupun kecil, yaitu sebesar 4,52 persen untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan sebesar 3,61 persen untuk lapangan usaha industri pengolahan. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian cukup dalam kontraksinya yaitu sebesar 7,09 persen.

Dari sisi pengeluaran, bertumbuhnya perekonomian Riau pada triwulan I 2021 (y-on-y) hanya didorong oleh bertumbuhnya komponen ekspor barang dan jasa yaitu sebesar 29,85 persen. Sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi atau penurunan.

Komponen terbesar yang mengalami kontraksi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 40,93 persen, diikuti pengeluaran konsumsi LNPRP sebesar 6,53 persen, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,24 persen. Dan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2020 (q-to-q), perekonomian Riau ternyata masih mengalami kontraksi atau terjadi penurunan sebesar 1,41 persen.

Disisi lain penduduk usia kerja Provinsi Riau terus bertambah. Hal ini disebabkan karena penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun keatas mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia kerja Provinsi Riau mengalami kenaikan dari 4,88 juta orang pada Februari 2020 menjadi 4,99 juta orang pada Februari 2021. Sebagian besar sekitar 65,81 persen penduduk usia kerja Provinsi Riau pada Februari 2021 atau 3,29 juta orang merupakan angkatan kerja, selebihnya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Yang menjadi perhatian adalah kenaikan jumlah angkatan kerja Provinsi Riau sebanyak 20,22 ribu orang (dari 3.267,60 ribu orang pada Februari 2020 menjadi 3.287,82 ribu orang pada Februari 2021), tidak diiringi dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Akibatnya adalah pengangguran jadi bertambah di Riau. Hal ini terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau pada Februari 2021 mencapai 4,96 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar lima orang penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga

kerja. Lebih lanjut tercatat bahwa dari 3,12 juta orang penduduk Riau yang bekerja, sebagian besarnya sekitar 52,06 persen atau sebanyak 1,63 juta orang bekerja pada kegiatan informal, yaitu seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Meskipun kue ekonomi Provinsi Riau hanya bertambah sekitar 0,51 triliun rupiah pada triwulan I 2021 (y-on-y) berdasarkan PDRB harga konstan, namun pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I 2021 (y-on-y) dapat menjadi momentum untuk kebangkitan ekonomi Riau pada triwulan-triwulan berikutnya.

Industri Hilir untuk Petani Karet

Oleh : Roby Junius, SE
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 26 MEI 2021



Karet masih menjadi tempat menggantungkan kehidupan bagi lebih dari 173 ribu rumah tangga di Provinsi Riau (Hasil SUTAS 2018 BPS). Selain bermanfaat sebagai tumpuan kehidupan petani, karet merupakan komoditas perkebunan yang ramah lingkungan. Tanaman karet ternyata juga bermanfaat bagi lingkungan hidup. Dikutip dari laman iribb.org (23 Agustus 2017) beberapa manfaat tanaman karet bagi lingkungan diantaranya, tanaman karet dapat berperan dalam reboisasi dan rehabilitasi lahan, bisa mengurangi emisi rumah kaca, mencegah asap dan polusi udara yang buruk bagi kesehatan. Selain itu, perkebunan karet juga dapat mengatasi banjir, tanah longsor, dan semua masalah lingkungan yang dikarenakan kondisi tanah yang tidak stabil.

Sayangnya masa depan para petani karet tahun-tahun belakangan ini terlihat suram. Jika dulu musuh petani karet adalah intensitas hujan yang tinggi, saat ini ada yang lebih ditakuti petani, yaitu anjloknya harga getah karet. Para petani menjerit karena harga getah karet tidak lagi sesuai dengan . Bahkan, para petani yang sempat menikmati masa-masa keemasan berkebun karet, saat ini pun yang mulai lupa kapan terakhir mereka bisa menikmati harga yang pantas.

Gesa Pembangunan Industri Hilir

Karet

Ditengah kesulitan para petani karet, pemerintah tentunya tidak boleh lelah dalam memikirkan nasib mereka. Harus selalu dicari langkah-langkah untuk dapat memperjuangkan nasib mereka. Salah satu langkah strategis yang perlu digesa pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup para petani karet adalah pembentukan industri hilir karet. Saat ini, mayoritas pengolahan bokar masih sebatas produk antara. Padahal industri hilir karet semisal industri ban, vulkanisir, alas kaki, dan alat-alat keperluan rumah tangga merupakan komoditas yang penting dalam keseharian masyarakat. Industri hilir karet tidak harus dalam skala besar, tetapi bisa diawali dengan pembentukan skala menengah kecil. Dengan dibentuknya industri hilir karet, akan mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani karet. Selain itu, juga akan membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Tentunya untuk membentuk industri hilir karet, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, dari sektor hulu harus ada jaminan ketersediaan bahan baku (bokar) bagi industri hilir. Untuk itu, alih fungsi lahan dari karet menjadi komoditas lain harus dicegah. Cara pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan stimulus kepada para petani karet dalam

bentuk bantuan seperti pupuk, pestisida dan peralatan lainnya yang dibutuhkan petani. Bantuan berupa bibit unggul yang bersertifikat juga diharapkan mampu mencegah petani mengganti tanaman karet yang sudah tua dengan komoditas lainnya. Tentunya, agar bantuan ini tidak disalahgunakan, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap bantuan tersebut, supaya pupuk, pestisida dan bantuan lainnya tidak digunakan untuk jenis tanaman lainnya. Untuk menjaga kelangsungan perkebunan karet, maka diperlukan juga jaminan kestabilan harga yang bersaing. Secerach harapan terlihat terbit dari Kabupaten Kuantan Singingi yang mungkin bisa diikuti daerah-daerah lainnya. Saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi, pemasaran bokar di beberapa wilayah sudah menggunakan sistem lelang bersama satu waktu satu tempat satu harga satu mutu (4S). Sistem lelang 4S ini telah dilakukan oleh Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (APKARKUSI). Dampak dari sistem lelang ini mampu meningkatkan harga bokar dibandingkan harga biasanya. Per 10 Mei 2021 harga lelang karet yang dilakukan APKARKUSI sudah menyentuh Rp 12.236/Kg. Tentunya harga ini lebih tinggi dibanding harga bokar jika petani menjualnya ke penampung-penampung biasa, bahkan selisihnya bisa menyentuh 1000 - 2000 rupiah. Keberadaan asosiasi para petani karet seperti APKARKUSI ini, sudah barang tentu harus terus dikembangkan dan dijadikan percontohan.

Kedua, memberikan kepastian usaha dan kemudahan bagi investor. Para investor tentunya akan berhitung untuk berinvestasi dalam sektor industri hilir karet. Salah satunya adalah dari prosedur, perizinan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai bisnis industri hilir tersebut. Proses perizinan harus jelas,

transparan dan terukur baik dari segi waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, infrastruktur jalan sebagai sarana pengangkutan produk juga harus diperhatikan. Jalan di sini bukan hanya dalam bentuk jalan tol dan jalan-jalan nasional, tetapi juga pembangunan jalan-jalan kecil lainnya.

Ketiga, memperkuat keberadaan industri hilir karet dengan membantu penyerapan produk hasil industri hilir karet tersebut. Pemerintah mungkin bisa membuat kebijakan segala sesuatu kebutuhan pemerintah yang merupakan produk hilir karet, wajib menggunakan produk industri tersebut. Misalnya, mewajibkan penggunaan ban kendaraan dinas pemerintah dari produk industri lokal tersebut. Ataupun mungkin kebijakan pemberian potongan pajak kendaraan bagi pengguna ban dari produk industri lokal tersebut.

Terakhir, tentunya kita berharap kedepannya nasib para petani karet dengan peningkatan harga getah karet, dan pembangunan industri hilir karet bisa direalisasikan, bukan sekedar berhenti dalam tahapan wacana saja.

Plus Minus Menjadi PNS

Oleh : Roby Junius, SE

OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST.ID, 15 JUNI 2021



Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk melayani masyarakat. Meskipun hanya sebagai “pelayan masyarakat”, nyatanya PNS masih menjadi pekerjaan idaman para orang tua, ataupun menantu idaman mertua.

Tak heran, setiap pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) peminatnya selalu melimpah, melebihi kuota ataupun formasi yang tersedia. Baik itu para peminat yang baru lulus sekolah ataupun kuliah, maupun yang sudah bekerja, bahkan yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Sehingga tak salah jika profesi ini disebut sebagai profesi idaman bagi banyak orang.

Alasan PNS Menjadi Profesi Idaman antara lain, pertama, penghasilan terjamin. Penghasilan yang diterima memang cukup menarik. Selain mendapat gaji bulanan setiap awal bulan, PNS juga menerima tunjangan-tunjangan lainnya. Untuk PNS pusat juga menyediakan tunjangan kinerja dan uang makan, sedangkan PNS daerah menerima tambahan penghasilan pegawai.

Kedua, adanya gaji pensiun. Sebagai balasan terhadap pengabdian PNS, negara menjamin kehidupan PNS setelah pensiun dengan memberikan gaji pensiun bulanan. Bahkan, istri pensiunan PNS laki-laki

masih tetap mendapatkan gaji pensiun dari suaminya meskipun suaminya telah meninggal.

Ketiga, terbebas dari PHK. Salah satu alasan menariknya menjadi PNS yakni bebas dari kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam beberapa kasus, suatu kementerian bisa saja dibubarkan oleh negara. Namun, meskipun hal tersebut terjadi, PNS yang bekerja di lembaga tersebut akan dilebur ke lembaga atau kementerian lainnya.

Keempat, mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Fasilitas yang bisa dinikmati PNS salah satunya adalah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah baik melalui BPJS.

Kelima, kesempatan melanjutkan pendidikan. Setelah menjadi PNS, kesempatan untuk menuntut ilmu masih terbentang luas. Banyak beasiswa baik dari instansi tempat bekerja maupun instansi di luar tempat bekerja yang membuka kesempatan khusus bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain pendidikan formal, PNS juga bisa menambah pengetahuan melalui diklat-diklat yang selalu ada. Tentunya, untuk mendapatkannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Keenam, jam kerja yang pasti. Menjadi PNS berarti memiliki keteraturan dalam pekerjaan. Biasanya untuk PNS yang bekerja lima hari kerja dalam seminggu, bekerja dalam rentang waktu 8,5 – 9 jam per hari (termasuk istirahat siang) . Jam kerja yang pasti ini membuat kehidupan PNS dianggap lebih teratur. Dengan jam kerja yang pasti, juga membuka peluang PNS bisa melakukan pekerjaan tambahan di luar jam kerja yang ditentukan.

Ketujuh, fasilitas pendukung pekerjaan. Selain mendapatkan gaji dan tunjangan, sebagian PNS juga mendapatkan fasilitas sebagai penunjang kelancaran pekerjaan seperti kendaraan dinas, rumah dinas, laptop, komputer dan sebagainya

Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun tidak sedikit juga generasi muda yang tidak tertarik menjadi PNS. Beberapa hal yang menjadi alasan di antaranya, pertama, penghasilan terbatas. Dengan menjadi PNS maka penghasilan yang bisa didapatkan yaitu sebesar yang diatur oleh negara. Bagi generasi muda yang menyukai tantangan, hal ini bisa jadi terlihat tidak menarik.

Kedua, bisa ditempatkan di mana saja. Sesuai dengan ketentuan, PNS sewaktu-waktu bisa dipindahkan ke lokasi lain sesuai keputusan pimpinan. Tentu saja tidak semua orang bisa menerima hal ini, terlebih jika ditempatkan jauh dari keluarga.

Ketiga, terikat dengan aturan. Setelah SD, SMP dan SMP terikat dengan aturan, saat kuliah para generasi muda relatif menjadi lebih bebas. Contoh dalam cara berpakaian. Dengan menjadi PNS, berarti harus siap kembali terikat dengan aturan pemerintah. Baik aturan jam kerja, aturan seragam, serta aturan birokrasi

lainnya. Keempat, ingin menggali potensi diri. Menjadi PNS berarti harus bekerja sesuai dengan SOP dan aturan yang sudah ditetapkan, tidak bisa asal membuat inovasi ataupun keluar dari yang sudah ditetapkan. Jika bekerja sebagai entrepreneur ataupun berusaha sendiri, maka akan bebas untuk melakukan inovasi-inovasi dalam menterjemahkan ide sesuai passion yang dimiliki.

Kelima, tidak bisa liburan sesuka hati. Menjadi PNS berarti terikat dengan aturan jam kerja. PNS tidak bisa libur sesuka hati, karena hari dan jam kerja sudah diatur. Kalau ada jatah cuti, itupun tidak banyak, dan pengajuannya pun belum tentu disetujui pimpinan.

Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, PNS nyatanya tetaplah menjadi incaran banyak orang. Bagi yang sudah menjadi PNS, sudah seharusnya bekerja dengan sungguh-sungguh agar menjadi abdi negara dan pelayan masyarakat yang baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan yang tidak bisa menjadi PNS, jangan berkecil hati. Setiap pekerjaan pasti mempunyai kelebihannya masing-masing, tinggal seberapa bijak orang tersebut menyikapinya untuk menentukan masa depannya sendiri.

Geliat Perekonomian Riau di Masa Pandemi

Oleh :Nelayesiana Bachtiar, SST,MM

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 21 JUNI 2021



Pandemi Covid-19 Melanda

Penyebaran Covid-19 hingga kini masih terus berlangsung. Ketatnya penetapan protokol kesehatan sangat diperlukan demi mengurangi penularan wabah yang sangat cepat, bahkan kini telah ditemukan pula varian baru dari virus Covid-19 yang semakin mengganas baik dari sisi penyebaran hingga sisi dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan bagi penderita. Tentunya tidak ada lagi alasan untuk menyepelkan protokol kesehatan, pentingnya saat ini menjaga dan memelihara kesehatan tubuh.

Tidak hanya kesehatan tubuh yang perlu dijaga, kesehatan perekonomian pun turut perlu dijaga demi tetap berjalannya pergerakan perekonomian. Pandemi covid-19 mengguncang perekonomian hampir di seluruh belahan dunia, tak luput di Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan hingga 2,07 persen. Pada hampir semua sektor perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang disebabkan oleh penurunan permintaan barang dan jasa. Kondisi ini sejalan pada perekonomian Riau 2020 yang turut mengalami penurunan hingga 1,12 persen. Kontraksi ekonomi terjadi akibat penurunan pada hampir seluruh sektor serta komponen pengeluaran perekonomian Riau, kecuali Ekspor Barang Luar Negeri Riau yang justru tumbuh

sebesar 13,10 persen. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional barang dan jasa yang melibatkan negara-negara di dunia, walaupun saat ini perdagangan dunia pun turut berdampak akibat wabah virus Covid-19.

Giat Ekspor dan Industri Riau

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru pada 15 Juni 2021, pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia mengakibatkan Ekspor Indonesia pada Mei 2021 turun 10,25 persen dibanding April 2021, namun jika dibanding Mei 2020, ekspor naik 58,76 persen. Penurunan ekspor Indonesia pada bulan Mei 2021 dibanding April 2021 disebabkan karena menurunnya ekspor nonmigas 10,67 persen, demikian juga ekspor migas turun 2,68 persen. Namun, hal sebaliknya pada nilai ekspor Riau bulan Mei 2021, justru mengalami kenaikan sebesar 11,01 persen dibanding ekspor bulan April 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya ekspor migas dan ekspor non migas masing-masing sebesar 19,90 persen dan sebesar 9,91 persen. Kenaikan ekspor Riau ini tentu ditopang oleh meningkatnya sektor penghasil komoditas unggulan. Riau merupakan salah satu provinsi dengan struktur perekonomian yang disokong dan didominasi oleh sektor-sektor penghasil barang. Terbukti bahwa sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Riau,

pada tahun 2020 sebesar 28,30 persen, sementara pada periode kuartal pertama tahun 2021 sebesar 28,22 persen. Pada triwulan I 2021, pertumbuhan industri pengolahan berada di angka 3,61 persen.

Salah satu negara utama tujuan ekspor Riau, yakni Tiongkok menjadi negara asal merebaknya pandemi Covid-19 sejak 2019 lalu, namun kini sudah menunjukkan pemulihan perekonomian. Terbukti pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal I 2021 sebesar 18,3 persen, yang justru merupakan angka pertumbuhan terbesar sejak data pertumbuhan ekonomi negara tirai bambu tersebut mulai dipublikasikan pada 1993. Hal ini tentu menjadi fenomena menarik bagi pemulihan perekonomian dunia. Sejalan dengan itu pada kuartal I 2021, Tiongkok juga menjadi negara utama penyumbang kontribusi terbesar dari nilai total ekspor Riau, dengan besaran 19,90 persen. Kondisi ini menggambarkan ekspor Riau yang tetap tumbuh di masa pandemi ini. Giatnya kegiatan ekspor Riau yang juga seiring dengan besarnya kontribusi industri pengolahan terhadap struktur perekonomian Riau. Diharapkan peran pemerintah untuk berkomitmen secara konsisten untuk memacu kinerja sektor Industri agar terus mendorong roda pergerakan perekonomian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini yang membuat kinerja lapangan usaha industri pengolahan semakin menjadi sorotan, tercatat subkategori sektor industri pengolahan yang tetap memiliki kinerja positif sepanjang tahun 2020, diantaranya adalah Industri Makanan dan Minuman tumbuh 2,68 persen, Industri Kimia, Farmasi dan obat tradisional tumbuh 4,38 persen, dan Industri Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman yang tumbuh

4,56 persen. Kategori Industri Pengolahan turut andil menahan laju pertumbuhan ekonomi Riau tidak terporosok lebih dalam. Selama tahun 2020, tercatat permintaan cukup tinggi pada komoditas CPO (Crude Palm Oil), kertas, dan bubur kertas. Adapun subkategori yang terpukul paling parah di masa pandemi dengan tumbuh negatif yakni Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 19,17 persen.

Sektor industri pengolahan yang memiliki permintaan cukup tinggi adalah industri makanan dan minuman, tercermin pula pada komoditi lemak dan minyak hewan/nabati yang menjadi salah satu komoditi ekspor Riau yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor periode Januari hingga Mei 2021, yakni sebesar 62,07 persen.

Subkategori-subkategori industri pengolahan yang terus tumbuh positif tersebut, tentunya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Riau agar mampu menopang laju perekonomian ke depannya. Pentingnya kebijakan pemerintah dalam memberi stimulan terhadap sektor industri pengolahan yang mempunyai andil besar agar perekonomian Riau dapat terus tumbuh baik.

Percepatan Perekonomian Riau di Kala Pandemi Covid-19

Kebijakan skala nasional bagi percepatan kinerja perindustrian di masa pandemi tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Pada Maret 2020 lalu, secara resmi Riau dicanangkan sebagai Zona Ekonomi Syariah oleh Wakil Presiden RI, sebagai upaya untuk melakukan percepatan

dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus terkait pengembangan industri halal di Provinsi Riau. Riau yang dikenal dengan Negeri Melayu, identik dengan perkembangan ekonomi syariah, sekaligus Riau yang memiliki letak geografis yang cukup strategis, yang berbatasan langsung dengan negara-negara mitra dagang ekspor Riau diharapkan dapat berhasil dalam penetapan program kawasan industri halal tersebut. Kawasan Ekonomi Khusus rencananya berada di kota Pekanbaru, akan berfokus pada pengembangan ekosistem industri halal.

Selanjutnya Kementerian Perindustrian juga berupaya mendongkrak daya saing serta perluasan pasar ekspor bagi sektor Industri melalui keikutsertaan sebagai partner country Hannover Messe 2021. Ajang ini dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memacu branding nasional sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas industri pengolahan dan pembangunan industri digital di tanah air. Harapannya kebijakan ekspor skala nasional pun turut dapat berimbas positif ke giatnya ekspor Riau. Berbagai upaya dilakukan demi pemulihan perekonomian dalam pandemi Covid-19. Upaya lain yang perlu diterapkan adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang berupa jalan serta pelabuhan. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana fasilitas penunjang demi meningkatnya produktifitas industri pengolahan yang dapat menggerakkan kegiatan ekspor. Subsidi ekspor juga dapat menjadi alternatif kebijakan berikutnya, yang dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan kepada eksportir. Bantuan keuangan juga dapat berupa bantuan pinjaman kepada pengusaha eksportir serta perluasan pangsa pasar ekspor Riau dengan lebih menggiatkan pemasaran produk

ekspor Riau ke mancanegara. Kebijakan yang tak kalah penting adalah pengaturan Pemerintah Riau dalam penetapan harga bahan baku yang wajar bagi para produsen dan juga sekaligus pengaturan harga jual kepada konsumen dengan harga yang terjangkau untuk mendorong daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat tentunya dapat menggerakkan percepatan perekonomian Riau menjadi lebih baik.

Kota Pekanbaru Semakin Tua

Oleh : Irfarial, SE

OPINI TERBIT DI GORIAU.COM, 29 JUNI 2021



Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak yang terdiri dari datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU (Wikipedia).

kepadatan penduduk sebesar 1.555,28 jiwa/km². Sebagai ibukota dari Provinsi Riau, jumlah penduduk Kota Pekanbaru menempati peringkat pertama se-Provinsi Riau dengan persentase sebesar 15,38 persen. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 0,89 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,60 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000–2010 yang sebesar 4,49 persen.

Usia Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh tahun adalah usia yang sangat panjang dan lama sekali. Sebab kalau dihitung generasi, usia selama itu telah melampaui kehidupan 3 sampai empat generasi bahkan lebih. Dengan usia selama itu tentu banyak sudah yang telah dilakukan. Sudah banyak capaian – capaian yang telah diperoleh dari segala sisi kemajuan. Tapi juga harus diingat bahwa kota Pekanbaru dengan umur selama itu, lebih separonya atau kurang lebih 161 tahun berada sebelum Republik Indonesia lahir.

Saat ini Kota Pekanbaru sudah sangat jauh berbeda. Luas wilayahnya pun sudah jauh bertambah. Saat ini Kota Pekanbaru memiliki luas sekitar 632,26 km² dengan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 983,35 ribu jiwa, dengan

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Saat ini Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan, dengan geografis terluas berada di Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk nomor dua terbanyak yaitu 154 ribu jiwa (15,69 persen). Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tampan yaitu 203 ribu jiwa (20,67 persen).

Kalau dilihat komposisi penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan etnis, maka 40,96 persen Kota Pekanbaru dihuni oleh penduduk dari etnis Minang. Kemudian berturut-turut dari etnis Melayu 23,10 persen, etnis Jawa 15,70 persen, etnis Batak 11,04 persen, etnis Tionghoa 2,5 persen, dan etnis lainnya sebesar 6,7 persen (Leo

Suryadinata dkk, 2003). Sedangkan dari sisi agama, komposisi penduduk Kota Pekanbaru sebesar 84,62 persen memeluk agama Islam, 9,94 persen memeluk agama Kristen, 3,92 persen memeluk agama Budha, 1,49 persen memeluk agama Katolik, 0,02 persen memeluk agama Hindu, dan 0,01 persen memeluk agama Konghucu (www. dukcapil.kemendagri.go.id.).

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z. Proporsi Generasi Milenial sebanyak 27,17 persen dari total populasi dan Generasi Z sebanyak 26,42 persen dari total populasi Kota Pekanbaru. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sementara Penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) Kota Pekanbaru mencapai 69,20 persen, artinya Pekanbaru masih berada dalam masa Bonus Demografi.

Namun dari sisi lain, berdasarkan Sakernas Agustus 2020, terjadi kenaikan tingkat pengangguran Kota Pekanbaru dari 7,86 persen pada tahun 2019 menjadi 8,56 persen pada tahun 2020. Pengaruh pandemi covid-19 ikut menjadi penyebab kenaikan tersebut. Sementara tren kemiskinan Kota Pekanbaru berdasarkan Susenas Maret, semenjak tahun 2015 terus mengalami penurunan hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat dari 2,52 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,62 persen pada tahun 2020. Namun dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Riau, persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru masih yang terendah.

Umur boleh bertambah tua tetapi semangat tidak akan pernah terpadamkan. Pekanbaru akan terus berbenah dan berkembang menuju kota metropolitan bahkan lebih dari itu. Tahniah Kota Pekanbaru.

Sayonara Pandemi

Oleh : Nelayesiana Bachtiar, SST,MM

OPINI TERBIT DI GORIAU.COM, 2 JULI 2021



Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan meluas, ditetapkan sebagai kondisi Pandemi dunia. Penyebaran Covid-19 memasuki Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Pandemi belum usai walau telah memasuki tahun kedua di Indonesia, tentunya kita semua berharap agar pandemi segera berlalu. Perkembangan kasus corona di Indonesia saat ini menjadi pemberitaan yang paling populer. Betapa tidak, kasus corona yang terus bertambah setiap harinya tentu saja membuat masyarakat semakin resah dan khawatir karena bisa saja menimpa diri sendiri ataupun keluarga terkasih. Efek terkena virus corona ini tentunya tidak main-main, sesak nafas hingga yang paling menakutkan bisa berujung kehilangan nyawa. Kita semua tentu ingin sekali berpisah dengan kondisi pandemi corona ini. Namun, mampukah kita melewati badai pandemi ini?

Jika hanya sebatas keinginan, tentu saja itu tidak cukup untuk menghalau kondisi pandemi ini. Harapan itu tentu saja dapat terwujud, bila kita membangun semangat optimisme, aksi nyata, kerja sama, sinergi upaya dan koordinasi dari seluruh lini penduduk Indonesia, baik dari sisi pemerintah, pihak swasta serta seluruh masyarakat, tak lupa pula menanamkan prinsip konsistensi pada peraturan protokol kesehatan (prokes) yang telah diterapkan dapat menjadi titik kunci bagi kita bersama

agar terlepas dari bahaya pandemi yang mematikan dan bersatu memerangi penyebaran Covid-19.

“Virus itu tidak punya otak dan kaki, penyebaran virus itu justru karena manusia”, kira-kira begitulah pesan pengingat yang disampaikan oleh dr. RA Adaninggar, SpPD sebagai kontributor Tim Medis Pandemic Talks. Melalui pesan ini tersirat bahwa melejitnya kasus virus Corona atau yang biasa disebut Covid-19 di Indonesia bisa dibilang akibat perbuatan manusianya, kita yang justru turut bahu membahu membantu penyebaran virus semakin meluas dikarenakan kita tidak menerapkan prokes yang telah digaungkan Pemerintah untuk semua lini lapisan masyarakat. Akhir-akhir ini yang semakin mengkhawatirkan dengan adanya penemuan varian covid-19 terbaru, yakni varian delta yang pertama kali muncul di India, yang saat ini telah muncul di tanah air. Varian Covid-19 delta ini memiliki penularan yang lebih cepat dibanding varian Covid-19 sebelumnya. Varian virus baru ini semakin mengganas.

Kasus Corona Indonesia

Berita lonjakan kasus corona tentunya membuat pemerintah dan masyarakat menjadi gelisah. Berpikir keras untuk mengatasi pandemi yang tak kunjung usai. Rasa kecewa pun timbul saat ada

beberapa kelompok masyarakat yang abai akan penerapan protokol kesehatan. Dapat dipahami beberapa kelompok penduduk Indonesia yang selama ini taat akan prokes, justru saat ini mulai lelah. Padahal, di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia terdapat 422 kasus kematian corona pada 25 Juni 2021, yang merupakan kasus kematian harian corona tertinggi selama sepekan terakhir, terhitung dari 21 Juni 2021. Selanjutnya pada 27 Juni 2021, kasus harian corona Indonesia mencapai rekor dengan jumlah 21.342 kasus positif corona. Kemudian 8.024 kasus sembuh dan 409 pasien corona meninggal dunia. Pada tanggal yang sama, kasus harian Corona Indonesia menempati urutan kedua tertinggi setelah India. Bahkan, total tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) untuk kasus corona di Indonesia, telah mencapai angka 70 persen. Total kumulatif kasus yang ditemukan di Indonesia hingga 27 Juni 2021 mencapai 2.115.304 kasus, 1.850.481 kasus sembuh, serta 57.138 kasus pasien meninggal. Hal ini tentu semakin mengkhawatirkan bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, khawatir saja tidak cukup, harus ada aksi nyata untuk menghalau pandemi. Komitmen bersama yang kuat serta konsisten sangat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi saat ini.

Bisakah Terbebas dari Pandemi?

Gambaran kasus corona yang terus bertambah ini, tentunya harus segera dihentikan. Mau menunggu berapa banyak lagi jumlah penduduk yang terpapar bahkan hingga menyebabkan kematian? Kita bersama memang harus menabuh genderang perang terhadap pandemi ini.

Untuk memerangi Covid-19 tentu

kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja virus tersebut di dalam tubuh, agar dapat melumpuhkan penyebaran infeksi virus tersebut di dalam tubuh. Secara umum, virus corona memiliki cara kerja yang sama, walau saat ini jenis virus corona yang terbilang banyak, terlebih lagi dengan adanya jenis varian terbaru yang lebih mengganas. Virus menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan seseorang, yang kemudian masuk ke tubuh orang lain yang berada di dekatnya. Virus masuk ke jalur pernafasan, lalu menguasai inti sel dalam tubuh sekaligus membentuk komponen virus. Selanjutnya mulai berkembang dengan cara menginfeksi sel-sel sekitarnya serta dengan cepat merambat memasuki paru-paru yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan.

Dengan demikian, langkah awal yang harus dilakukan adalah menghambat masuknya virus tersebut ke dalam tubuh dengan cara melindungi jalur jalan masuk virus tersebut. Menutupi mulut serta hidung merupakan langkah awal yang tepat untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Jelas saja langkah ini merupakan salah satu dari penerapan protokol kesehatan yang telah dikampanyekan Pemerintah untuk seluruh masyarakat. Secara sadar pastinya kita harus menerapkan gerakan pencegahan yang dikenal dengan gerakan 3T (testing, tracing, treatment), 5M (menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun penggunaan handsanitizer, menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi), bahkan gerakan yang terbaru saat ini adalah melakukan vaksinasi. Ditelisik lebih lanjut, gerakan vaksinasi harian Indonesia telah mencapai 1,3 juta vaksinasi di setiap

harinya, walaupun setelah divaksin, tetap harus menerapkan prokes ketat.

Sinergi Perangi Covid-19

Masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan testing (pengecekan) kesehatan terkait penyebaran virus Covid-19 jika mengalami gejala-gejala tertentu. Jika sudah mengetahui lebih awal, tentu penanganan tahap selanjutnya dapat segera dilakukan, dengan perlakuan tracing dan juga upaya pemberian obat-obatan dari tenaga medis.

Sisi lain dalam memerangi infeksi virus yang lebih lanjut dan yang sudah terlanjur masuk ke paru-paru, dengan melakukan teknik pernafasan dalam. Teknik mengambil napas sedalam-dalamnya selanjutnya hembuskan nafas sekaligus berusaha untuk batuk sekeras mungkin. Usaha untuk membatukkan merupakan upaya untuk mengeluarkan dahak, karena ketika dahak telah memenuhi paru-paru, saat itulah kondisi dikuasai dan sulit bernafas hingga sesak nafas akibat tertutupnya jalan masuk oksigen. Dahak ini lah yang menghalangi jalan nafas hingga dapat mengakibatkan kondisi seseorang berujung kematian. Pada saat batuk sekeras mungkin, hendaknya berada di ruang terbuka yang tidak ada keramaian atau kumpulan masyarakat, agar menghindari proses penyebaran ke depannya. Selanjutnya diperlukan aksi nyata bersama memerangi Covid-19, kerja sama mengusir pandemi dari dunia, bahkan Indonesia khususnya. Membasmi penyebaran Covid-19 tidak bisa hanya kita sendiri saja, tapi perlu sinergi dari berbagai pihak. Penyebar Covid-19 dapat dikatakan oleh manusianya itu sendiri, sejalan dengan itu pula, pandemi pun dapat berlalu bila manusianya atau kita bersama kompak memeranginya hingga ke akarnya.

Apapun jenis varian virus saat ini, strategi memeranginya tetaplah sama, dengan tetap patuh dan konsisten menerapkan 3T, 3M serta vaksinasi. Penerapan prokes dapat kita mulai dari diri sendiri dan orang-orang atau keluarga terdekat. Kita pun dapat pula mengingatkan pada kelompok masyarakat yang belum menerapkan prokes. Mengingatkan penerapan prokes juga pada kelompok masyarakat yang sudah mulai jenuh pada penerapan prokes, berusaha mengajak menjaga kesehatan masing-masing diri dengan saling melindungi.

Pihak pemerintah, baik pemerintahan pusat dan daerah serta pihak swasta dapat saling berkoordinasi dengan membuat keijakan-kebijakan terkait pembangunan kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini. Program kebijakan kesehatan yang dibuat, disertai dengan kelengkapan tenaga petugas di berbagai bidang keahlian serta tenaga profesional, lalu fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Tersedianya perlengkapan dan peralatan yang lengkap dan memadai tentunya dapat mempermudah dan memperlancar tugas tanggung jawab yang diemban masing-masing petugas sesuai bidang keahliannya. Keberhasilan program kebijakan kesehatan ini harus didukung oleh semua lapisan penduduk Indonesia. Sinergi upaya yang konsisten secara bersama-sama dapat menjadi harapan kita untuk mewujudkan terlepas dari ancaman pandemi. Sayonara Pandemi.

Data Berkualitas Di Mulai Dari Desa

Oleh : Irfarial, SE
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 12 JULI 2021



Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada suatu kesempatan mengatakan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Kalau menginginkan Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur, maka harus dimulai dari desa. Desa Masa depan Indonesia.

Kenapa desa? Karena mayoritas wilayah pembangunan berada di pedesaan, dan implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kuatnya komitmen pemerintah terlihat dari dana desa yang disalurkan pemerintah ke rekening desa terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, hingga saat ini tahun 2020 dan 2021 telah mencapai masing-masingnya sebesar Rp 72 triliun.

Namun yang lebih penting lagi adalah pembangunan desa yang merata dan berkeadilan harus sesuai dengan potensi yang dimiliki desa berdasarkan data statistik yang valid, akurat dan berkualitas. Ibarat kata pepatah Data itu Mahal, Tapi lebih Mahal Membangun Tanpa Data. Makanya berbagai kementerian/lembaga/dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan di desa terlebih dahulu melakukan semacam sensus,

survei, kompilasi produk administrasi, atau cara lainnya untuk mengumpulkan berbagai data statistik di tingkat desa. Seperti Kemendagri dengan PRODESKEL, Kemendes PDTT dengan SDGS Desa dan IDM, Kemensos dengan DTKS, BPS dengan PODES, BKKBN dengan Pendataan Keluarga, Kemendikbud dengan Dapodik, Kemenag dengan EMIS, Kemenkes dengan PIS-PK, dan lain sebagainya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pengumpulan data di desa dilakukan juga oleh pihak swasta, seperti perusahaan, media massa, bahkan perseorangan.

Namun seiring berjalannya waktu terlihat bahwa dalam pengelolaan data statistik, DESA masih ditempatkan sebagai objek, artinya berbagai data dikumpulkan di tingkat desa, akan tetapi tidak semua meninggalkan jejak data untuk desa. Apalagi data yang tidak saling terhubung berpotensi terjadi inkonsistensi dan duplikasi. Hal ini disebabkan masih rendahnya kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan data. Padahal data di tingkat desa menjadi semakin penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Desa akan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan.

Maka pembentukan DESA CANTIK - DESA CINTA STATISTIK menjadi suatu keniscayaan dan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas desa

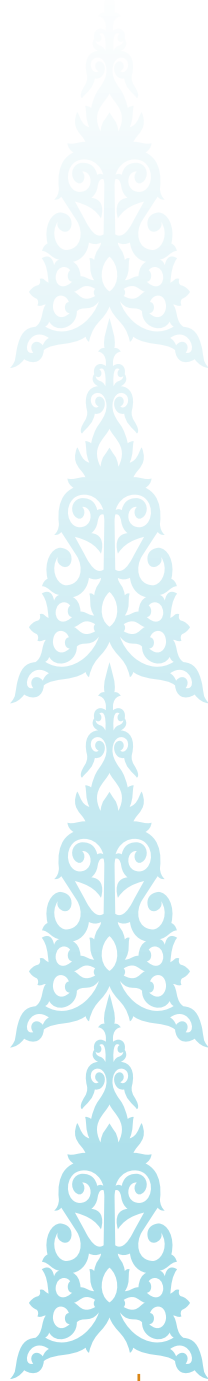
dalam mengelola dan memanfaatkan data sekaligus menjadikan desa sebagai subjek dalam mengelola dan memanfaatkan data. Sebab dengan adanya DESA CANTIK akan terjadi peningkatan literasi statistik pada perangkat/komunitas desa dengan mendekati konsep kegiatan statistik kepada praktisi di level desa yang mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengetahui cara mendapatkannya, mampu menetapkan tujuan penyelenggaraan statistik di level desa serta mampu mengimplementasikan kaidah statistik dengan benar pada level terkecil. Sehingga dengan sendirinya nanti desa mampu menggali potensi-potensi yang ada di desa dan mampu melahirkan berbagai indikator-indikator pembangunan di desanya dengan konsep dan metodologi statistik yang shahih.

Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan tahun 2019 mengatakan bahwa, “Data valid adalah sumber kekayaan baru yang kini lebih berharga dari minyak”.

Dengan Desa Cantik menjadi pintu gerbang menuju SATU DATA INDONESIA (SDI), karena ketika data registrasi/direktori desa terkelola dengan baik, maka pengembangan statistik tahap berikutnya menjadi lebih efektif. Sebab secara geospasial desa menjadi unit terkecil yang menyuplai data dan informasi untuk bahan pembangunan. Selain itu fokus pembangunan mulai bergeser tidak hanya pada sentra kegiatan ekonomi, namun juga menasar pada desa sebagai penopang ekonomi sektor nyata.

Terwujudnya Desa Cantik di Provinsi Riau tidak terlepas dari adanya kolaborasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik di daerah

baik level Provinsi maupun Kabupaten/Kota di bantu oleh unsur-unsur terkait lainnya. Apalagi dari 1875 desa yang dimiliki Provinsi Riau, hanya 425 berstatus perkotaan, sedangkan sebagian besar yaitu 1450 berstatus perdesaan (Perka BPS no.120 tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa (Perdesaan dan Perkotaan)).



Mengurangi Kebiasaan Berhutang

Oleh : Robby Junius, SE
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 16 JULI 2021



Saat ini hutang terlihat menjadi hal yang biasa. Banyak yang tidak takut dalam perihal berhutang, demi sebuah nafsu untuk secepatnya bisa memiliki apa yang diinginkan. Bahkan, bagi sebagian orang, hutang sudah menjadi semacam gaya hidup. Ada juga sebagian dari mereka di dalam hidupnya tidak pernah sedetik pun ingin lepas dari hutang. Sebelum lunas pinjaman yang pertama, dibuat lagi pinjaman yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ada juga yang terlihat sudah memiliki rumah, mobil, harta benda yang banyak, meskipun dibalik itu tidak satupun bukti kepemilikan yang dipegang, dikarenakan semuanya masih berhutang.

Jeratan kebiasaan berhutang ini didukung dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk berhutang itu sendiri. Mulai dari lembaga keuangan resmi yang berlomba-lomba mencari nasabah untuk berhutang, ataupun yang tidak resmi seperti rentenir. Bahkan saat ini tidak jarang masuk sms yang menawarkan pinjaman dengan berbagai bahasa rayuan.

Bahaya Berhutang

Sayangnya dibalik semua kemudahan yang didapatkan dengan berhutang, lebih banyak lagi dampak negatifnya yang harus dipikirkan. Berhutang akan membuat hidup menjadi tidak tenang, karena hampir setiap bulan akan dihadapkan pada tagihan

yang harus dilunasi. Bahkan banyak dari ketentuan pelunasan hutang yang dilunasi dulu adalah bunganya, bukanlah hutang itu sendiri. Kebutuhan memenuhi keinginan membuat sebagian orang mengesampingkan dampak buruk dari berhutang.

Beberapa bahaya dari berhutang diantaranya, pertama, membuat hidup tidak tenang. Stres dapat terjadi ketika seseorang mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya, dalam persoalan hutang piutang biasanya stres terjadi ketika dirinya tidak dapat membayar hutang. Bahkan ketika akan jatuh tempo setiap malam susah untuk tidur memikirkan bagaimana cara membayar hutang, sehingga timbul stres. Tak sedikit pula orang meninggal bunuh diri ataupun melakukan hal yang melanggar hukum dikarenakan stres mempunyai hutang yang besar.

Kedua, menciptakan hutang baru. Dampak terjerat dari hutang selanjutnya adalah menciptakan hutang baru atau sering disebut gali lobang tutup lobang. Hutang yang akan jatuh tempo dan tidak terbayar bisa membuat seseorang mencari hutang baru untuk menutupinya. Pada akhirnya hutang akan semakin menumpuk dan tidak terbayar.

Ketiga, membuat malas dalam bekerja. Penghasilan yang sudah dipotong

setiap bulannya untuk membayar hutang bisa membuat seseorang malas dalam bekerja. Rasa malas timbul karena penghasilan yang diterima mejadi sedikit, sehingga cenderung merasa tidak ada gunanya lagi bekerja. Bahkan bisa menjadi tidak produktif, karena akan mendorong untuk mencari penghasilan tambahan, sehingga pekerjaan utamanya terbengkalai.

Keempat, menimbulkan kebiasaan berbohong. Sebagian orang akan yang mempunyai hutang pada saat akan membayar kadang kalanya tidak berjalan lancar dan tidak dapat menepati janjinya sehingga akan mulai berbohong untuk menghindari. Lama kelamaan hal itu akan bisa menjadi kebiasaan, seperti tertuang dalam sebuah hadist "sesungguhnya seseorang apabila (sering) berhutang, maka dia sering berkata lantast berdusta, dan berjanji lantast memungkiri." (HR. Al-Bukhari).

Kelima, memutus silaturahmi. Tak peduli itu saudara, ketika jatuh tempo, tentu akan datang menagih. Berbagai alasan sering dilakukan orang yang berhutang jika tidak bisa melunasi, bahkan berbohong menjadi lazim dilakukan. Tentu saja pihak yang memberi piutang akan merasa sakit hati jika dibohongi. Ujung-ujungnya rasa sakit hati tersebut bisa merusak pertemanan, bahkan tali persaudaraan.

Keenam, merasa terhina. Sekali saja anda tidak bisa membayar hutang dan hal itu diketahui teman-teman ataupun tetangga, hal itu akan menimbulkan perasaan malu. Mereka yang dulu takjub dan menghormati anda, bisa berbalik mencibir. Hutang cepat atau lambat akan menghinakan anda. Bahkan jikapun orang tidak menghina, bisa saja perasaan anda akan merasa terhina.

Bagaimana terbebas dari hutang?

Segeralah sadari dan pahami bahwa berhutang pada akhirnya malah akan merugikan dan membahayakan. Kokohkan niat untuk terbebas dari hutang dan ubah cara pandang dengan meyakini bahwa hutang adalah keburukan. Siapapun yang berusaha untuk terbebas dari hutang namun dalam waktu yang sama belum menyadari bahwa berhutang itu sangatlah berbahaya, maka orang tersebut tidak akan pernah sukses menyelesaikan hutangnya.

Setelah paham dan berniat untuk terbebas dari hutang, segeralah membuat dan mengatur anggaran pendapatan dan belanja. Pastikan pendapatan harus selalu lebih besar dibandingkan pengeluaran. Tentunya harus berhemat dibandingkan biasanya. Kurangi kegiatan dan hobi yang berbiaya mahal, lakukan penghematan dalam pemakaian listrik dan pulsa, biasakan masak sendiri dan membawa bekal ke tempat kerja mungkin dapat membantu untuk mengerem pengeluaran.

Setelah penghematan-penghematan di atas maka alokasikanlah kelebihan dana tadi untuk segera melunasi hutang-hutang yang ada secara bertahap. Lunasi terlebih dahulu hutang-hutang kecil, lalu bayar hutang kecil yang selanjutnya, dan seterusnya. Karena dengan satu hutang terlunasi, maka akan menambah pendapatan di bulan berikutnya. Tidak kalah pentingnya juga akan membuat kepercayaan diri meningkat untuk melunasi hutang-hutang lainnya.

Langkah lainnya yang bisa diambil yaitu dengan menjual aset-aset yang tidak diperlukan. Cukupkanlah aset yang penting-penting terlebih dahulu dan lepaslah aset yang tidak atau belum terpakai. Jika dahulu

pernah berhutang untuk membeli aset seperti membeli tanah atau rumah dan hanya digunakan sebagai investasi, maka lebih baik dilepas saja untuk menutupi hutang-hutang yang ada.

Dengan bahaya yang ditimbulkan oleh berhutang, maka sedapat mungkin hindarilah untuk berhutang. Hiduplah sesuai kemampuan dan selalulah memandang ke bawah. Jikapun masih ada hutang lunasilah dengan segera. Jangan terlintas untuk menyepelkan hutang karena “siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah)

<https://riau.bps.go.id>

Dongkrak Ekspor Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Riau

Oleh : Agus Nuwibowo
OPINI TERBIT DI RIAU POS, 20 AGUSTUS 2021



Pada tanggal 5 Agustus 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau kembali merilis angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, yaitu sebesar 5,13 persen. Angka pertumbuhan tersebut cukup tinggi ditengah Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, bahkan kota pekanbaru masuk kedalam PPKM level 4.

Sehari setelahnya, Gubernur Riau, H Syamsuar dalam halaman utama Riau Pos kembali menyampaikan, “Tumbuh 5,13 persen, Perekonomian Riau berkontribusi besar di Sumatera”. Beliau juga mengucapkan syukur dan mengatakan bahwa hasil yang telah dicapai ini merupakan kado Ulang Tahun atas hari jadi Provinsi Riau yang ke 64. Pada Saat yang bersamaan, BPS menuai banyak kritik atas nilai Pertumbuhan Ekonomi level Nasional yang dianggap terlalu fantastis dimasa Pandemi Covid-19 ini.

Menjawab ini semua, tepat pada Hari Ulang Tahun Riau ke 64, kepala BPS Provinsi Riau menyampaikan bahwa Ekspor luar negeri menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Riau (Riau Pos, 9 Agustus 2021). Terlepas dari berbagai persepsi yang disampaikan banyak pihak, menjadi tidak terbantahkan jika ekspor Riau yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

Jika kita lihat perkembangan data

Ekspor Riau, yang dirilis oleh BPS setiap pertengahan bulan, menunjukkan bahwa selama tahun 2021, ekspor Riau terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Sampai dengan bulan Juli 2021, ekspor riau telah mencapai US\$ 10,6 Milyar, atau telah terjadi peningkatan ekspor sebesar 46,90 persen jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2020, bahkan jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2, peningkatan nilai ekspor triwulan II tahun 2021 lebih tinggi lagi dibandingkan nilai ekspor triwulan II tahun 2020 yaitu mencapai 63,29 persen.

Ekspor Provinsi Riau lebih didominasi oleh produk-produk hasil industri yang pada bulan Juli lalu andilnya mencapai 86,55 persen, sedangkan migas 12,44 Persen sedangkan pertanian dan yang lainnya hanya 1,01 persen. Lantas siapakah yang menikmati hasilnya?.

Pengusaha industri tentunya orang pertama yg menikmati hasil tersebut namun karena didominasi oleh industri komoditas pertanian, tidak dapat dipungkiri jika petani perkebunan juga menikmati hasilnya atas penjualan hasil pertaniannya yang menjadi bahan baku industri pertanian. Termasuk yang ikut menikmatinya adalah pengusaha transportasi dan pedagang pengumpul produk pertanian yang tidak sedikit jumlahnya.

Begitu besarnya Potensi ekspor hasil pertanian, dan untuk menggerakkan minat pengusaha di sektor pertanian, pada tanggal 14 Agustus lalu Presiden Joko Widodo melepas ekspor komoditas pertanian yang dilakukan secara virtual dari istana negara. Potensi yang besar dari ekspor komoditas hasil pertanian tentunya bukan hanya produk langsung dari hasil pertanian tetapi juga komoditas hasil industri pertanian. Karena hasil pertanian yang telah berubah karena proses pengolahan, akan diklasifikasikan kedalam sektor Industri, padahal bisa jadi untuk beberapa komoditas jika dinilai secara proses tidak terlalu banyak berubah. Tetapi dengan menjual produk olahan, kita akan mendapatkan nilai keuntungan ganda, pertama nilai tambah pertanian itu sendiri, dan yang berikutnya merupakan nilai tambah hasil industri. Semakin panjang proses pengolahannya, keuntungan dari proses tersebut semakin besar tentunya. Tidak hanya keuntungan Netto yang didapatkan tetapi juga nilai tambah atas penyerapan tenaga kerja juga diperhitungkan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa industri pengolahan produk hasil pertanian yang bergerak di Provinsi Riau merupakan industri besar, yang keberadaannya mungkin tidak memberikan manfaat secara langsung kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah tetap dituntut agar keberadaan Industri komoditas ekspor tersebut dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Upaya untuk menjadi tuan rumah dinegeri sendiri masih membutuhkan proses yang panjang pada skala industri untuk komoditas ekspor. Masyarakat kita masih berada di hulu dalam proses bisnis ini dan belum mengambil peranan yg penting. Memang jika dilihat secara penguasaan

olahannya, petani perkebunan rakyat sudah menguasai lebih dari 65 persen atas lahan sawiit di Provinsi Riau, hanya saja dari produktifitasnya masih berada di bawah lahan yang dikuasai oleh perusahaan.

Langkah berikutnya, selain menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk tumbuhnya perekonomian melalui industri dibidang pertanian, kita juga harus menyiapkan pemuda-pemuda Riau menjadi SDM yang unggul dan kompetitif dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta inovatif dalam menciptakan produk-produk hasil olahannya yang mampu bersaing di pasar internasional. Ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama.

Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir ?

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,M.M

OPINI TERBIT DI GORIAU.COM, 3 SEPTEMBER 2021



COVID-19 telah merenggut banyak jiwa, mulai dari masyarakat biasa, pejabat tinggi, ulama, bahkan tenaga kesehatan juga telah menjadi korban keganasan virus ini.

Belum lama ini media diramaikan pemberitaan dari salah seorang presenter yang juga berprofesi sebagai youtuber terkenal di Indonesia. Meskipun masih dapat terselamatkan, tetapi dikabarkan dia hampir menemui ajalnya akibat dari badai sitokin yang menyerangnya setelah terinfeksi Covid-19.

Berapa banyak lagi kita harus mendengar korban akibat Covid-19 dan kapan pandemi ini akan segera berakhir?

Kasus kematian harian Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah mencatat rekor dunia. Menurut data Worldometer, kasus meninggal dunia akibat Covid 19 di Indonesia total mencapai 127 ribu kasus (kondisi 24 Agustus 2021). Angka yang sangat besar tetapi bukan prestasi yang patut dibanggakan. Kendati telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, tetap saja penularan dan penyebaran Covid-19 masih belum teratasi.

Sudah banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari sosial distancing, pembatasan sosial

berskala besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Darurat, PPKM Mikro, sampai akhirnya PPKM Level 1-4. Untuk kebijakan PPKM, banyak netizen Indonesia yang mengibaratkan seperti cerita sinetron "Cinta Fitri" yang pernah booming pada masanya. Terus berkelanjutan dengan episode dan waktu yang sangat panjang.

Pemberlakuan PPKM atau PPKM Mikro Darurat telah ditetapkan pemerintah sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Aturan ini pada awalnya hanya diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali. Pengetatan aktivitas masyarakat ini dilakukan dengan berbagai ketentuan, di antaranya 100% persen WFH untuk sektor non esensial, 100% daring untuk kegiatan belajar mengajar, hanya menerima delivery/take away untuk kegiatan makan/minum di tempat umum, pembatasan jam operasional maksimal pukul 20.00 dan kapasitas maks 50% untuk tempat pembelanjaan, dan melakukan penutupan area publik. Untuk sektor esensial seperti keuangan dan perbankan; pasar modal; sistem pembayaran; TI dan komunikasi; perhotelan, dan industri orientasi ekspor tetap dapat melaksanakan kegiatan dengan ketentuan 50% WFO.

Sektor kritical seperti energi; kesehatan; keamanan; logistik dan transportasi; industri makanan, minuman dan penunjangnya; semen, petrokimia, dan

lain-lain beroperasi 100% WFO. Demikian juga dengan apotek dan toko obat dapat beroperasi selama 24 jam.

Setelah diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, mulai tanggal 5 Juli 2021 PPKM Mikro juga mulai diberlakukan di seluruh kabupaten/kota di luar Jawa dan diperketat untuk 43 kabupaten/kota. Ini dilakukan dengan harapan penekanan laju penularan dan penyebaran tidak hanya terjadi di Jawa dan Bali saja tetapi juga di kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia.

Merasa belum maksimal, tanggal 21 Juli 2021 PPKM diperpanjang dan mulai menggunakan istilah baru, yaitu level yang dimulai dari 1 hingga 4. Hingga saat ini PPKM masih terus diperpanjang dan entah sampai kapan, atau justru akan berubah nama lagi dengan perpanjangan waktu yang lebih lama.

Seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk Pengetatan PPKM pasti sangat jelas karena dihasilkan melalui kajian-kajian oleh para tim ahli dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Jadi, jika kasus Covid-19 masih terus bertambah dan kita menyalahkan aturan yang ditetapkan, rasanya tidak benar. Mungkin ada hal lain yang menyebabkan aturan ini tidak berjalan maksimal. Penerapan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih tergolong rendah.

Saat PPKM misalnya, penutupan dan penyekatan jalan banyak dilakukan oleh petugas kepolisian. Menurut Ajun Komisarlis Angga Wahyu Prihantoro yang dilansir melalui liputan6.com (29/07/2021), penyekatan dilakukan karena masih banyaknya masyarakat di luar sektor esensial yang beraktivitas secara normal. Ini

dapat diartikan masih banyak masyarakat yang masih belum mematuhi aturan yang ada.

Bentuk ketidakpatuhan masyarakat juga dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS. Di Riau, sebanyak 37% responden masih abai atau jarang sekali menggunakan 2 masker.

Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat di lingkungan sekitar dalam menggunakan 2 masker masih cukup rendah. Sebanyak 46,1% responden menjawab masyarakat masih abai menggunakan 2 masker. Padahal imbauan ini dilakukan karena varian virus corona sudah berkembang dan lebih berbahaya (Rilis BPS Provinsi Riau, 05/08/2021).

Begitu juga dengan pelaksanaan vaksin yang diberikan gratis oleh pemerintah. Dari hasil survei terlihat bahwa sebanyak 28,8% responden belum melakukan vaksinasi karena khawatir dengan efek samping atau tidak percaya akan efektivitas vaksin. Ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi.

Hal berbahaya lainnya, lebih dari dari separuh (51,3%) responden yang pernah terpapar Covid-19 tidak melaporkan keterpaparannya, padahal mengetahui keberadaan Satgas atau tempat pelaporan di lingkungan tempat tinggalnya. Ini berarti banyak pasien yang melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah dan tidak melapor.

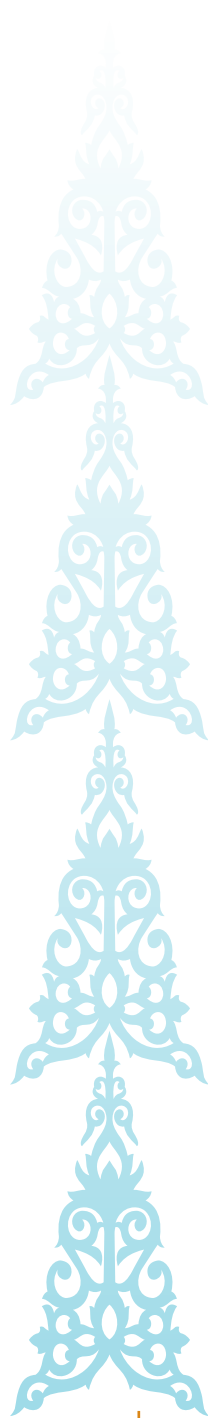
Epidemiolog mengatakan bahwa kebijakan isolasi mandiri di rumah disebut tidak efektif dalam membendung

penyebaran virus corona, bahkan berkontribusi besar dalam menciptakan klaster keluarga (bbc.com, 06/10/2021).

Apa lagi jika tingkat kesadaran orang yang terpapar sangat rendah dan abai menerapkan protokol kesehatan, maka penularan dan penyebaran virus corona akan semakin masif. Dari rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, penerapan protokol kesehatan melakukan vaksinasi, pelaporan kepada satgas, serta kesadaran melakukan isolasi mandiri yang tepat, menjadi sangat wajar jika angka kasus Covid-19 masih terus meningkat.

Jika pemerintah daerah, Satgas Covid-19, dan masyarakat tidak dengan cepat menyadari hal ini dan segera mengambil tindakan, maka bukan tidak mungkin akan segera terjadi ledakan kasus Covid-19 yang tidak dapat dibendung.

Kalau saja sedari awal kita bersama mau mematuhi aturan-aturan yang ada, mungkin penyebaran dan penularan Covid-19 sudah berakhir. Tidak ada kata terlambat, mari kita bersatu untuk mengakhiri pandemi ini. Semoga.***



Menyoal Gender Di Masa Pandemi Covid-19

Oleh : Puji Wahyu Widayati, SST

OPINI TERBIT DI RIAU POS, 24 SEPTEMBER 2021



Isu gender selalu menjadi isu utama dalam pembangunan. Dimana masih ada ketimpangan antara pembangunan laki-laki dan perempuan. Ketimpangan pembangunan laki-laki dan perempuan ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Gender (IPG). Angka IPG sendiri diinterpretasikan sebagai berikut, jika kurang dari 100 maka pembangunan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Lebih dari 100 pembangunan perempuan lebih tinggi dan jika sama dengan 100 angka tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau sebesar 88,14. Jelas angka ini menunjukkan bahwa pembangunan perempuan masih lebih rendah daripada pembangunan laki-laki.

Memang kodrat laki-laki dengan perempuan dari awal berbeda. Laki-laki lebih banyak berperan di luar sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan perempuan lebih banyak melakukan tugas domestik. Sehingga dalam beberapa aspek perempuan masih kurang unggul dibanding laki-laki.

Contohnya dalam hal pendapatan. Laki-laki yang lebih fokus untuk dapat menghidupi keluarga tentu akan memiliki

pencapaian karir yang lebih cepat dibanding perempuan. Perempuan, yang meski berkarir namun tetap harus memerhatikan keluarga menjadi tidak terlalu mementingkan karir mereka. Belum lagi masalah anak yang biasanya memicu perempuan untuk melepaskan pekerjaannya.

Memang saat ini sudah banyak perempuan yang menjadi pimpinan atau direktur sebuah perusahaan, namun jumlah mereka masih kalah dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga ketimpangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki cukup besar di Riau. Jika pendapatan per kapita laki-laki rata-rata sebesar hampir 16 jutaan per tahun maka perempuan hanya setengahnya yaitu sekitar 7 jutaan per tahun. (BPS Provinsi Riau 2020)

Padahal baik dimensi kesehatan maupun pendidikan perempuan di Riau tidak kalah dengan laki-laki, untuk pembangunan pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah seimbang, sedangkan untuk pembangunan kesehatan justru perempuan lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki.

Tentu saja menyetarakan pendapatan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah semata. Ada semacam kekuatan masyarakat di belakangnya demi mewujudkan

pembangunan gender yang setara atau merata.

Kalangan perempuan sendiri banyak yang memegang prinsip bahwa perempuan memang sudah selayaknya di rumah saja. Tentu saja ini bukanlah suatu prinsip yang salah, karena memang wanita memiliki peran besarnya di rumah. Dia adalah koki, bendahara, guru, dokter, petani, juru bersih dan segudang profesi lainnya yang tersemat padanya. Dengan banyaknya tanggung jawab domestik yang diembannya sebagian perempuan beranggapan bahwa hal itu memang semestinya dia lakukan.

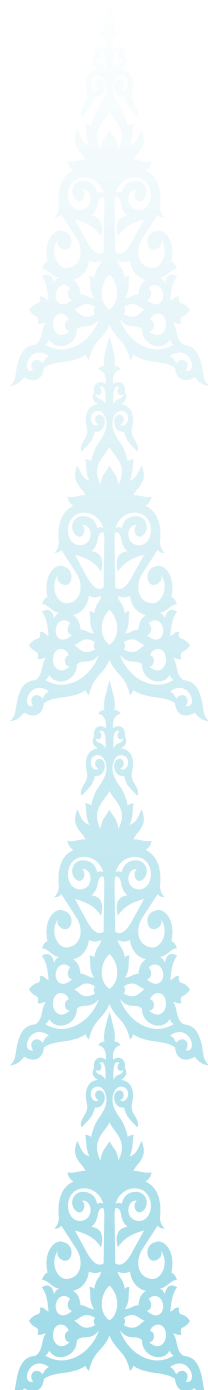
Ada juga perempuan yang meniti karirnya di luar. Semua tugas domestik bisa dikerjakan oleh jasa yang kini banyak tersedia. Mau makan tinggal pilih saja mau beli apa. Rumah kotor tinggal panggil tukang jasa kebersiha, atau setrikaan menggantung tentu saja tinggal lempar ke laundry.

Ketika pandemi merebak, banyak karyawan yang dirumahkan yang tentu saja sebagian adalah tulang punggung keluarga, perempuanpun mulai bergerak. Hanya dari rumah mereka mulai mendapatkan penghasilan. Tanpa meninggalkan rumah dan tanggung jawab rumahannya. Tentu saja hal ini bisa menjadi titik perhatian pembangunan bagi pemerintah.

Pemerintah bisa mulai dengan membuat kebijakan di bidang usaha online bagi perempuan, sementara perempuan tak perlu keluar rumah dan bisa mengurus keluarga serta berpenghasilan. Dengan peran ganda yang dimilikinya semoga generasi masa depan semakin baik dan kesejahteraan keluarga bisa tercapai.

Selain itu pendapatan perempuan

yang meningkat akan memperkecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dalam tanda kutip tanpa mengabaikan kodrat perempuan yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.



HARI STATISTIK NASIONAL, MOMENTUM KEJIL MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERPERADABAN

Oleh : Muji Basuki, SST,M.Si
OPINI TERBIT DI GORIAU.COM, 26 SEPTEMBER 2021



Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional setiap tanggal 26 September. Tanggal 26 September ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional karena pada tanggal 26 September 1960 Pemerintah RI memberlakukan UU No. 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti Statistiek Ordonantie 1934. Akhirnya Hari Statistik Nasional disetujui pemerintah Republik Indonesia dengan latar belakang lahirnya Undang-undang tersebut.

Hari Statistik Nasional menjadi penting diperingati bukan hanya dalam konteks lahirnya undang-undang tentang statistik tahun 1960 yang lalu, tetapi juga menjadi penting sebagai momentum tahunan untuk membangun kesadaran dan budaya statistik di tengah masyarakat.

Apa Urgensi Kesadaran Statistik Bagi Sebuah Bangsa?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Sementara Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data

Definisi diatas menunjukkan bahwa statistik tidak sekedar ilmu yang meletakkan data sebagai data an sich, tetapi statistik adalah ilmu yang “memperlakukan” data secara ilmiah dan bertanggung jawab. Disebut ilmiah karena statistik menyediakan banyak penghitungan parameter yang dapat dihasilkan dari proses pengolahan data. Dan disebut bertanggung jawab karena statistik “memperkenankan” sebuah kesimpulan diambil setelah proses rangkaian pengujian statistik dilakukan terhadap data.

Di era kemajuan informasi seperti saat ini, terminologi “data” telah jauh berkembang dibandingkan sebelumnya. Jika dahulu orang mempersepsikan data sebagai kumpulan angka, jumlah dan atau bilangan, maka di era saat ini kumpulan informasi bisa menjadi “data”, dan itulah yang secara statistik biasa disebut dengan data kualitatif. Karenanya, statistik di era saat ini bermakna tidak hanya mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data yang bersifat angka, tetapi secara lebih luas statistik bermakna sebagai proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan berbagai informasi yang datang dari berbagai sumber.

Dengan makna seperti itu, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa statistik adalah sebuah tradisi ilmiah yang

penting dihadirkan dalam kehidupan individu maupun sosial. Bahkan lebih dari sekedar tradisi ilmiah, statistik bahkan penting dihadirkan sebagai sebuah budaya dalam kehidupan. Karena dengan menjadikan statistik sebagai budaya dengan makna yang seperti itu, maka masyarakat akan terbiasa bersikap secara ilmiah dan bertanggung jawab, dimulai dari mengumpulkan, menelaah, mengolah, menganalisis, menguji hipotesa atau dugaan, sebelum sebuah kesimpulan ditetapkan atas data dan atau informasi yang berkembang.

Budaya Statistik dan Masyarakat Madani

Nurcholis Madjid (Cak Nur) mendefinisikan civil society sebagai masyarakat madani yang berkarakter santun, beradab, dan teratur. A. Ubaedillah dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) 2003, menjelaskan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan stabilitas masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu karakter utama masyarakat madani adalah berperadaban demi terwujudnya stabilitas dalam kehidupan bersama. Nilai peradaban manusia dalam kehidupan bersama salah satunya diukur dari sejauh mana kematangan individu di masyarakat tersebut menyikapi berbagai dinamika yang muncul akibat interaksi sosial yang terjadi. Di sisi lain, sebuah dinamika sosial seringkali muncul diawali dari sikap yang tidak proporsional terhadap berbagai informasi yang berkembang. Ketika scope masyarakat semakin luas, maka potensi

munculnya dinamika sosial yang diakibatkan sikap tidak proporsional dalam mengelola informasi juga akan semakin besar. Terlebih ketika varian kemajemukan struktur sosialnya semakin tinggi, maka potensi dinamika sosialnya juga akan semakin besar.

Disinilah pentingnya menghadirkan statistik sebagai sebuah budaya di tengah masyarakat. Bahwa dengan budaya statistik yang baik, maka tiap individu di dalam masyarakat tidak akan dengan mudah menjudge sebuah data dan atau informasi yang berkembang, sebelum dirinya melakukan tahapan-tahapan statistik secara ilmiah dan bertanggung jawab. Itulah mengapa ada sebuah kaidah yang menyebutkan :”jika kamu tidak melakukan pengecekan (baca : “proses statistik”) terhadap informasi yang datang kepadamu, maka tunggulah akan datangnya kehancuran dalam kehidupan mu”

Sebuah bangsa membutuhkan rangkaian momentum-momentum kecil secara rutin untuk menjadi besar, dan Hari Statistik Nasional (HSN) adalah sebuah momentum kecil bagi Bangsa Indonesia untuk berkembang menjadi bangsa besar yang berperadaban. Semoga

Dimensi Kemiskinan Perempuan

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

OPINI TERBIT DI THE COLUMNIST.ID, 12 OKTOBER 2021



Perempuan memiliki peran penting dalam peradaban suatu bangsa, oleh karenanya hasil pemanfaatan sumber daya ataupun pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh perempuan. Berbagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan pun terus dilakukan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Demikian juga dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dalam praktiknya selalu melibatkan kaum perempuan di dalamnya.

Kaum perempuan yang secara kodratnya mengandung, melahirkan, dan merawat anak sering terjebak dalam urusan rutin memenuhi kebutuhan domestik keluarga yang tentunya memakan waktu dan tanpa bayaran. Mayoritas perempuan usia kerja lebih memilih mengurus rumah tangga daripada bekerja. Kondisi ini menjadikan perempuan sebagai objek yang rentan dalam dimensi kemiskinan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2020, ada sebanyak 15,88 persen rumah tangga miskin di Indonesia yang dipimpin oleh perempuan sebagai kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangga dalam konsep BPS merujuk pada orang yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangganya.

Ini berarti bahwa pada kondisi tersebut, seorang perempuan dipaksa

untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin memiliki tantangan dan hambatan tersendiri, tentunya perlu usaha yang jauh lebih ekstra agar mampu bertahan dalam kemiskinan, apalagi jika hendak membawa keluarganya keluar dari pusaran kemiskinan.

Pendidikan merupakan poin penting dalam menjawab berbagai hambatan dan tantangan tersebut. Dengan pendidikan yang tinggi dan berkualitas, kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin terbuka lebar. Pada sektor formal, persentase perempuan sebagai tenaga profesional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 48 persen dari total tenaga profesional di Indonesia adalah perempuan.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS menunjukkan perempuan yang berada di posisi managerial mengambil porsi sebanyak 33 persen. Namun jika dicermati lebih jauh, dari semua perempuan yang berada di posisi managerial tersebut, lebih dari 80 persen memiliki tingkat pendidikan di bawah SMU. Pencapaian pendidikan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan berakibat pada perbedaan upah yang diterima.

Sementara itu, keberadaan sektor informal saat ini semakin menjamur. Pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang juga menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk miskin. Hal ini cukup beralasan mengingat untuk memasuki sektor ini tidak diperlukan persyaratan khusus seperti halnya sektor formal, sehingga mudah dimasuki oleh penduduk miskin.

Sektor ini juga terbukti mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan sektor formal. Dalam realitanya pun sektor informal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Oleh karenanya, menjadi daya tarik tersendiri bagi perempuan untuk turut serta ambil bagian di dalamnya, sehingga tak heran jika sektor ini didominasi oleh kaum hawa.

Banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal ini menimbulkan permasalahan lain, yakni adanya ketimpangan upah. Upah pekerja pada sektor informal cenderung lebih rendah dan tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja.

Rendahnya, upah dan ketiadaan jaminan sosial ini tentu akan berdampak pada perempuan itu sendiri dan keluarganya, terlebih jika perempuan tersebut berstatus sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kebutuhan keluarganya. Dengan rendahnya upah yang diterima akan semakin sulit bagi perempuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut.

Upaya pemutusan rantai kemiskinan pada kaum perempuan hendaknya dilaksanakan berbasis gender, tidak hanya dengan program pengentasan

kemiskinan secara umum. Berbagai program pemberdayaan perempuan yang dijalankan juga hendaknya diiringi dengan peningkatan kapabilitas perempuan itu sendiri, yakni berupa peningkatan pendidikan dan keterampilan (skill).

Peningkatan kapabilitas ini menjadi syarat mutlak yang dibutuhkan oleh seorang perempuan untuk bisa lepas dari ketidakberdayaannya. Pendidikan dan keterampilan perempuan yang memadai akan menjadi indikator penting dalam penurunan kesenjangan upah.

Selain itu, program bantuan sosial yang diberikan bagi keluarga miskin, terutama yang bersifat tunai hendaknya disalurkan lewat perempuan. Saat ini, ada banyak bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang merupakan bagian dari program penanganan pandemi covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

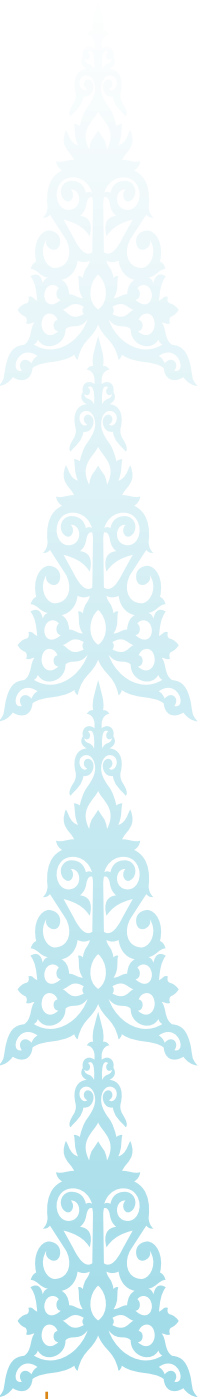
Bantuan sosial (bansos) tersebut sebagian besar menjadikan perempuan sebagai target penerima, seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH). Dana bantuan tersebut sudah selayaknya dipegang oleh perempuan mengingat perempuan biasanya berperan sebagai pengelola keuangan keluarga.

Keluarga miskin dengan perempuan sebagai tulang punggung keluarga sudah sepatutnya mendapat prioritas pertama dalam berbagai program bantuan sosial. Kebutuhan domestik keluarga dan pendidikan anak bagi perempuan merupakan hal yang paling urgent untuk dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya.

Karenanya, jika penghasilan perempuan meningkat, maka kesejahteraan

keluarga juga akan meningkat, serta pendidikan anak menjadi lebih terjamin. Dengan kualitas pendidikan yang semakin baik, seorang anak memiliki harapan besar untuk tidak mewarisi kemiskinan kedua orang tuanya.

<https://riau.bps.go.id>



Tumpukan Sampah Dalam Perspektif Suwei Lingkungan

Oleh : Muji Basuki, SSt,M.Si
OPINI TERBIT DI GORIAU.COM,24 NOVEMBER 2021



“TERIMA KASIH BAGI YANG TIDAK
BUANG SAMPAH DISINI”

“DILARANG KERAS BUANG SAMPAH
DI SINI”

“HANYA BINATANG YANG BUANG
SAMPAH DISINI”

Begitulah tulisan yang sering kita temukan di kota-kota di Indonesia, mulai dari tulisan yang sopan sampai yang kasar. Bahkan mungkin tulisan seperti itu juga ada di wilayah-wilayah pedesaan.

Tulisan-tulisan tersebut merupakan ekspresi kekesalan warga atas tumpukan sampah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka, atau di jalan-jalan umum yang dilewati banyak warga.

Terkadang kita temukan ada lokasi atau ruas jalan yang awal mulanya bersih, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada satu dua kantong sampah yang terletak di lokasi itu, dan beberapa waktu berikutnya tumpukan sampah pun sudah terlihat menggunung.

Bahkan tidak sedikit kasus, di mana tumpukan sampah sampai memakan badan jalan. Tentu tumpukan sampah itu sangat mengganggu, baik mengganggu dari sisi keindahan kota, kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, bahkan gangguan terhadap kehidupan sosial.

Dalam perspektif manajemen kota, tentu situasi ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah kota setempat, karena memang salah satu Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari pemerintah kota seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan jaminan ketenteraman dan ketertiban bagi warganya. Kebersihan kawasan adalah bagian dari ketenteraman dan ketertiban yang dimaksud.

Manajemen kebersihan kawasan dan lingkungan yang diperankan oleh pemerintah kota tentu dimulai dari pendekatan edukatif, persuasif, preventif dan kuratif.

Dalam praktiknya, di banyak kota di Indonesia, manajemen kebersihan kawasan lebih menonjolkan pendekatan preventif dan kuratif. Hal ini terlihat dari fokus manajemen kebersihan kawasan yang hanya berfokus pada aspek penyediaan lokasi pembuangan sampah, penyediaan tenaga kebersihan, penyediaan alat angkut sampah, dan aspek-aspek lain yang bersifat preventif dan kuratif.

Tentu saja pendekatan seperti ini tidaklah salah, bahkan harus terus dilakukan dan terus ditingkatkan. Akan tetapi ada satu akar persoalan lain yang tidak bisa tersentuh dengan hanya pendekatan

preventif dan kuratif, yaitu persoalan kesadaran dan mind set masyarakat tentang pengelolaan sampah yang mereka produksi, baik di rumah tinggal maupun di luar rumah tinggal.

Mind Set Sebagai Salah Satu Akar Persoalan Sampah

Memahami pentingnya dampak mind set masyarakat terhadap lingkungan secara global, BPS melakukan kegiatan Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH). Sekalipun survei ini terakhir kali dilakukan BPS pada Tahun 2013, akan tetapi hasil dari survei ini masih tetap relevan, karena perilaku merupakan ekspresi dari mind set, dan butuh waktu yang lama untuk mengubah mind set seseorang.

Dalam terminologi ilmiah mind set didefinisikan sebagai kumpulan kepercayaan atau cara berfikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang (Adi W Gunawan, 2013). Dalam konteks sampah, mind set masyarakat terhadap sampah adalah cara pandang mereka tentang sampah yang dihasilkan, mulai dari cara pengelolaan sampai implikasinya terhadap lingkungan secara global.

Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup sendiri adalah survei dengan sampel rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Dari hasil SPPLH 2013 diketahui bahwa di Indonesia masih cukup besar persentase masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, yaitu sebesar 19,88% dari total rumah tangga di Indonesia.

Persentase ini semakin besar jika ditambah dengan persentase rumah

tangga yang membuang sampah di got/laut/sungai yang sebesar 14,16%. Artinya, ada 34,04% rumah tangga yang mengelola sampah yang dihasilkannya dengan cara dibuang sembarangan.

Jika dikonversi secara jumlah, persentase 34,04 rumah tangga yang membuang sampah secara sembarangan ini tentu bukan jumlah yang sedikit. BPS mencatat pada Tahun 2019 ada 68,7 juta rumah tangga di Indonesia. Artinya, ada 23,63 juta rumah tangga yang membuang sampah yang dihasilkannya dengan cara sembarangan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2019, rata-rata sampah yang dihasilkan per orang per hari diasumsikan sebesar 0,7 kg. Jika dalam satu rumah tangga rata-rata anggota rumah tangganya sebanyak 4 orang, berarti ada 2,8 kg per hari rumah tangga menghasilkan sampah.

Maka, diperkirakan ada $2,8 \text{ kg} \times 23,63 \text{ juta} = 66,16 \text{ juta kg}$ atau 66 ribu ton sampah per hari, atau sekitar 1,98 juta ton sampah per bulan yang dibuang sembarangan oleh rumah tangga di seluruh Indonesia. Tentu ini belum termasuk sampah yang dihasilkan oleh institusi lain di luar rumah tangga.

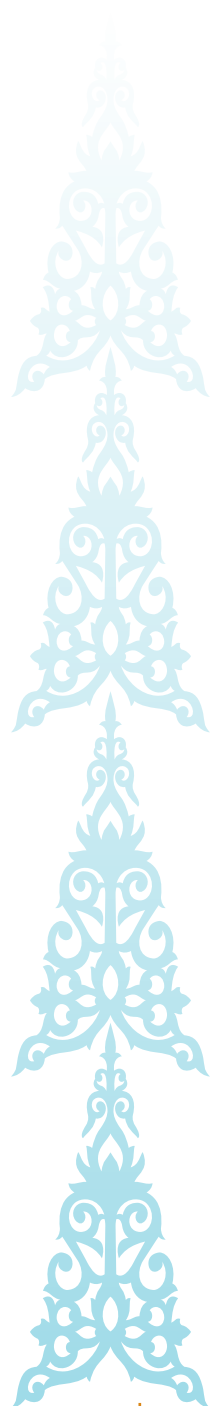
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam timbulnya permasalahan tumpukan sampah di berbagai tempat di Indonesia.

Tentu perlu ada penelitian dan atau referensi lain untuk mengetahui secara lebih objektif kontribusi dari luar institusi rumah tangga dalam terciptanya penumpukan sampah di sembarang tempat.

Dari uraian di atas, menjadi penting diperkuat pendekatan edukatif untuk mengubah mind set masyarakat dalam pengelolaan sampah agar lebih ramah terhadap lingkungan. Karena, tanpa terbangunnya mind set yang baik di tingkat masyarakat, maka program apa pun yang bersifat preventif dan kuratif yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan efektif mengatasi permasalahan tumpukan sampah.

Semoga pemerintah ke depan lebih mampu menyusun strategi pengelolaan sampah yang lebih holistik, yang mampu mengatasi permasalahan sampah mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pendekatan penanganan yang bersifat edukatif, persuasif, preventif hingga kuratif.***

<https://riau.bps.go.id>



Harga Batu Bara Dunia Melejit, Akankah Indonesia Diuntungkan?

Oleh : Jessica Nauli Br.Siringo Ringo S.Tr.Stat.

OPINI TERBIT DI GORIAU.COM, 24 DESEMBER 2021



Meningkatnya kebutuhan energi merupakan kondisi yang tidak terelakkan seiring dengan berjalannya roda perekonomian, meningkatnya jumlah penduduk, dan bergesernya gaya hidup masyarakat yang semakin membutuhkan energi.

Salah satu sumber energi utama di Indonesia adalah batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kontribusi batubara dalam pasokan energi primer di Indonesia adalah sebesar 38,46 persen.

Di kancah dunia, Indonesia juga memiliki peran penting dalam memasok batubara di berbagai negara. Pada tahun 2020, Statistical Review of World Energy oleh BP mencatat Indonesia sebagai negara produksi batubara terbesar ketiga di Asia Pasifik dengan total produksi 562,5 juta ton.

Dengan total produksi tersebut, Indonesia berkontribusi atas 7,3 persen batubara di dunia. Tepat di bawah posisi Indonesia, terdapat Australia yang berkontribusi atas 6,2 persen produksi batubara dunia. BP juga mencatat Australia dan Indonesia sebagai dua negara eksportir terbesar di dunia dengan kontribusi masing-masing sebesar 29,1 persen dan 26,8 persen.

Tingginya produksi batubara di Indonesia tak lepas dari besarnya cadangan batubara di Indonesia, dan teknologi eksploitasi batubara yang relatif sederhana. Selain itu, tingginya permintaan internasional menjadi faktor pendorong meningkatnya produksi batubara. Saat ini, sumber peningkatan permintaan batubara Indonesia berasal dari negara Cina.

Potensi Batubara Indonesia

Sejak tahun 2020, Cina berseteru dengan Australia akibat konflik dugaan sumber penyebaran COVID-19. Ketegangan kedua negara dipicu oleh pengajuan Perdana Menteri Australia kepada World Health Organization (WHO) untuk melakukan penyelidikan global atas penyebab munculnya Covid-19.

Australia menduga bahwa Cina merupakan dalang di balik pandemi yang terjadi dan bertanggung jawab untuk menanganinya. Sejak saat itu, Cina merespons kecaman Australia dengan memberlakukan tarif impor kepada beberapa komoditas Australia, termasuk batubara. Alhasil, Cina mulai beralih untuk meningkatkan permintaan batubaranya ke Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Cina merupakan negara produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia

dengan persentase sebesar 50,4 persen dan 54,3 persen terhadap total dunia (BP, 2020).

Kekurangan suplai di Cina akibat persetujuan dengan Australia tersebut akhirnya diisi oleh Indonesia. Selain itu, posisi batubara Indonesia yang semakin jaya disokong dengan harga batubara dunia yang melejit.

Menurut data Kementerian ESDM, harga acuan batubara bulan November 2021 meningkat 285,95 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pengamat Ekonomi Zachary Halaschak dalam tulisannya di Washington Examiner menyatakan bahwa terdapat beberapa penyebab peningkatan harga batubara, yaitu gangguan rantai pasokan, meningkatnya permintaan pasca-pandemi, dan harga gas alam yang tinggi.

Di balik besarnya peran batubara Indonesia dan meningkatnya harga batubara dunia, apakah hal ini merupakan kondisi baik bagi Indonesia?

Benarkah Indonesia Diuntungkan?

Pada acara World Leader Summit on Climate Change ke-26 (COP-26) di Glasgow, Indonesia turut menandatangani deklarasi Global Coal to Clean Power Transition atau transisi batubara global menuju energi bersih. Poin pertama dari deklarasi tersebut adalah meningkatkan penyebaran energi bersih dan efisiensi energi.

Kedua, meningkatkan teknologi dan kebijakan untuk transisi dari pembangkit listrik yang tidak menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (unabated coal power generation) di tahun

2030 untuk mayoritas negara. Secara global, implementasi poin kedua diharapkan dapat tercapai pada tahun 2040.

Ketiga, menghentikan penerbitan izin mengenai proyek baru PLTU batubara yang tidak menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.

Keempat, memperkuat upaya domestik dan internasional untuk menyediakan kebijakan finansial, teknis, dan dukungan sosial untuk transisi yang adil dan inklusif.

Dari keempat poin tersebut, Indonesia memutuskan untuk tidak terikat pada poin ketiga dengan pertimbangan bahwa penghentian PLTU batubara harus dilakukan secara bertahap. COP-26 merupakan konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas cara mengatasi perubahan iklim.

Batubara merupakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi terbesar. Selain itu, efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran batubara juga merupakan kontributor terbesar pada perubahan iklim.

Dari seluruh COP yang pernah diselenggarakan, COP-26 merupakan ajang pertama yang secara eksplisit menyetujui untuk mengurangi penggunaan batubara.

Meskipun Indonesia telah mendukung deklarasi tersebut, namun inisiasi akan sia-sia jika tidak didukung dengan implementasi nyata.

Dengan harga batubara global yang menyentuh level tertinggi, para pengusaha tambang batubara lokal tentunya semakin

terpicu untuk meningkatkan produksi agar memenuhi permintaan global. Hal ini merupakan kondisi yang bertolak belakang dengan deklarasi yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia.

batubara, mengingat bahwa tingginya harga batubara dunia dan besarnya permintaan global juga akan memberikan kontribusi pada perekonomian pasca pandemi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dibutuhkan usaha secara bertahap untuk dapat menenggalkan sumber listrik dari PLTU batubara, namun di sisi lain pemerintah harus memastikan akses energi cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain, besarnya emisi yang dihasilkan batubara juga mengancam perubahan iklim Indonesia di waktu mendatang.

Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah transisi nyata ke energi bersih dan dapat diperbaharui, seperti membuka potensi energi biomassa. Energi biomassa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan dan tanaman.

Lalu apakah usaha pemulihan ekonomi melalui produksi batubara saat ini sepadan dengan ancaman iklim di masa depan? Sehingga, upaya pemulihan ekonomi serta sekaligus mempertimbangkan mengatasi perubahan iklim di masa mendatang tentunya akan menjadi tantangan yang serius bagi Indonesia.***

Energi biomassa sering disebut sebagai energi karbon netral yang berarti melepas jumlah karbon yang sama banyaknya saat melakukan pembakaran dan saat tanaman bertumbuh. Sebagai karbon netral, energi biomassa memiliki kelebihan dibandingkan batubara karena pembakaran batubara menghasilkan emisi karbon yang lebih besar.

Untuk dapat mewujudkan penggunaan energi biomassa secara lebih masif, dibutuhkan kolaborasi yang besar antar pemangku kebijakan. Proyek energi tidak dapat serta merta diserahkan kepada masyarakat atau perusahaan, melainkan dibutuhkan kebijakan dan tata kelola yang baku untuk mengembangkannya. Dibutuhkan sinergitas antar kementerian untuk dapat mewujudkan pengembangan energi biomassa.

Indonesia tentu akan sulit untuk terpisah dengan ketergantungan atas

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://riau.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru 28131

Telp : (0761) 23042 , Fax : (0761) 21336

Homepage : <http://riau.bps.go.id> E-mail: bps1400@bps.go.id